

PEMBANTAIAN PKI:
ANALISIS SOSIOLOGIS
KONFLIK IDEOLOGIS DI ACEH
1965-1967

Distributed By www.lentera-rakyat.sos4um.com

“Sepanjang sejarahnya manusia telah membuktikan diri sebagai produser penderitaan yang ulung dan konsumennya adalah manusia juga ”

Pengantar Penulis iii

(Profesor Teuku Jacob)

Fauzi
Suadi
Ainol Mardhiah

**PEMBANTAIAN PKI:
ANALISIS SOSIOLOGIS KONFLIK
IDEOLOGIS DI ACEH
1965-1967**

distributed by www.lentera-rakyat.sos4um.com

Unimal Press

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Fauzi, Suadi, Ainol Mardhiah

Pembantaian PKI: Analisis Sosial-Politik Konflik Horisontal di Aceh,
1965-1967/penulis Fauzi, Suadi, Ainol Mardhiah/editor Al Chaidar
Unimal Press Lhokseumawe NAD

xii, 190 hlm; 21 cm

ISBN 979-1147-02-7

1. PKI 2. Aceh I. Judul

I. Fauzi II. Suadi III. Mardhiah, A. IV. Chaidar, Al

Pembantaian PKI:

**Analisis Sosial-Politik Konflik Horisontal di Aceh,
1965-1967**

Editor: Al Chaidar

Hak Penerbitan pada Unimal Press Lhokseumawe NAD

Disain Sampul: Madani Press

Cetakan Pertama, Juli 2008.

Dicetak oleh: Madani Press

Alamat Penerbit:

Universitas Malikussaleh Press

Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe

Nanggroe Aceh Darussalam INDONESIA

P.O. Box 141,

☎ +62-0645-41373-40915

☎ +62-0645-44450

Jakarta Office;

Jl. Garuda Blok CC No. 2 Perum Bojong Depok Baru II

Sukahati-Cibinong, Bogor-INDONESIA

☎ +62-021-87914649

☎ +62-021-87914649

Hak Cipta © 2008

All rights reserved

No parts of this book may be reproduced by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
KATA SAMBUTAN.....	vii
DARI EDITOR.....	vii
PENGANTAR PENULIS.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II.....	17
SEJARAH MASUKNYA PKI KE ACEH.....	17
A. Masuknya “Unsur-Unsur Asing” ke Aceh.....	20
B. Kereta Api (Atjeh Tram).....	24
C. Kuli Kontrak Perkebunan.....	26
D. Masuknya SI (Sarekat Islam) ke Aceh.....	28
E. PKI Masuk ke Aceh Melalui SI.....	29
BAB III.....	33
SUASANA ACEH AWAL 1960-AN.....	33
BAB IV.....	49
PERISTIWA G-30-S/PKI DAN RESPON MILITER.....	49
A. Pembantaian Pahlawan Revolusi.....	49
B. Militer (TNI-AD) Bertindak.....	56
C. Latar Belakang Peristiwa G-30-S/PKI.....	62
BAB V.....	73
SUARA SUNYI KORBAN TAK BERDOSA.....	73
A. Genocide Skala Nasional.....	75
B. Kuburan Massal G30S/PKI.....	86
C. Pelaksanaan Pembabatan Anggota PKI.....	88
D. Peninjauan Kembali Sejarah Kekejaman PKI.....	95
BAB VI.....	99
RESPON INTERNASIONAL DAN NAIKNYA SOEHARTO SEBAGAI PENGUASA ORDE BARU INDONESIA.....	99

vi	<i>Pembantaian PKI: Analisis Sosial-Politik Konflik Horisontal di Aceh, 1965-1967</i>	
	<i>A. Lahirnya Orde Baru dan Strategi Pementapan Kehidupan Politik.</i>	<i>99</i>
	<i>B. Respons Internasional.....</i>	<i>102</i>
	<i>C. Naiknya Soeharto sebagai Penguasa Orde Baru.....</i>	<i>109</i>
	<i>D. Teori Konspirasi</i>	<i>113</i>
	<i>E. Daftar Maut CIA.....</i>	<i>117</i>
BAB VII.....		121
PEMBERSIHAN		121
“ANTEK-ANTEK” PKI DI ACEH.....		121
	<i>A. Reaksi Rakyat Aceh terhadap G-30-S/PKI.....</i>	<i>121</i>
	<i>B. Berakhirnya Riwayat PKI di Aceh.....</i>	<i>126</i>
	<i>C. Pembersihan Aparat Pemerintah Sipil.....</i>	<i>128</i>
	<i>D. Pembersihan Aparat Militer.....</i>	<i>131</i>
	<i>E. Gerakan Pembersihan PKI di Masyarakat.....</i>	<i>132</i>
	<i>F. Pembersihan dalam Lembaga-Lembaga Non-Negara.....</i>	<i>133</i>
	<i>G. Reaksi Etnis Cina.....</i>	<i>134</i>
	<i>H. Tahanan Pulau Buru.....</i>	<i>135</i>
BAB VIII.....		137
PKI SEBAGAI “BAHAYA LATEN”		137
	<i>A. Regimentasi Politik Orde Baru Terhadap Paham-Paham Kiri.....</i>	<i>138</i>
	<i>B. Bersih Lingkungan: Surat Bebas Organisasi Terlarang PKI.....</i>	<i>141</i>
	<i>C. Periode I (PKI 1926)</i>	<i>145</i>
	<i>E. Periode II (1926-1948).....</i>	<i>157</i>
	<i>F. Periode III (Pemberontakan PKI 1965).....</i>	<i>168</i>
BAB IX.....		171
PENUTUP.....		171
DAFTAR PUSTAKA.....		179
	<i>A. Buku.....</i>	<i>179</i>
	<i>B. Surat Kabar dan Majalah.....</i>	<i>181</i>
	<i>C. Situs Internet.....</i>	<i>185</i>
INDEKS.....		187
INDEKS.....		187

KATA SAMBUTAN DARI EDITOR

Syukur alhamdulillah atas kedamaian yang dilimpahkan oleh Allah *Subhana wa Ta'ala* atas Nanggroe Aceh Darussalam. Saya menyambut kehadiran buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini. Terbitnya buku ini adalah juga karena masa damai yang kita rasakan akhir-akhir ini di Serambi Mekkah yang kita cintai ini. Tanpa perdamaian, program-program pembangunan akan sangat sulit sekali diluncurkan. Kehadiran buku ini dalam waktu yang relatif singkat adalah karena berkah-Nya menurunkan suasana damai di hati setiap rakyat Aceh.

Bencana dahsyat yang terjadi di Aceh akibat gempa yang berkekuatan tinggi dan gelombang tsunami akhir tahun 2004 yang lalu di samping hikmah Allah bagi kehidupan manusia juga mengakibatkan musibah yang luar biasa bagi Aceh, bukan saja alam, rumah, bangun-an, harta benda, peninggalan sejarah, informasi data yang hancur dan hilang, tetapi juga ratusan ribu nyawa mela-yang. Salah satu hikmah yang kita miliki saat ini dari anugrah Allah adalah nikmat ketenangan dan perhatian dunia, terutama setelah disepakatinya Perjanjian Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka tahun lalu. Dan sejak saat itu pula situasi damai merasuki jiwa seluruh masyarakat baik Aceh, Indonesia dan bahkan masyarakat dunia. Suasana damai ini tercipta setelah kita mengalami serangkaian konflik. Berkaitan dengan hal ini, dan suatu

keinginan yang besar agar peristiwa-peristiwa seperti konflik ini takkan terulang lagi.

Suasana damai adalah suatu kondisi yang tercipta setelah terjadinya serangkaian konflik, pergolakan dan kejadian-kejadian revolusioner lainnya dan biasanya dalam situasi yang seperti inilah kita mengingat ke masa lalu yang kelam, yang terkadang ingin kita lupakan, yang sering membuat kita heran dan kagum bagaimana tragedi bisa terjadi dan apa yang salah pada diri kita sehingga kejadian-kejadian dan rentetan tragedi dengan mudahnya terjadi di wilayah kita sendiri. Di Aceh, yang terkenal dengan segudang sejarah heroisme, telah terjadi banyak konflik di masa lalu sejarahnya. Di antara yang terbaru yang bahkan hampir kita lupakan adalah (1) Prang Tjoembok; (2) Pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, dan (3) Peristiwa Penggayangan PKI; dan yang terakhir, yang mungkin masih segar dalam ingatan kita adalah (4) peristiwa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini yang telah mencoba merekam kembali tragedi-tragedi yang pernah kita alami dalam sejarah. Buku ini diterbitkan oleh Universitas Malikussaleh Press agar bisa berfungsi sebagai *historical memoric device* (alat pengingat sejarah) karena umumnya tragedi adalah mimpi buruk yang menimbulkan trauma panjang (dan kerugian material) bagi masyarakat yang menjadi korban konflik. Atas petunjuk saya, buku ini—yang ditulis dengan menggunakan bahan-bahan yang seadanya dalam situasi sedih setelah bencana tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 yang lalu—diharapkan tidak menimbulkan konflik baru seperti yang sudah-sudah.

Terimakasih kepada tim penulis yang telah merampungkan *draft version* buku ini sehingga dapat menjadi sumbangan pemi-kiran bagi masyarakat Aceh. Semoga dengan terbitnya buku ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran agar konflik-konflik di masa lalu tidak terulang kembali.

Bogor, 11 Juli 2008

Al Chaidar

PENGANTAR PENULIS

Sejarah berulang. Sebuah kalimat yang pendek tapi penuh makna. Setelah pemberontakan PKI di Banten tahun 1926 pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, dua dekade berikutnya terjadi lagi pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Dan terakhir yaitu pada masa perubahan orde lama menjadi Orde Baru, Pemberontakan tersebut adalah tragedi Gestapu 1965. Dan sepertinya tak pernah jera gerakan laten ini. Meski pada peristiwa yang terakhir disebutkan terjadi kesimpang siuran mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas tragedi ini, tapi ribuan pengikutnya atau yang tersangkut langsung atau tidak langsung, bersalah atau tidak bersalah telah menjadi korban “pembersihan” yang dilakukan oleh aparat maupun rakyat itu sendiri. Mereka yang dianggap berhubungan dengan PKI ditangkap, dibuang, bahkan dibunuh secara biadab.

Peristiwa 1965 bisa dilihat sebagai konsekuensi permusuhan komunisme dengan Islam sejak 1948. Tahun 1965-1966 kelompok Islam bersekutu dengan Angkatan Darat menghancurkan PKI. Menurut Anthony Reid (Revolusi Nasional Indonesia, 1996), peristiwa Madiun 1948 penting bukan hanya karena jatuh korban cukup besar pada kedua pihak, tetapi karena warisan kebencian yang ditinggalkan

antara kelompok kanan (santri) dan kiri (abangan).

Persiapan menyongsong Pemilu 1955 memperuncing keadaan. Fatwa komunisme identik dengan ateisme dikeluarkan Masyumi akhir 1954 di Surabaya. Sebelumnya, Isa Anshary membentuk Front Anti Komunis di Jawa Barat

Tahun 1960-an kekuasaan terpusat pada tiga pilar yaitu, PKI, Angkatan Darat, dan Soekarno di puncak piramida. PKI kian di atas angin. Pada akhir era demokrasi terpimpin, ada upaya menulis sejarah dari perspektif kiri. Untuk mengantisipasi ini, tahun 1964 AH Nasution membentuk Biro Khusus Sejarah Staf Angkatan Bersenjata, cikal bakal Pusat Sejarah ABRI.

Pada 30 September 1965 meletus gerakan kecil yang berdampak sangat besar. Pada peristiwa G-30-S, penculikan dan pembunuhan enam Jendral TNI dianggap sebagai suatu *coup d'état* yang bertujuan menghancurkan Pancasila dan UUD 1945. Ada beberapa versi mengenai dalang dari peristiwa tersebut. PKI, Soeharto, Soekarno, CIA dan juga pemimpin-pemimpin PKI dari Uni Sovyet dan RRC dianggap mempunyai andil dalam peristiwa tersebut. Pemberontakan yang bisa diatasi dalam sehari itu merupakan peristiwa nasional dimana pihak-pihak internasional yang berkepentingan turut berperan didalamnya.

Penumpasan PKI sampai ke akar-akarnya bukan hanya dilakukan di Jakarta atau Jawa sebagai basis PKI, tetapi juga di seluruh daerah seantero nusantara, termasuk di antaranya Aceh, dimana DPRD-GR nya telah disusupi oleh oknum-oknum PKI yang melakukan propaganda di daerah ini. Lebih kurang 3000 jiwa melayang menemani ratusan ribu korban lain di wilayah lain di Indonesia karena dianggap terlibat atau pernah berhubungan dengan PKI dan ormas-ormasnya termasuk juga jiwa orang-orang tak bersalah yang tidak

tahu apa-apa.

Meski PKI memang tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia, khususnya sila pertama, tetapi seharusnya tidak terjadi pembunuhan korban-korban tak bersalah dalam jumlah besar atau yang disebut juga *genocide* atau *mas-sacre*. Hal ini seharusnya menjadi cerminan bagi diri kita sendiri. Apakah kita tidak lebih kejam dari mereka yang disebut sebagai komunis itu? Pemberontakan PKI tahun 1926, tahun 1948 dan 1965. Semua itu menjadikan manusia Indonesia sebagai penjagal-penjagal manusia lainnya.

Tanpa melihat segi negatifnya, peristiwa itu berdampak bagi seluruh negara Indonesia beserta pemimpin-pemimpinnya, juga hubungannya dengan beberapa Negara lain. Dampaknya adalah perpindahan kekuasaan dari pemimpin orde lama ke orde baru. Sedangkan dampaknya ke luar negeri ialah, jika sebelumnya pada masa orde lama Soekarno mengeluarkan politik konfrontasi dengan Malaysia dan Negara-negara barat seperti Amerika dan Inggris, maka setelah Soeharto berkuasa konfrontasi itu selesai.

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang memunculkan PKI dan ajaran komunisme sebagai musuh negara yang utama, kekhawatiran yang teramat sangat pada komunis (*komunisto phobia*) terlihat begitu jelas inheren pada masa Orde Baru. Bahkan, pemerintah Orde Baru tak segan-segan melemparkan stigma PKI pada organisasi-organisasi yang berlawanan dengan kebijakannya. Selama beberapa puluh tahun di masa itu, orang-orang yang pernah terlibat PKI dikucilkan, bahkan dicap sebagai Eks Tapol. Orde Baru, sengaja menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan maut yang setiap saat siap membunuh/menghilangkan segala bentuk ancaman yang diangankan akan terjadi. Kekuatan mengancam itu diperoleh melalui kontrol imajinasi.

Padahal, angan-angan itu tidak pernah menjadi kenyataan, contohnya rumor tentang balas dendam anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi latar peristiwa pembantaian mulai dari tahun 1965-1969. Rumor itu dipakai sebagai pembenaran oleh alat negara dan kelompok sosial yang berkepentingan langsung atau tidak langsung membantai secara massal anggota atau simpatisan atau keluarga yang dituding sebagai bagian dari PKI. Lebih aneh lagi, PKI menjadi label bagi setiap kekuatan yang dibayangkan akan menentang pemerintah. Anak-anak anggota PKI otomatis menjadi anak jadah yang disingkirkan dari jabatan atau posisi di pemerintah.

Hal ini tidaklah mengherankan karena meski gerakannya selalu dapat dihancurkan dan pengikut-pengikutnya dapat dibunuh, tetapi ideologi tak akan bisa mati. Hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa pemberontakan PKI di Indonesia dalam kurun waktu yang berlainan. Dua kali PKI memberontak dan dapat ditumpas tapi kemudian tumbuh kembali bahkan dengan pendukung yang jauh lebih besar. Pada pemberontakan ketiga, kira-kira ratusan ribu sampai jutaan jiwa melayang karena terkena imbasnya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa ajaran yang diciptakan oleh Karl Marx ini sewaktu-waktu bisa tumbuh kembali. PKI dan ideologi komunisnya akan selalu menjadi bahaya laten bagi Negara Indonesia ini.

Akhir kata, harapan yang dibebankan atas buku ini adalah, bahwa buku ini bisa mengundang khalayak untuk menilai dengan kritis. Dan kami sebagai penulis buku ini, mengucapkan selamat untuk membaca buku ini. Mungkin dengan kehadiran buku ini, para penulis Aceh kembali bersemangat untuk menghasilkan karya-karya yang dapat dinikmati generasi selanjutnya. Bukankah buku merupakan bagian dari proses pembentukan peradaban suatu bangsa?

Wassalam.

Lhokseumawe, Juli 2008

Fauzi
Suadi
Ainol Mardhiah

Bab I

PENDAHULUAN

Peristiwa pembantaian sesama bangsa tidak dapat dilupakan, sehingga sejarah mencatatnya menjadi sebuah luka yang tergores. Pembantaian yang dilakukan Partai Komunis Indonesia telah menjadi suatu bagian kelam dalam perjalanan nasib anak bangsa sekaligus menjadikannya suatu pelajaran berharga yang akan menjadi cerminan bagi Indonesia dalam menapaki langkah-langkahnya ke depan.

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan ang-

gota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI.

Keberadaan Partai Komunis di Indonesia, termasuk kemudian di Aceh, tidak dapat ditafsirkan secara sederhana, bahwa kelahiran PKI di Indonesia hanya sebagai produk budaya Indonesia sendiri, tanpa keterkaitan dengan dunia luar atau kondisi sosial politik bangsa-bangsa di dunia. Jauh sebelum masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda, rezim komunis telah membentangkan pengaruh ajarannya yang luar biasa di beberapa negara di dunia. Misalnya, negara-negara bekas Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, beberapa negara di Eropa Timur, dan juga Republik Kuba di Amerika Latin. Partai Komunis dunia telah lahir pada beberapa dekade setelah Karl Marx meninggal pada tahun 1883.¹

Setelah revolusi Bolshevik (1917) Partai Komunis menemukan tempat yang subur bagi kejayaannya di Uni Soviet Rusia, yang kemudian dikenal dengan partai Komunis Rusia. Di tangan Stalin (1930) Partai Komunis Rusia mencapai kejayaan politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan, yang kemudian mulai timbul keinginan untuk menjadikan Rusia sebagai “induk peradaban” kumunis dunia.

Ambisi inilah yang kemudian mendorong gerak langkah

¹ *Karl Marx* lahir di Kota Trier Jerman Barat, 5 Mei 1818 dan meninggal dunia pada tahun 1883, dari keluarga Yahudi beragama Protestan. Tahun 1842 Marx meraih Doktor (Ph.D) dalam ilmu hukum. Marx sangat senang bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar radikal di Jerman dan Perancis. Banyak menulis tentang filsafat, ekonomi dan politik terutama gerakan revolusioner. Di Jerman dan Perancis, Marx berjuang membela kaum buruh. Marx sering menderita dan hidup dalam kepedihan. Sahabatnya *Engels* yang banyak membantu. Kemudian mereka menulis bersama-sama. Ada 40 buku mereka yang terkenal, di antaranya *Das Kapital* dan *Manifesto Komunis* (1967).

ekpan-sionisme komunis ke seluruh penjuru dunia, baik dalam wilayah kawasan blok timur, terutama Cina, blok barat, maupun kawasan negara-negara non-blok pada waktu itu. Kondisi inilah yang kemudian mengundang kecurigaan Amerika (CIA) yang ada pada waktu itu disebut sebagai pemimpin persekutuan blok barat. Amerika merasa khawatir, jika komunisme berkembang atau men-dapat sambutan di berbagai negara tertentu, maka eksistensi paham demokrasi, liberal-isme dan kapitalisme yang telah lama menjadi ideologi politik Amerika akan terancam.

Komunisme, harus dipahami, bahwa ia sangat dekat dengan rezim-rezim pemerintahan yang menindas, totaliter dan tiran. Komunisme juga sangat dekat dengan tentara-tentara revolusioner yang kejam dan brutal. Komunisme juga dekat dengan system dan kondisi perekonomian yang senjang antara satu golongan masyarakat dengan golongan yang lain, antara buruh dengan majikan, antara kuli dengan manajer, antara borjuis dan proletar. Semua ini merupakan gambaran situasi yang sangat mudah bagi tumbuh-suburnya benih-benih komunisme. Situasi dan kondisi inilah yang menjadi sebab, sehingga komunisme pernah ada di Kamboja, Philipina, Laos, Malaysia, Indonesia, dan juga di Nepal.²

Dalam kiprahnya kemudian, PKI Indonesia juga memiliki

² Jiuping, "9 Komentor Mengenai Partai Komunis", PT. Sinar Era Baru, Jakarta, 2005. hlm. 4-5. Dalam buku ini dijelaskan secara gamblang, bahwa perkembangan komunisme di negara-negara tersebut sangat besar peran dan dukungan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) atau dalam buku lain disebut Partai Komunis Cina (PKC). Jiuping, juga menjelaskan bahwa komunisme menerapkan *teori kompetisi species* kedalam pertarungan kelas evolusi sosial, dan komunisme selalu mengedepankan kekerasan. Pertarungan dan kekerasan adalah *keyakinan* komunis, begitu kata Mao Zedong, dan itu adalah *jalan utama* untuk memperoleh kekuasaan politik (jabatan pemerintahan) dan mempertahankan hidup. Hal itu pula sebagai *metoda* untuk mempertahankan eksistensi partai-partai komunis di dunia.

ciri, watak dan metoda pergerakannya yang mirip dengan apa yang ada pada partai-partai komunis di dunia seperti yang disebut di atas. Pola dan metoda gerakan selalu mengedepankan kekerasan yang berujung pada pembunuhan lawan-lawan politik. Dalam rangka ekspansi cita-cita ajarannya itu, PKI di Indonesia juga telah melakukan pemberontakan terhadap negara dan pemerintah Indonesia pada tahun 1948 dan 1965 dengan cara-cara tersebut di atas, melalui pertarungan dan kekerasan. Pemberontakan itu telah menjadi prahara yang berdarah-darah dan akhirnya oleh pemerintah Orde Baru, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.

Dengan itu, citra PKI pada saat ini bukan hanya menimbulkan trauma bagi siapa saja yang terindikasi dan ada kaitan dengannya, tetapi secara ideologis nama itu juga telah menimbulkan kesan yang kuat dalam ingatan dan pemahaman masyarakat Aceh, bahwa PKI sebagai partai sarat dengan kekejaman, sadisme dan lebih dari pada itu semua, PKI juga dicap sebagai gerakan anti Tuhan (atheisme). Konsep dan citra PKI sebagai partai yang anti Tuhan, dalam persepsi orang Aceh hal itu juga identik dengan melawan Allah swt, dan identik pula dengan sikap yang berseberangan dengan ajaran Islam, berikutnya ummat Islam dan juga dengan eksistensi Islam itu sendiri di tanah Aceh.

Islam telah berakar dan menghujam dalam peradaban masyarakat Aceh jauh sebelum datangnya kolonialisme bangsa-bangsa eropah dan Jepang di Indonesia. A. Hasjmy berpendapat, bahwa agama Islam telah diterima dan menjadi agama negara atau kerajaan sejak masa kerajaan Islam Perlak yang didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah (840 Masehi). Selanjutnya, agama Islam semakin bertambah kuat, begitu juga dengan akidah dan kaidah-kaidahnya kedalam berbagai sistem dan ruang kehidupan ma-

sya-rakat Aceh, ketika berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam pada 1 Ramadhan 601 Hijriah (1205 Masehi). Hal ini disebabkan oleh suatu kondisi politik yang mendorong situasi untuk terjadinya suatu proses integrasi kekuatan politik, agama, budaya dan perekonomian-an yang sangat luar biasa, yang ditandai dengan bersatunya semua kerajaan Islam yang ada di Aceh seperti Kerajaan Islam Samudera Pase, Kerajaan Islam Banua, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pedir, Kerajaan Islam Jaya, dan juga Kerajaan Islam Perlak sendiri.³

Setelah Islam bersemi dan berakar kuat dalam aqidah dan kaidah kehidupan masyarakat Aceh selama seribu tahun lebih (840 – 1873) kemudian datanglah paham-paham asing ke Aceh, termasuk komunisme yang dibawa oleh orang-orang tertentu yang bekerja dalam sistem pemerintahan kolonialisme Belanda.

Sebenarnya komunis telah memasuki Indonesia jauh sebelum pemberontakan PKI Muso di Madiun tahun 1948. Bahkan organisasi perintisnya telah ada sebelum berdirinya organisasi kepemu-daan di Indonesia (Boedi Oetomo) tahun 1920.

Cikal bakal gerakan komunis di Indonesia diawali oleh berdirinya *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) pada tahun 1914 di Surabaya. lalu tanggal 23 Mei 1920, ISDV telah berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Empat tahun kemudian, organisasi ini kembali mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai ini memusatkan kegiatannya di Semarang, hal ini membuat Semarang dikenal sebagai “ibukota Komunis pertama di Indonesia”.

Ribuan mil dari Jawa, Lenin menulis, “Perkembangan

³ A. Hasjmy, *Peranan Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976. hlm 8-12.

yang signifikan dalam pergerakan revolusi demokrasi telah tersebar sampai ke Hindia Belanda. Partai dan persatuan komunis telah terbentuk dengan kecepatan yang mencengangkan. Pemerintah Hindia Belanda melarang pendirian itu, tapi itu hanya membuat mereka tambah membenci pemerintah dari belakang dan menambah kecepatan dari gerakan tersebut.⁴

Asal usul kaum komunis di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dua nama besar, Henks Sneevliet dan Semaoen. Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet memulai kariernya sebagai seorang penganut mistik Katolik tetapi kemudian beralih ke ide-ide sosial demokratis yang revolusioner. Pada saat di Belanda, ia memimpin sebuah pemogokan buruh galangan kapal di Amsterdam. Aktivitasnya itu membuat ia sukar mendapatkan pekerjaan, oleh sebab itu ia pergi menuju Indonesia untuk mencari penghidupan.

Pekerjaanya yang pertama ialah sebagai staf editor *Sorabaya-jaasch Handelsblad*. Lalu, pada tahun 1913 ia pindah ke Semarang untuk menggantikan posisi rekannya D.M.G Koch sebagai sekretaris *Semarang Handelsvereniging*. Kemudian, pada tahun 1914, bersama dengan tiga orang rekannya J.A. Bransteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma mendirikan ISDV di Surabaya. Selain itu ia juga aktif di *Vereniging voor Spoor en Traamwegpersoneel (VSTP)* sebagai editor pada *De Volharding*, sebuah koran terbitan VSTP. Atas sarannyalah, VSTP terbuka bagi bumiputera dan bergerak radikal membela kepentingan pegawai-pegawai bumiputera yang miskin. Figur kedua dalam gerakan ini ialah Semaoen. Ia dikenal sebagai seorang anak didik Sneevliet yang cerdas. Lahir pada tahun 1899 di Mojokerto sebagai anak buruh kereta api. Ia bukanlah keturunan priayi,

⁴ Craig Bowen, *From Ashes The Rise and Fall of the PKI, A Short History of The Indonesian Communist Party*, Militant International Publication.

namun, karena dibesarkan pada zaman etis, ia turut mengenyam pendidikan dasar gaya Barat. Lulus dari Sekolah Bumiputera Angka Satu, bergabung dengan *Staatspoor* (SS) pada tahun 1912 di usia tiga belas tahun. tahun berikutnya, ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) afdeling Surabaya. Berkat kecakapannya Semaoen langsung tampil ke depan sebagai sekretaris SI di Surabaya pada tahun 1914. Pada masa itulah, ia bertemu dengan Sneevliet dan terkesan akan “sikap manusiawi yang tulus” yang sama sekali terbebas dari “mentalitas kolonial” yang dimilikinya. Melalui Sneevliet, Semaoen mulai belajar menulis dan berbicara dengan bahasa Belanda. pada Juli 1916, ia pindah ke Semarang untuk menjadi propagandis VSTP dan menjadi editor SI Tetap, surat kabar VSTP yang berbahasa Melayu. Satu tahun setelahnya, ia kembali dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai propagandis dan komisaris SI Semarang pada usia 18 tahun. Setelah Sneevliet diasingkan, Semaoen mengambil alih kepemimpinan dalam partai.

Di awal pendiriannya, anggota ISDV didominasi oleh orang-orang Belanda. Didorong oleh keinginan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pada 1915 - 1916 ISDV menjalin hubungan dengan Insulinde (Kepulauan Hindia), sebuah partai yang didirikan pada tahun 1907 dan setelah tahun 1913 partai ini menerima anggota dari *Indische Partij* yang terdiri dari beberapa orang Indo-nesia yang radikal. Namun, kerjasama ini belum menjadi alat yang ideal untuk mengambil hati rakyat pribumi secara keseluruhan. Berdasarkan hal itu, ISDV mengubah haluannya ke SI, satu-satunya organisasi yang memiliki massa Indonesia terbanyak. Dengan menggunakan cara ini, ISDV berhasil menggaet dukungan kelas pribumi yang pada umumnya ialah muslim nominal. Strategi ini dikenal sebagai “blok di dalam” atau *block within* yang dikembangkan sejak tahun 1916 oleh ISDV untuk meraih dukungan dari massa Sarekat Islam (SI).

Maksud dari taktik ini ialah mengembangkan propaganda dan koneksitas di antara massa dengan membuat semacam sel-sel di dalam tubuh partai induk. Namun begitu, di masa selanjutnya, strategi telah mendatangkan perseteruan antara SI dan PKI. Dalam masa awal kebangkitan gerakan kiri, mencuat isu tentang *Indie Werbaar* (pertahanan Hindia). *Indie Werbaar* merupakan reaksi keceemasan pemerintah kolonial atas bangkitnya pan Asianisme yang dipimpin oleh Jepang dalam Perang Dunia I (1914-1918). Demi mengamankan asetnya dari pengaruh negatif Perang Dunia I, pemerintah bermaksud untuk membentuk milisi pertahanan yang terdiri dari rakyat bumiputera. Menanggapi hal tersebut, muncul sikap pro dan kontra. Dalam pada itu, gerakan kiri yang dimotori oleh Semaoen, Darsono, Haji Misbach, dan Mas Marco berada di pihak yang kontra. Melalui pidato-pidato propaganda dan tulisan-tulisannya, mereka menentang keras kebijakan pemerintah itu. Mereka tak ingin rakyat pribumi menjadi korban sia-sia dari perjuangan yang tak pasti arahnya.

Dengan cepat isu ini berubah menjadi tuntutan untuk membentuk perwakilan rakyat pribumi. Gonjang-ganjing ini kemudian ditanggapi oleh parlemen Belanda dengan meluluskan permintaan untuk membentuk *Volksraad* (Dewan Rakyat) dan menolak *Indie Werbaar*. Pada kenyataannya, *Volksraad* hanya diisi oleh orang-orang yang bersikap kooperatif pada kekuasaan dan menafikan kepentingan rakyat. Menanggapi hal itu, koran "Sinar Djawa" mengkritik pemilihan anggota *Volksraad* sebagai hal yang tak berguna bagi rakyat. Ketidak-puasan ini secara jelas menunjukan sikap kepedulian yang tinggi atas nasib bangsa pribumi. Dalam pandangan gerakan kiri, *Volksraad* harus benar-benar mewakili dan berjuang demi perbaikan nasib wong cilik. Di waktu selanjutnya, kritik-kritik tajam Semaoen dan kaum kiri lainnya tidak hanya diujamkan kepada isu

Volskraad saja, namun diperluas lagi menjadi kecamatan-kecamatan terhadap kapitalisme yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial. Kecamatan-kecamatan itu direalisasikan dalam berbagai bentuk, tidak hanya artikel, tapi juga dalam bentuk kisah yang sastra.

PKI yang telah menjadi sebuah partai pribumi yang progresif, mengembangkan propaganda yang bersifat keindonesiaan. Pada saat itu PKI kurang menekankan pada doktrin-doktrin teoritis Marx dan Lenin, namun ia lebih memberikan perhatian pada propaganda yang berbasis kultural Jawa. Berbeda dengan pemerintah kolonial yang menetapkan sebagai pemberontak, PKI menyebut Diponegoro, Kyai Maja, dan Sentot sebagai pahlawan dalam Perang Jawa. PKI juga menggunakan ramalan-ramalan yang bersifat mesianistik mengenai Ratu Adil sebagai daya tariknya. Satu hal yang tampak sebagai sebuah keunikan pada periode ini, munculnya istilah Islam Komunis. Haji Misbach ialah salah satu tokoh muslim-komunis yang melegenda saat itu. Sebagai mubaligh lulusan pesantren, ia sering melakukan ceramah tentang Islam dan komunis, sehingga ia dikenal sebagai “Haji Merah”.

Namun PKI alpa, bahwa sebenarnya hubungan Islam dan komunis seibarat minyak dengan air, dapat dicampur, tapi tak mungkin bersatu. Di balik kekompakan mereka dalam menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, pertikaian ideologis telah merapuhkannya dari dalam. Dan tampaknya, atas dasar itulah Semaoen bermaksud mendirikan federasi antara 20 sarekat dagang yang berada di bawah naungan SI dengan 72.000 orang anggota PKI di bulan Desember 1919. Akan tetapi, sang “raja mogok”, yang juga pemimpin serikat sekerja dari Central Sarekat Islam (CSI), Surjopranoto, mempersoalkan kepemimpinan Semaoen sehingga bubarlah federasi itu. pertikaian antara Islam dan

komunis semakin tak terbendung ketika pada bulan November 1920, sebuah terbitan PKI yang berbahasa Belanda, *Het vrije woord* (Kata yang bebas) menerbitkan tesis-tesis Lenin tentang masalah-masalah nasional dan penjajahan yang meliputi kecaman-kecaman terhadap Pan-Islam dan Pan-Asianisme. Berbagai pihak berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, termasuk oleh Tan Malaka. Namun, sia-sia belaka, akibat dari pertikaian ini SI terbelah menjadi dua bagian, SI merah dan SI Putih. Kemudian, SI merah diberi nama sebagai Sarekat Rakyat. Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa strategi PKI dalam mencari massa ini telah menyebabkan pertikaian yang kronis antara SI dengan PKI.

Dan perpecahan tersebut tampaknya telah meningkatkan rasa permusuhan di semua pihak. Persaingan memperebutkan pengikut penduduk desa antar cabang-cabang SI dan cabang Sarekat Rakyat, telah menyeret PKI ke dalam lingkungan keras dan anarkis. Akhirnya PKI tergelincir dalam sebuah pemberontakan ketika organisasi ini tidak dapat memutuskan apakah harus membubarkan Sarekat Rakyat yang jumlah pengikutnya dari kelas non proletar semakin bertambah banyak. Suasana yang tidak menguntungkan bagi pergerakan nasional ini berlangsung cukup lama dan berlarut-larut. Gerakan kiri tejobak ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan, lebih-lebih setelah Semaoen, sang pionir kiri, mengalami nasib yang tragis; dibuang oleh pemerintah kolonial karena menyerukan pemogokan buruh tahun 1923.

Di tengah-tengah suasana yang carut marut, akibat ketatnya pengawasan penguasa dan konflik internal yang mulai merapuhkan gerakan kiri, sebuah pemberontakan disiapkan pada bulan Desember 1924. Sesungguhnya, aksi ini tidak mendapatkan restu dari Komintern di Uni Soviet,

mengingat pemimpin PKI, Semaoen, dibuang karena kasus pemogokan besar-besaran buruh VSTP pada tahun 1923. Namun, beberapa pimpinan PKI yang tersisa, tetap bermaksud untuk “unjuk gigi” di hadapan penguasa kolonial.

Sebuah keunikan muncul dalam pemberontakan ini. Banten, sebuah daerah yang dikenal dengan daerah pengikut Islam yang ortodoks, juga turut memberontak atas nama PKI. Malah, di daerah ini pemberontakan komunis jauh lebih besar ketimbang tiga daerah lainnya, yakni Priangan, Batavia, dan Sumatera Barat. Khusus di Banten, pemberontakan komunis terjadi akibat para pemimpin tradisional, kyai dan jawara, merasa tidak puas dengan SI. Faktor lainnya ialah kesamaan sifat radikalisme yang diandung, baik oleh PKI, maupun oleh rakyat Banten. Betapun hebatnya pemberontakan kaum kiri ini, akhirnya dapat ditumpas pada tanggal 14 November 1926. Sekitar 13.000 orang ditangkap, beberapa orang ditembak dan sebagian lain dijebloskan ke kamp di Boven Digul. Pemberontakan yang abortif ini sekaligus menandakan kehancuran gerakan kiri pada masa kolonial, untuk lalu kembali bergerak di masa selanjutnya.

Sebuah tahapan kebangkitan nasional ditutup oleh pemberontakan PKI tahun 1926. akan tetapi, *sad ending* yang menyakitkan ini bukan berarti menutup semua gerakan yang bertujuan merebut kemerdekaan Indonesia. Kehadiran PKI di dalam kancah pergerakan nasional memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas mengenai apa dan siapa sesungguhnya bangsa Indonesia itu. Gerakan kiri yang diwakili oleh PKI telah menyadarkan kaum pribumi sebagai sebuah bangsa tertindas oleh kapitalisme dan imperialisme bangsa Belanda. Berdasarkan hal di atas, PKI telah menetapkan secara tegas identitas kelas pribumi. Lebih jauh lagi, dengan segala aksinya, baik melalui tulisan, pida-

to-pidato propaganda, aksi-aksi mogok dan pemberontakan melawan pemerintah kolonial, PKI telah mengangkat kaum pribumi menjadi lebih bermartabat.

Jika pada pemberontakan 1926 pemerintah kolonial mem-berangus gerakan ini dengan membuang dan membunuh pengikutnya, pada masa Orde Baru, gerakan kiri lagi-lagi dipersalahkan atas tragedi Gestapu 1965. Ribuan pengikut PKI ditangkap, dibuang, bahkan dibunuh secara biadab. Gerakan kiri tidak dapat lagi bernafas lega, ia terengah-engah dan sekarat, tergulung deras arus kapitalisme.

Revolusi ajaran komunisme pada dasarnya adalah gelora serangkaian usaha yang dilakukan oleh pihak kaum komunis di mana saja mereka berada untuk menjalankan misi, cita-cita dan menyatakan eksistensinya sebagai kekuatan baru. Misi utama setiap gerakan komunisme adalah melenyapkan perbedaan kelas, jenis kelamin atau gender, dan perbedaan kebangsaan dengan cara revolusioner dan parlementer. Selanjutnya, perjuangan komunis akan membuka suatu dunia baru yang didalamnya penuh ruang dan kesempatan yang bebas untuk semua orang, terutama untuk mereka yang selama ini terpinggirkan atau mendapat perlakuan diskriminatif dalam berbagai kesempatan yang ada.⁵

William Ebenstein, juga menjelaskan bahwa, baik di Cina RRC maupun di Russia, orang-orang Komite Central Partai Komunis sangat menyadari, bahwa "*dunia baru yang terbuka*" itu harus diisi dan dipilih dari kalangan anak-anak generasi baru yang cerdas-cerdas dari kalangan keluarga petani atau buruh-buruh dan kuli-kuli yang relatif miskin. Mereka inilah yang kemudian disebut "*kaum terpilih*". Ke-

⁵ William Ebenstein, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia*, Narasi, Jakarta, 2006. hlm.83-89.

majuan Uni Soviet Rusia, begitu juga RRC setelah perang dunia pertama, dan selanjutnya Russia unggul dalam perang dunia kedua, hingga menjadi kekuatan besar yang menyaingi Amerika, menurut Ebenstein, semuanya bermula dari karya-karya besar “kaum terpilih” ini. Mereka sebagai kekuatan intelektual yang cukup handal dan diberikan peran yang cukup besar dalam memajukan industrialisasi, yang kemudian memajukan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemiliteran, politik, ekonomi dan seterusnya.

Sebagian kecil anak-anak cerdas yang direkrut dan terpilih itu, dapat dipastikan telah cukup siap secara mental ideologis. Mereka dipastikan mempunyai semangat dan akat yang luar biasa untuk belajar dan mengejar cita-cita, merubah nasib dan kedudukan, agar dapat mengantarkan mereka menjadi pemimpin elit pemerintahan, militer, industrialisasi, dan dalam berbagai sektor kehidupan lainnya. Peluang ini adalah bagaikan jalan raya yang cukup mulus bagi anak-anak petani, buruh dan kuli-kuli untuk melaju kencang menuju terminal kemajuan di dunia baru.

Namun, di balik itu komunis juga berpikir dalam kerangka strategi militer terhadap sebagian jumlah populasi yang lebih besar itu. Mereka harus tetap berada dalam organisasi-organisasi kaum pekerja, karena dalam perspektif tujuan militer komunis, posisi organisasi kaum pekerja di pusat-pusat industri di kota-kota dan buruh tani yang bekerja di basis-basis mekanisme pertanian di daerah-daerah pedalaman, adalah sebagai kekuatan cadangan yang berdiri di belakang tentara profesional menjadi gerilyawan sejati, apabila sewaktu-waktu negara komunis terlibat dalam pertempuran atau perang terbuka pada setiap perjuangan cita-cita dan misi komunisme untuk dunia.

Dalam tulisan Jiuping, terdapat uraian yang jelas tentang langkah-langkah Partai Komunis (Komunisme) dalam

setiap usahanya untuk melaksanakan misi dan cita-cita komunisme dunia. Di antara banyak cara yang disebutkan dalam buku itu, beberapa dari padanya dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama, komunisme dalam setiap gerakannya selalu melancarkan revolusi dengan kekerasan, tujuannya adalah untuk mengguling pemerintahan yang berkuasa, terutama pemerintahan atau sistem politik yang tidak sesuai dengan cita-citanya, kemudian menggantikan dengan rezim baru yang berjiwa marxis dan berwatak proletar. Kedua, komunisme selalu mencampur adukkan kebenaran dengan kebathilan, atau kebaikan dengan kejahatan. Misalnya, ketika membangkitkan semangat kaum buruh/proletar, para pemimpin revolusi selalu berkata; "... kaum buruh adalah kelas yang paling progresif, kelas yang paling ideal, paling sabar dan kelas yang tidak egois. Buruh adalah kelas paling depan dalam perjuangan untuk cita-cita revolusi, dan buruh adalah pioner-pioner kaum proletar di mana saja mereka berada. Tanpa petani yang miskin, tidak ada revolusi sejati, dan revolusi ini kita buka adalah untuk membela mereka, membela orang-orang miskin". Ini adalah kata-kata Mao Zedong yang selalu dikutip oleh tokoh-tokoh politik dari partai komunis.

Ketiga, dalam setiap gerakannya komunis selalu memanfaatkan cara-cara menghasut dan menyulut pertikaian massa. Keharmonisan yang telah ada dan tumbuh subur dalam suatu masyarakat yang tertib, baik di kota-kota dan lebih-lebih di desa-desa, kondisi ini dianggap sebagai hambatan bagi tegaknya ideologi dan misi masyarakat komunisme atau masyarakat baru. Oleh sebab itu komunis selalu berusaha memporak-poranda keharmonisan ini, dengan cara memfitnah orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, tokoh-tokoh agama, pemimpin masyarakat yang jumlahnya relatif sedikit (misalnya 5%). Sebaliknya, komunis menghasut sejumlah orang-orang yang tidak kaya, tidak mempunyai ke-

dudukan tinggi, penganggur, dan lain-lain yang jumlahnya relatif banyak (misalnya 95%). Kondisi ini dimanfaatkan dan dipertentangkan oleh komunis sesuai dengan “teori pertentangan kelas”, sehingga keadaan yang damai-harmonis tadi menjadi berubah dengan tumbuhnya benih-benih kebencian, hilangnya ukhuwah sesa-ma warga, munculnya jurang pemisah, dan selanjutnya semakin dekat dengan kondisi perpecahan dan huru-hara.⁶

Dalam pergerakannya di Indonesia, Partai Komunis (Indonesia) dianggap lebih berani dalam menyatakan misi dan tujuan politik-politiknya dibandingkan dengan partai-partai politik yang lain. Pada waktu itu, PKI adalah satu-satunya partai yang relatif berani menyatakan secara terbuka kepada publik, bahwa PKI ingin mewujudkan masyarakat komunis Indonesia yang adil dan merata. Di samping PKI, pada waktu itu juga ada PNI yang juga berani menyatakan diri dengan slogan nasionalisme. Pamor PNI pada waktu itu terutama dalam hal propaganda, berada dibawah PKI. Oleh sebab pamor gerakannya yang kuat, maka PKI relatif radikal dalam sikap dan gerakan politiknya. Salah satu propaganda PKI yang relatif populer adalah ketika PKI menyatkan secara terbuka, bahwa revolusi 17 Agustus 1945 belum selesai.⁷

Revolusi itu masih berada pada tahap yang paling awal dari cita-cita revolusi PKI di Indonesia. PKI bersama rakyat dan pengikut-pengikutnya harus segera bersiap-siap menuju tahap revolusi berikutnya, yaitu revolusi kedua. Dalam revolusi kedua ini PKI bercita-cita dan bersungguh-sungguh mewujudkan negara dan pemerintahan yang berdasarkan

⁶ *Ibid*, 205. hlm.23 – 35.

⁷ M.H.Lukman seorang ideolog/pemikir di Komite Central PKI pada tahun 1957 telah menerbitkan buku pedoman revolusi sosial-agraria yang diberi nama ABC Revolusi Indonesia.

komunisme. Kapan itu tercapai, ketika semua alat-alat negara dan birokrasi pemerintahan negara berada di tangan orang-orang komunis. Artinya ketika Presiden, Kepala Angkatan, para menteri, Gubernur, Bupati, Walikota hingga ke Lurah dan Kepala Desa semuanya dipegang oleh orang-orang komunis. Dan setelah itu, PKI Indonesia segera akan melangkah ke revolusi ketiga, revolusi yang akan melahirkan masyarakat Indonesia yang sama rata dan sama rasa antara borjuis dan proletar.

Gambaran ini, dapat memberikan pemahaman yang jelas, betapa ambisi PKI untuk berkuasa seperti tak sabar menunggu dan tak bisa di bendung lagi. Di sisi yang lain, ambisi PKI yang demikian rupa, secara implisit telah mendesak nurani ummat Islam dan kaum nasionalis Indonesia, berikutnya tentara Indonesia dan semua pihak yang merasa dirugikan oleh gerakan dan propaganda PKI untuk kemudian bangkit menentang. Dalam suasana yang kian paradoks ini, yang disertai dengan adanya pergesekan ideologis antar golongan, sebagaimana pengalangan konflik-konflik di berbagai negara berkembang, telah menjadi ruang dan iklim baru bagi tampil tentara sebagai pihak yang akan melakukan upaya stabilisasi politik dan kemudian mengambil keuntungan politik (berkuasa) jika kondisi dapat segera tercipta untuk yang disebut terakhir itu.

Persaingan politik dan ideologi di tingkat nasional, dalam bentuk yang lebih formal dapat dilihat kemudian dalam peta hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955. Cerminan ideologi politik tersebut misalnya, dapat dibaca pada posisi empat buah partai yang berhasil tampil menjadi "Empat Besar" pemenang Pemilu 1955 itu, yang secara berturut-turut disebutkan PNI, MASYUMI, NU, dan PKI. Masing-masing partai tersebut dapat dikatakan mewakili ideologi nasionalisme (PNI), mewakili ideologi Islam (Masy-

umi dan NU) dan berikutnya ideologi komunis yang diwakili oleh PKI. Pada masa itu (1955) walaupun secara nasional PKI telah berhasil nyata mencapai empat besar dalam Pemilu, tetapi keadaan di Aceh begitu muncul ke permukaan. Gerakan dan aktivitas PKI di Aceh baru diketahui secara terang-terangan pada tahun 1963, ketika Thaib Adamy mulai melakukan gerakan propaganda, kampanye dan mempengaruhi massa untuk mendukung PKI yang dipimpinnya. Thaib Adamy adalah kader PKI yang dianggap tangguh dan militan pada masa itu. Jabatannya selaku wakil Sekretaris Komite Central PKI, di samping itu ia juga berkedudukan sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Aceh mewakili Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh.***



18 *Pembantaian PKI: Analisis Sosial-Politik Konflik Horizontal di Aceh, 1965-1967*

Bab II

SEJARAH MASUKNYA PKI KE ACEH

Ada pendapat yang menyatakan bahwa secara historis PKI di Aceh sudah mulai ada sejak zaman kolonial Belanda yang disebarkan oleh kelompok pendatang, yang kebanyakan di antara mereka itu adalah dari golongan buruh atau pekerja-pekerja di perkebunan dan sebagainya di pertambangan. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka itu adalah petani miskin, buruh perkebunan, kuli-kuli jalan, pegawai pemerintahan yang golongan rendah, buruh kereta api, dan lain.⁸ Dimungkinkan juga, kebanyakan dari mereka yang terpengaruh dengan komunisme karena tidak memiliki aqidah Islam, yang kuat, serta tekanan kemiskinan yang relatif berat terutama kalangan buruh dari luar atau pendatang.

Di sisi lain, juga diketahui bahwa sejak tahun 1963 usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKI dalam bentuk kampanye, propaganda, rapat-rapat umum dan berbagai agitasi lainnya relatif kuat dan sangat gencar di seluruh Aceh, terutama di ibukota Kabupaten dan Kotamadya seperti yang dilakukan oleh Thaib Adamy. Massa

⁸ I Ketut Ardhana, *Dimensi-dimensi Konflik di Tingkat Lokal*, Lokakarya Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, 2005. hlm. 15.

yang datang mendengarkan kampanye PKI dapat dikatakan relatif banyak di mana-mana, walaupun hal itu tidak menjadi ukuran untuk menyebutkan bahwa semua itu adalah ang-gota pendukung PKI.

Penulis lain misalnya, Aminuddin Kasdi, menyatakan bahwa persoalan konflik PKI tanah air, serta berbagai aksi pergerakan yang dilakukannya sepanjang masa, idak mungkin dapat terjawab atau dapat dipahami jika hanya dengan melihat peristiwa G30S saja. Peristiwa G30S adalah se-penggal kisah nyata, yang di dalam peristiwa itu ada kabar filosofi dan cita-cita PKI, ada misi yang diemban, ada orang-orang yang terlibat, ada rapat-rapat yang dibuat sebelumnya, ada langkah-langkah rencana dan target yang telah diatur dengan rapi, dan seterusnya. Secara ideologis PKI akan bersinggungan dengan aqidah dan kaidah Islam, secara politis PKI akan berhadapan dengan pemerintah dan militer Indonesia (TNI/POLRI) dan secara sosiologis PKI berhadap-hadapan dengan sistem sosial masyarakat setempat yang telah mapan dan berakar. Semua ini berada dalam satu totalitas sistem gerakan.⁹

Segera setelah Aceh mengalami kekalahan definitif melawan tentara Marechausse dari Kolonial Belanda pada 1904, maka pembangunan ekonomi pun bisa langsung digelar. Teknologi Barat pun didatangkan, selain persenjataan modern. Kereta Api dengan relnya pun dibangun di Aceh dari Kutaradja hingga Seulimeum, pada tahun 1924. Pada tahun berikutnya dibangun jalan rel kereta api dari Kutaradja ke Sigli, dari Sigli ke Samalanga, dari Samalanga ke Bireun, dari Bireun ke Lhokseumawe, langsung terus ke

⁹ Aminuddin Kasdi, *PKI/BTI Membakar Jawa dan Madura Dengan Aksi-aksi Sepihak (1963 – 1965) dan Selogan Revolusi Belum Selesai*, Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, Jakarta, 2005. hlm. 1, dan lihat juga Singgih Tri Sulistiyono, *Peran Angkatan Darat dalam G-30-S 1965*, Lokakarya Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, Jakarta, 2005. hlm. 1 – 10.

Lhok Sukon, Panton Labu, Perlak, Langsa, Kuala Simpang dan berakhir di Besitang.¹⁰ Di setiap kota-kota yang dilewati jalur rel kereta api ini terdapat banyak stasiun (*halte*) yang merupakan pranata keramaian baru bagi masyarakat Aceh ketika itu. Kehadiran kereta api ini membawa perubahan besar terhadap Aceh. Roda-roda perekonomian berputar, pembangunan dilaksanakan di banyak tempat. Jalan-jalan darat beraspal pun mulai dibangun. Di setiap stasiun kereta api ini menjadi kantong-kantong baru para imigran dari luar Aceh yang keahliannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk memelihara dan memperbaiki lokomotif atau gerbong serta rel yang rusak.

Pembangunan rel kereta api mulai dibangun Belanda pada tahun 1901, dimaksudkan untuk melancarkan peperangan melawan gerilyawan Aceh (waktu itu disebut gerilyawan *Mujahidin*) yang sudah berserak di seluruh Aceh.¹¹ Jalur pertama dibangun adalah Kutaraja ke Seulimeum, dari Seulimeum ke Gunung Seulawah. Baru kemudian pada tahun 1904 dibangun jalur kereta api untuk “maksud damai” dari Seulawah ke Sigli. Dari Sigli disambung terus ke Samalanga. Di Samalanga inilah Belanda merasa sudah dapat menaklukkan Aceh dengan terdapatnya stasiun *Atjeh Tram*.¹² Dari Samalanga, diteruskan jalur tram ini hingga ke Bireun, Lhokseumawe, Langsa, Kuala Simpang hingga ke Besitang. Setelah itu, Belanda membangun jalan raya dari Kutaraja ke Sigli yang diresmikan tahun 1924. Efek pembangunan ini pada rakyat Aceh adalah semakin pluralnya Aceh karena banyak kaum pekerja dari Tionghoa dan etnik Minangkabau datang untuk menjadi buruh pem-

¹⁰ Amelz, *Riwayat Singkat Atjeh Bangoen Sesoedah Tidoer Njenjak Beberapa Poeloeh Tahoen Laloe*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.), hlm. 17.

¹¹ Amelz, *Ibid.*, hlm. 17.

¹² *Ibid.*

bangunan rel dan jalan raya. Belanda tidak menggunakan tenaga Aceh karena suasana *Atjeh-Moorden* yang sangat ditakuti Belanda.¹³

Para migran ini adalah pekerja-pekerja dari Minangkabau (Padang) yang memang rata-rata memiliki kemahiran teknikal di bidang perkereta-apian. Di tempat asalnya, mereka telah lebih dahulu menikmati kereta api; sedangkan Aceh karena resistensi dan meletusnya peperangan yang dahsyat, maka “pembangunan” tidak bisa dijalankan ketika itu.

A. Masuknya “Unsur-Unsur Asing” ke Aceh

Setelah Aceh kalah, Belanda berkuasa, maka yang masuk ke Aceh bukan hanya perangkat-perangkat teknologi kemajuan peradaban Barat ke Aceh, namun juga perangkat-perangkat lunak lain juga ikut masuk, berbagai macam ideologi dan agama.¹⁴ Komunisme adalah ideologi asing masuk setelah kekalahan definitif Aceh. PKI sangat giat mengganggu keguyuban Aceh yang terkenal dengan tradisi dan nilai-nilai religiositas. Masuknya Komunis ke Aceh sudah tercatat dalam *Mail Rapporten* Belanda semenjak lama. Catatan pertama tentang adanya gerakan komunis di Aceh dalam laporan Belanda tahun 1926. Gerakan komunis pertama terdapat di Gayo Luas.¹⁵ Keadaan politik di Aceh pada masa itu sudah sangat plur-

¹³ Amelz, *Riwayat Singkat Atjeh Bangoen Sesoedah Tidoer Nyenyak Beberapa Poeloeh Tahoen Jang Laloe*, naskah ketika, (Kutaradja: t.t.), hlm 6.

¹⁴ Salah satu agama yang masuk ke Aceh adalah ajaran Ahmadiyah. Lihat M. Isa Sulaiman, (et.al), *Aceh dan Belanda: Kumpulan Bibliografis*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan, 2003).

¹⁵ *Mail Rapporten* No. 829X/26, dalam M. Isa Sulaiman (et.al), *Ibid.*, hlm. 21.

al.¹⁶

Keadaan Aceh yang baru saja reda dari Perang Jihad ternyata langsung diwarnai oleh berbagai gerakan yang masuk ke wilayah ini. Yang sangat mengejutkan adalah sebuah surat laporan penguasa militer Hindia Belanda di Aceh ketika itu tentang aktivitas PKI yang sudah demikian marak di Samalanga. Dari sumber *Mail Rapporten* itu, ada sebuah laporan tentang pengasingan M. Hanafiah, seorang aktivis komunis di Samalanga.¹⁷ Artinya, pada tahun 1931, PKI sudah demikian hebat merebak di Samalanga. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa Samalanga? Mengapa bukan daerah lainnya di Aceh? Dan Mengapa juga bukan Gayo Luas?

Kata ‘pengasingan’ sendiri mengandung makna bahwa M. Hana-fiah adalah tokoh PKI yang sudah sangat meresahkan Belanda sehingga perlu diasingkan. Demikian *concern*-nya Belanda dalam hal ini —di tengah-tengah periode sulit menghadapi perang gerilya dari para pejuang perang sabil Aceh— sehingga mesti perlu membuat laporan khusus atas tindakan pengasingan M. Hanafiah tersebut ke suatu tem-pat yang tidak jelas.

Samalanga adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bireuen yang mempunyai peranan penting dalam sejarah Aceh. Pahlawan yang terkenal dari Samalanga adalah Pocut Meuligoe, perempuan asal desa Kampong Baro yang memimpin pemuda-pemuda Samalanga menggempur Belanda di Batee Iliek, yang kini menjadi sebuah objek wisata terkenal di Aceh. Setelah Teuku Umar tewas dan pas-

¹⁶ Terdapat juga surat-menyurat antara Rahmad Ali, utusan Ahmadiyah Qadian untuk Hindia Timur yang menceritakan sepak-terjang gerakan Ahmadiyah di daerah Aceh. Lihat *Mail Rapporten* No. 938X/26; juga MR. No. 872X/26; dan MR No. 899X/26. *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁷ MR No. n687 Geh/1931 dalam M. Isa Sulaiman, *Ibid.*, hlm. 23.

ukannya mulai cerai-berai, Belanda merasa bahwa mereka telah berhasil untuk me-naklukkan seluruh Aceh, padahal masih terlalu banyak daerah-daerah yang masih secara utuh dikuasai oleh pasukan gerilya Aceh, dan pasukan Belanda belum mampu untuk menjejakkan kakinya di sana. Salah satu daerah itu adalah Samalanga, di mana terdapat sebuah benteng gunung, Batee Ilieq.

Pentingnya posisi Samalanga di mata *kaphe* Hindia Belanda me-nunjukkan betapa daerah ini menjadi sasaran utama mereka. Bahkan, bagi pasukan Marsose, Samalanga tak bisa dilupakan. Lagu Mars Marsose sendiri berjudul “Samalanga”. Domine Iz Thenu mengarang lirik syair Samalanga ini, ketika para serdadu-serdadu Bumi-putera yang tergabung dalam barisan bala tentara kolonial Belanda mengadakan serangan ke Samalanga Aceh Utara pada tahun 1901.¹⁸ Lirik syair ini bersama salinan lirik Lagu Korps Marechaussee (*Marsose*) sampai de-ngan saat ini masih tersipkan dengan rapi di museum Angkatan Darat Kerajaan Belanda di Bronbeek Arnhem. Cuplikan dari sepuluh bait pertama¹⁹ dari delapan belas bait lirik syair ini adalah sebagai berikut,

*Mari sobat, mari soedara !
Pergi prang di Samalanga ;
Mari koempoel dan bersoeara,
Laloe bernjanji bersama-sama .
Satoe njanjian jang amat merdoe
Menghiboer hati jang amat doeka,*

¹⁸ Rifky Pradana, *Syair Perang*, (typescript, t.t.), hlm. 4.

¹⁹ Dicuplik dari Rifky Pradana, *Ibid*.

*Hari ini kita di Merdoe,
Esok loesa djalan kamoeka .
Dari Merdoe djalan disawa
Itoe djalan jang amat soesah,
Tempo-tempolah liwat rawa,
Asal bisa dapat kemoeka .
Kaloe djalan haroes berdiam
Karna moesoeh berdjaga-djaga,
Kaloe dengar boenji meriam
Itoe tandalah moesoeh ada .
Soenggoeh moesoeh banjak sekali,
Ada berdiri didalam benteng
Haroes kami berlari-lari
Waktoe komandolah : ‘ Attaqueeren ’ .
Djangan tinggal berdiri lama,
Kaloe komandolah : ‘ Attaqueeren ’ .
Lari lekas datang kesana,
Masoek pertama dalam benteng .
Siapa Masoek nommer satoe
Itoelah tanda amat berani,
Nanti dapatlah bintang satoe
Tanda setia lagi berani .*

*Maski dengarlah hoedjan pelor
Dari moesoehmoe orang Atjeh,
Djangan sekali bersoesah keloeh,
Tapi peranglah hidoep mati .
Mari kamoe he orang Ambon !*

*Lagi Menado lagi Ternate !
Lawan moesoeh bertamboen-tamboen,
Sampe gagahnya djadi berhenti .
Anak Ambon gagah berani
Ta takoet mati atau loeka
Toeroet hati orang serani,
Anak Ambon berani di moeka.*

Jenderal van der Heijden, yang dinobatkan menjadi Jenderal Mata Sebelah oleh orang Aceh, karena matanya buta terkena peluru pasukan santri Batu Ilieq, telah berulang-ulang tidak berhasil menaklukkan benteng tersebut. Bahkan sesudah daerah Samalanga dapat takluk kepada Belanda, tetapi benteng Batu Ilieq masih tetap berfungsi se-bagai pusat perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Saat ini Sama-langa dikenal sebagai kota santri —meski pada prakteknya tidak nampak kesantrian pada kota ini— karena banyaknya dayah/pesantren yang tumbuh berkembang di daerah ini. Di antaranya adalah Dayah MUDI Mesra yang sudah eksis sejak zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dan dipimpin pertama kali oleh Faqeh Abdul Ghani, hingga saat ini dipegang oleh seorang ulama kharismatik di Bireun, Teungku Hasanoel Bashry. Selain MUDI Mesra, banyak dayah-dayah lain yang bertebaran di Samalanga, bahkan hanya beberapa meter dari dayah tersebut berdiri sebuah dayah lain, yaitu Dayah Ummul Ayma di Samalanga yang dipimpin oleh Teungku Nuruzzahry.

B. Kereta Api (Atjeh Tram)

Daerah Aceh dikenal memiliki berbagai historis kejayaan di masa lalu. Bukan hanya dari segi perjuangan

melawan penjajahan, namun dari segi transportasi. Daerah itu pada zaman penjajahan Belanda sam-pai tahun 1970-an, pernah berjaya lintasan angkutan kereta api.²⁰ Sisa-sisa kejayaan kereta api di Aceh, diabadikan dalam bentuk monumen lokomotif uap bernomor seri BB84 yang kini masih kokoh berdiri. Lokasinya berada di sebelah kanan depan Masjid Baiturrahman Banda Aceh. Monumen lokomotif itu, termasuk di antara sejumlah benda ber-sejarah di Banda Aceh yang selamat dari amukan gelombang Tsunami. Walau tak urung terkena semburan air bah, namun karena pondasi bangunan kuat, posisinya masih tetap bertahan. Selamatnya monumen lokomotif, setidaknya masih mampu menjadikan bahan bersejarah yang dapat disaksikan generasi muda setempat. Apalagi, lintasan rel kereta api di Aceh sudah tak ada lagi, setelah dihentikan operasionalnya pertengahan tahun 1980-an lalu.

Monumen lokomotif kereta api dibangun di atas lokasi yang tadi-nya merupakan bekas Stasiun Banda Aceh. Namun setelah bertahun-tahun tak dioperasikan lagi karena tidak efisien, sisa-sisa bangunannya kini tak tampak lagi karena sudah dijadikan areal pertokoan. Saat masih aktif, rangkaian kereta api di Banda Aceh yang ada menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Walau pada umumnya jenis lokomotifnya masih bertenaga uap yang di Priangan Jabar disebut “Si Gombar”, namun pemunculan dalam lintasan hampir selalu dinanti masyarakat, terutama anak-anak. Dahulunya, lintasan kereta api yang ada di Kota Banda Aceh, mulai menyusur masuk dari Simpang Surabaya sampai kemudian pada ujungnya di Stasiun Banda Aceh dekat Masjid Baiturrahman. Sedangkan ke arah Selatan-Timur, lintasan kereta api itu menuju ke Aceh Timur sampai Medan.

²⁰ *Pikiran Rakyat*, 23 Juni 2005.

Menurut beberapa warga Banda Aceh, kereta api yang ada, menjelang tak dioperasikan lagi, lebih sering hanya melakukan perjalanan selama satu rit dengan tujuan ke Medan. Setiap keberangkatan kereta api itu, biasanya selalu disaksikan banyak masyarakat di sekitar Stasiun Banda Aceh, karena termasuk tontonan langka.

C. Kuli Kontrak Perkebunan

Sama seperti umumnya di Indonesia (dahulu Hindia Belanda), pembangunan lintasan kereta api kebanyakan diperuntukkan untuk keperluan angkutan perkebunan. Begitu pula di Aceh, jalur dari Banda Aceh menuju Medan, semuanya melalui berbagai kawasan perkebunan di Aceh Bagian Timur, seperti Kabupaten Sigli dan Aceh Timur. Di Aceh Bagian Timur sendiri, sejak zaman Belanda sampai kini masih eksis berbagai perkebunan, terutama mengusahakan tanaman karet yang kini ditambah kelapa sawit. Sebagian besar, perkebunan eks Belanda itu kini dikelola pemerintah melalui PTPN I yang berpusat di Kebun Baru, Langsa, Aceh Timur.

Jalur itu oleh pemerintahan Belanda tak disambungkan ke pelabuhan setempat di Banda Aceh. Namun saat itu lebih diutamakan ke Pelabuhan Belawan di Medan, karena di sana pusat penampungan penjualan karet untuk tujuan ke luar daerah atau luar negeri. Keberadaan lintasan kereta api saat masih berjaya di Aceh, disebut-sebut sejumlah kalangan usaha perkebunan di sana, pada zaman dahulu memang sangat terasa manfaatnya. Bukan hanya angkutan produk perkebunan, namun pula para karyawan, pimpinan, serta keluarga perkebunan, masyarakat setempat, sebagai cara utama bepergian yang dirasakan efisien.

Pensiunan *sinder* Kebun Julu Rayeu PT Perkebunan I, Iskandar Zulkarnaen, menyebutkan, sampai pertengahan

tahun 1970-an, rangkaian kereta api di Aceh memang menjadi tulang punggung angkutan produk dan karyawan perkebunan. Apalagi, jalan trans Sumatra Timur belum selebar dan semulus sekarang. "Seingat kami waktu itu, pengangkutan produk perkebunan dilakukan pula untuk lateks dari kebun ke pabrik, untuk jam-jam tertentu. Ini disebabkan, saat itu sejumlah kebun masih belum optimal atau belum ada pabrik pengolahan, sehingga harus diproduksi pada perkebunan lain," katanya. Karena jalan aspal kondisinya masih banyak yang jelek, maka penyadapan getah dan pengangkutan banyak diakali untuk disesuaikan dengan jadwal tiba kereta dari Banda Aceh. Biasanya, jadwal sekira pukul 9.00 WIB, seperti zaman Belanda, di mana pada waktu itu jam-jam yang optimal untuk pengangkutan lateks ke pabrik.

Karena lokomotif dan jalur kereta apinya hanya yang itu-itu juga, menurutnya, saat itu angkutan lateks umumnya selamat sampai ke pabrik tujuan. Pernah dicoba melalui angkutan truk, namun karena jalan jelek, tak jarang selip di jalan sehingga lateks keburu menggumpal sebelum masuk ke pabrik. Begitu pula saat tahun 1960-an, perkebunan pemerintah di Aceh masih bernama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Kesatuan Aceh, para pimpinan pun sering memanfaatkan kereta api untuk menuju ke Banda Aceh. Pasalnya, saat itu kantor pusatnya masih di Kutaraja, Banda Aceh. "Dengan menggunakan kereta api, dari Langsa sampai Banda Aceh, saat itu memakan waktu sehari-semalam. Kalau nekad menggunakan kendaraan mobil, selain lebih lama juga risiko dicegat gerombolan pemberontak waktu itu," kenang Iskandar.

Namun seiring perkembangan zaman, sama pula dengan di Pulau Jawa, menyusul pudarnya masa kejayaan usaha perkebunan, begitu pula di Aceh, peran kereta api

mulai berkurang. Apalagi, belakangan saingan kendaraan mobil yang waktu tempuhnya lebih cepat, karena kondisi jalan yang semakin baik dan dilebarkan. Begitu pula nasib jalan rel kereta api di lintasan Sumatra, untuk di Banda Aceh boleh dikatakan sudah tak terlihat lagi bekas relnya. Kondisinya sama dengan di sekitar lintasan Kadipaten-Cirebon di Jabar, selain sudah tertutupi aspal atau bangunan, ada yang dicabut untuk dijual sebagai besi tua. Sejumlah warga Banda Aceh menuturkan, pada sekira tahun 1999 lalu, sempat tersiar kabar bahwa bekas lintasan kereta api di Banda Aceh sempat akan dibangun lagi. Bahkan, sejumlah tenaga ahli asing konon sudah melakukan penjajakan dan pengecekan lokasi.

Namun seiring pergantian pemerintahan, rencana itu kemudian tak jelas lagi. Ini bukan hanya terjadi di Aceh, namun pula dikabarkan terjadi di Pulau Jawa pada sejumlah bekas lintasan kereta api yang ada. Jadinya, zaman keemasan dan keberadaan kereta api di Aceh, kini hanya dapat disaksikan lewat monumen. Entah kapan, rangkaian kereta api di sana akan kembali aktif.

D. Masuknya SI (Sarekat Islam) ke Aceh

Pada tahun 1920-an, Sarekat Islam (SI) sudah hadir di Aceh. SI men-dapati Aceh sebagai tempat yang subur untuk perkembangan pergerakan tersebut, karena sebagian besar *dayah* dan *ranggang-ranggang* di Aceh menerima ide-ide radikal yang menjadi ciri khas SI.²¹ Dan ketika para ulama Aceh berkumpul di suatu tempat persembunyian menggelar Mukhtar Gerilya di tengah

²¹ Ali Hasjmy, *Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980), hlm. 11.

rimba pedalaman Aceh,²² yang kemudian menghasilkan dua hal penting, yaitu “politik perang baru” dan menerima SI dari HOS Tjokroaminoto sebagai organisasi politik Islam modern untuk memenuhi strategi “politik perang baru”. Keputusan Mukhtar gerilya ini, pada tahun 1913, membuat para ulama dayah dan rangkang merasa perlu mempersiapkan pendirian cabang organisasi ini di Aceh.

Dipilihlah Kutaradja sebagai tempat berdirinya SI di Aceh. Pada tahun 1914, berdirilah SI dengan Presidennya Teungku Abdul Manaf dan Wakil Presiden Marah Hoesin Gelar Mangaraja Tagor.²³ Masih dalam tahun 1914, maka lahirlah organisasi-organisasi cabang dan ranting SI ini di seluruh Aceh. Para ulama dan uleebalang bersatu padu untuk mengembangkan organisasi ini di seluruh Aceh. Para uleebalang yang mendukung SI adalah uleebalang yang tidak mau bekerja-sama dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.²⁴ Teuku Raja Bujang dan Imuem Gam adalah beberapa di antara banyak uleebalang yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda, dan sebaliknya malah memilih bekerja sama dengan para ulama sebagai ujung tombak pergerakan anti-Belanda.

E. PKI Masuk ke Aceh Melalui SI

Ideologi PKI merambah ke Aceh melalui sebuah cara yang tidak elegan dengan menggunakan organisasi lain yang sesungguhnya bertentangan secara ideologis. PKI hadir melalui proses panjang yang dimulai dari perpecahan SI Putih dan SI Merah di Jawa. Maka, perpecahan ini kemudian diperpanjang oleh PKI sebagai alat untuk meluaskan ekstensi politik ke seluruh Indonesia,

²² *Ibid.*, hlm. 16.

²³ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

khususnya ke Aceh. Pada tahun 1927 Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah berkembang di Samalanga, oleh sebab itu banyak pemuda-pemuda Samalanga masuk anggota PKI antara lain termasuk seorang putra dari Tgk. Haji Malem seorang Ulama Besar di Tanjongan Barat bernama Tgk. Abdoel Hamid.²⁵ Namun, PKI yang berkembang di Aceh ketika itu bukanlah PKI beraliran atheis, melainkan PKI yang merupakan pecahan dari organisasi Islam terbesar, yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam adalah organisasi kaum nasionalis Islam yang paling ditakuti Belanda karena sikap dan pendirian ideologisnya yang konsisten. SI didirikan oleh Hadji Oemar Said Tjokroaminoto atau sering disingkat dengan nama HOS Tjokroaminoto. SI terpecah menjadi dua, SI putih dan SI merah. SI merah lah yang kemudian diboncengi oleh PKI sehingga mereka mendapatkan pendukung dari kalangan Islam. Hadji Misbach adalah kiyai komunis yang terkenal di Jawa Tengah yang memasuki organisasi PKI karena partai ini menganut ideologi pergerakan nasionalis yang kuat dan radikal.

Dampak masuknya Tgk. Abdoel Hamid menjadi anggota PKI mem-buat kolonial Belanda hendak menangkapnya. Pada tahun itu (1927) Teuku Tjhik Moehammad Ali Basjah, *Zelfbestuurder* Samalanga, ber-henti dari jabatannya diganti oleh puteranya T. Moehammad menjadi *Uleebalang* Samalanga. Sikap berani mempertaruhkan jabatan yang se-cara tradisional selalu diberikan kepada para bangsawan oleh Belanda ini menunjukkan bahwa Teuku Tjhik Muhammad Ali lebih nasionalis dan menjadi PKI ketika itu adalah sebuah sikap nasionalisme. PKI ketika itu bahkan mampu mengadaptasikan dirinya menjadi organisasi yang akrab dengan Islam, selain dekat dengan kaum nasionalis.

²⁵ Amelz, *Riwajat Singkat Atjeh Bangoen Dari Tidoer Njenjak Beberapa Poeloh Tahoen Jang Laloe*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.), hlm 7.

Kedekatan-nya dengan Islam ini membuktikan bahwa PKI yang berkembang di Aceh adalah PKI yang sudah terislamkan. Sehingga tidaklah menghe-rankan mengapa uleebalang bekerjasama sangat erat dengan kaum ulama dalam urusan nasionalisme, untuk memerdekakan diri dari pen-jajah. T. Tjhik Moehammad Ali Basjah bermaksud untuk pergi me-nunaikan rukun Islam ke lima ke Tanah Suci Makkah, haji, bersama dengan 40 orang pengiringnya. Oleh sebab itu maka T. Tjhik Moehammad Ali Basjah men-charter kapal K.P.M. (*Koningkelijke Pakkat Vaar Maataschappij*) dan sudah berlabuh di Kuala Samalanga.²⁶

T. Tjhik Moehammad Ali Basjah mengetahui bahwa Tgk. Abdoel Hamid mau ditangkap oleh Pemerintah Belanda karena masuk PKI maka dipanggilnya Tgk. Abdoel Hamid. PKI adalah organisasi terlarang di Hindia Belanda dan dianggap sebagai organisasi yang berbahaya karena bisa membangkitkan kesadaran nasionalisme rakyat untuk menghadapi penjajahan Belanda. Sesudah Tgk.Abdoel Hamid tiba, T. Tjhik Moehammad Ali Basjah mengatakan, bahwa Tengku akan ditangkap oleh Pemerintah Belanda karena Tengku sudah menjadi anggota PKI Untuk menghindari supaya Tengku tidak ditangkap oleh Pemerintah Belanda ada lebih baik Tengku berangkat dengan saya ke Mekkah untuk menunaikan Rukun Islam yang Kelima, yang disertai juga oleh 40 orang yang sudah siap-siap untuk berangkat. "Kapal K.P.M. (*Koningkelijke Pakkat Vaar Maataschappij*) sudah saya charter dan sedang berlabuh ke Kuala Samalanga. Kalau Tengku setuju harus bersiap-siap dari sekarang karena besok pagi kita berangkat." Anjuran Teuku Tjhik Moehammad Ali Basjah diterima baik oleh Tgk. Abdoel Hamid dan besoknya terus berangkat bersama dengan rombongan 40 orang itu

²⁶ Amelz, *Ibid.*

menuju ke jazirah Arab.²⁷

Sesudah menunaikan Rukun Islam ke Lima, Tgk. Abdoel Hamid tidak pulang bersama T. Tjhik Moehammad Ali Basjah, hanya tinggal di Makkah menjadi penampung jama'ah haji yang baru datang dari Aceh. Dengan sebab itu ia bergelar Tgk. Sjech Abdoel Hamid. Selama di Makkah Tgk. Abdoel Hamid memperhatikan perkembangan-perkem-bangan dan kemajuan ulama-ulama di Makkah. Berhubung dengan itu ia mengirim surat ke Aceh dialamatkan kepada Tgk. Hadji Abdoellah Oedjong Rimba, meminta supaya ulama-ulama di Aceh mengubah cara bergerak untuk mencapai kemajuan, tidak lagi sebagai keadaan sekarang. Sesudah surat diterima dan diperhatikan oleh T. Hadji Abdoellah Oedjong Rimba dibawa ke Garot untuk diperlihatkan kepada Tgk. Yan Garot yaitu Tgk. Moehammad Amin seorang ulama tua yang berpengaruh di daerah Pidie.

Tgk. Yan memperhatikan isi dan maksud surat tersebut tak ada sambutanya, karena bersamaan dengan rencana kaum Komunis.²⁸ Karena surat itu tak ada sambutan dari Tgk. Yan Garot, Maka Tgk. Moehammad Dawoed Beureu-eh meminta surat itu dari Tgk. H. Abdoellah Oedjong Rimba. Sesudah diperhatikan dan ditelaah, Tgk. Moehammad Dawoed Beureu-eh bermaksud akan membawa surat itu untuk diperlihatkan kepada Tgk. Hoesin Poelo Pandjoe, seorang ulama yang berpengaruh di daerah Poelo Pandjoe. Tgk. Moehammad Dawoed Beureu-eh mengirim utusan untuk menjumpai Tgk. Hoesin Poelo Pandjoe Landjoe sambil mengirim pesan, bahwa beliau akan berbuka puasa di Masjid Poelo Pandjou, dengan sebab itu beliau miminta

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Amelz, *Ibid.*

supaya segala Ulama-ulama di daerah Poelo Panjdjoe turut berbuka puasa di Masjid Poelo Pandjoe karena pada hari tersebut adalah tanggal 1 bulan Ramadhan tahun itu.

Tgk. Moehammad Dawoed Beureu-eh berangkat ke Poelo Pandjoe berbuka puasa dengan ulama-ulama yang hadir. Sesudah shalat tara-wih, surat yang dikirim Tgk. Abdoel Hamid di Mekkah diperlihatkan kepada ulama-ulama tersebut. Sesudah dibaca dan diperhatikan isi dan maksud surat tersebut, ulama yang hadir menerima baik dan men-jujung gagasan yang dikemukakan oleh Tgk. Abdoel Hamid. Besoknya surat itu dibawa kembali oleh Tgk. Moehammad Dawoed Beureu-eh diserahkan kepada Tgk. Yan Garot, sambil memberi penjelasan-penjelasan dari Ulama-Ulama di Poelo Pandjoe sangat setuju sebagai yang dimaksud dan yang dikehendaki oleh Tgk. Abdoel Hamid.

Beberapa orang *uleebalang* sudah mengetahui dan sudah mem-beri persetujuannya, terutama: T. Pakeh Mahmoed; T. Bentara Pineueng; T. Moeda Dalam; T. Ahmad Aree; T. Tjhik Peusangan. Wakil-wakil Tuanku Raja Keumala yang dikirim untuk menyertai permusya-waratan itu terdiri dari: Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri; Tgk. Sjech Ibrahim; dan lain-lain. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, seluruh Ulama-Ulama yang dihubungi dan diundang turut hadir semua. Dalam musyawarah itu surat yang dikirim oleh Tgk. Abdoel Hamid di Makkah dirumuskan bersama-sama. Semua memberi pendapat dan menyetujui apa yang dianjurkan oleh Teungku Sjech Abdoel Hamid.***



34 *Pembantaian PKI: Analisis Sosial-Politik Konflik Horizontal di Aceh, 1965-1967*

Bab III

SUASANA ACEH AWAL 1960-AN

Bersama dengan situasi politik yang tidak menentu setelah Indonesia merdeka karena aksi Belanda untuk ingin kembali menjajah Indonesia, terjadi beberapa fenomena gerakan pemberontakan di beberapa daerah. Berbagai pergolakan atau pemberontakan yang terjadi di negara Republik Indonesia pada umumnya terjadi karena ketidakpuasan pada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara pusat dan daerah yang cukup mencolok. Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) misalnya. Semula, gerakan itu tidak tampak berniat ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi, pemberontakan itu akhirnya dikenal sebagai "gerakan anti-Jawa", karena kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa dianggap semakin besar.

Sejak kemerdekaan diproklamasikan 1945, beberapa gerakan atau pemberontakan demi memisahkan diri dari negara kesatuan, terjadi di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Indonesia Bagian Timur.

Gerakan di Aceh diawali oleh kekecewaan dan keresahan. Setelah likuidasi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Agustus 1950, daerah itu begitu saja dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, mantan Gubernur Militer, Teungku Daud Beureueh, yang sangat berpengaruh di Aceh, tidak diberi jabatan berarti. Tampaknya, pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat kurang didasari kepekaan terhadap perasaan rakyat Aceh. Apalagi ada kebanggaan tersendiri pada masyarakat Aceh, melihat wilayah Serambi Mekah itu suatu bagian republik yang tidak pernah dimasuki penjajah Belanda. Gerakan di Aceh yang dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan gerakan yang cukup alot. Meskipun pemerintah terus berusaha menyelesaikan masalah GAM ke meja perundingan, namun tidak pernah berhasil.

Terakhir, proses penyelesaian konflik di Aceh dengan jalan damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan GAM berlangsung di Tokyo.. Hasilnya, gagal. Maka secara resmi pemerintah Indonesia memberlakukan Keputusan Pemerintah (Keppres) Nomor 28 Tahun 2003, yang menetapkan seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam keadaan bahaya dengan status Darurat Militer. Keputusan pemerintahan Presiden Megawati itu merupakan keputusan tegas, dalam upaya agar Aceh tetap berada dalam bingkai negara kesatuan RI.

Keputusan yang sama diambil Presiden Sukarno dalam menghadapi pemberontakan PRRI/Permesta pada 16 Febru-

ari 1958. Ketika Sukarno kembali dari luar negeri menegaskan, PRRI/Permesta harus dihadapi dengan kekerasan senjata. Pemerintahan Megawati mengerahkan sekitar 28.000 personel TNI dan Polri ke Aceh untuk melancarkan operasi terpadu yang meliputi operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, operasi pemulihan pemerintahan, dan operasi pemulihan keamanan.

Seorang bekas pemimpin gerilya kemudian diangkat menjadi pimpinan tertinggi di Aceh, yaitu Sjamaun Gaharu, panglima Tentara Republik di Aceh untuk masa singkat selama revolusi dan salah seorang penandatanganan ultimatum terhadap *uleebalang* di Lammeulo (sebelum jabatannya direbut Amir Husin al Mudjahid).

Berdasarkan keterangannya sendiri Sjamaun Gaharu mendapat pengangkatannya berkat dukungan yang diterimanya dari Nasution akan gagasannya untuk mengakhiri pemberontakan di Aceh. Sering kali ia bertemu dengan Nasution dalam masa antara 1952 dan 1955, ketika Nasution dibebaskan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, untuk memberikan keterangan bagi buku-buku yang tengah ditulisnya tentang revolusi Indonesia dan tentang perang gerilya pada umumnya. Selama wawancara-wawancara ini Sjamaun Gaharu berangsur-angsur mengungkapkan pandangannya tentang cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh. Intisari teori ini adalah, situasi Aceh berbeda dengan di tempat lain dan rumit sekali, dan persoalan ini paling baik diselesaikan orang Aceh sendiri dengan cara Aceh. Wakil Presiden juga tertarik akan gagasan Sjammaun Gaharu tentang masalah ini dan meminta dia menuliskannya. Pada Oktober 1955 ia menyampaikan hasilnya kepada Hatta, dan ketika beberapa hari kemudian Nasution diangkat kembali menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, ia pun mengirimkan sebuah

salinan kepada Nasution.

Nasution kemudian menyambutnya dengan menawarkan kepada-nya jabatan pimpinan militer Aceh. Pada mulanya Sjammaun Gaharu bermaksud menolak tawaran ini, karena dia merasa, pandangannya tidak sesuai dengan kebijaksanaan panglima Sumatera Utara, Maludin Simbolon. Tetapi dengan janji Nasution bahwa Maludin Simbolon akan dipindahkan dalam waktu dekat, ia menerima kedudukan ini. Kesempatan untuk melaksanakan gagasannya dalam praktek diperolehnya ketika pada akhir 1956 Maludin Simbolon—yang merupakan saingan utama Nasution untuk jabatan kepala staf—dalam upaya mencegah kepindahannya memutuskan hubungan Komando Tentara Teritorium Sumatera Utara dengan Pimpinan Angkatan Darat. Segera Sjammaun Gaharu menjauhkan diri dari Maludin Simbolon dan tetap berhu-bungan erat dengan Nasution.²⁹

Sekarang Sjammaun Gaharu bebas melaksanakan rencananya. Bersama dengan gubernur yang baru diangkat, A. Hasjmy, dan dengan sokongan tegas Nasution, ia menempuh politik kebijaksanaan perukunan. Pada pertengahan April 1957, pertengahan puasa, diadakan perundingan dengan sejumlah pemimpin *Darul Islam* terkemuka di Lamteh, sebuah desa beberapa kilometer dari Aceh. Pembicaraan men-capai puncaknya dalam Ikrar Lamteh yang di dalamnya keduanya ber-janji masing-masing untuk memajukan Islam, mendorong pembangunan Aceh dalam arti kata yang seluas-luasnya, dan berusaha mendatangkan kemakmuran dan keamanan kepada rakyat dan masyarakat Aceh. Di pihak Republik piagam itu ditandatangani Sjammaun Gaharu dan kepala stafnya, Teuku Hamzah, Hasjmy, dan Kepala Polisi untuk Aceh, M. Insja. Pemimpin-

²⁹ (Gaharu 1958:40-43).

pemimpin *Darul Islam* yang menandatanganinya adalah Hasan Aly, Hasan Saleh, dan Ishak Amin (Bupati Aceh Besar). Kemudian, disertai A. Hasjmy, dan M. Insja, Sjammaun Gaharu juga menjumpai Daud Beureueh, yang pada waktu itu masih tidak ingin mendengarkan penyelesaian.³⁰

Sesuai dengan kebijaksanaannya, yang dinamakannya Konsepsi prinsipiell dan bijaksana, Sjammaun Gaharu bersama dengan Ali Hasjmy melanjutkan usaha-usahanya mencari penyelesaian. Keduanya tetap berhubungan dengan pemimpin-pemimpin *Darul Islam* dan mengunjungi Jakarta berkali-kali untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat melangkah dalam perundingan mereka dengan kaum pemberontak. Pada September 1957 Perdana Menteri Djuanda me-ngatakan kepada mereka, mereka boleh memberikan konsep otonomi daerah penafsiran yang seluas mungkin, bahkan sampai kepada pengertian bahwa Aceh diperlakukan sebagai negara tersendiri, asal saja mereka tetap dalam batas-batas UUDS Indonesia yang masih mengakui suatu republik kesatuan.³¹

Tetapi tak tercapai penyelesaian pada waktu itu. Sebagiannya ini adalah disebabkan kenyataan bahwa pemberontakan PRRI-Permesta menarik perhatian, dan sebagiannya karena adanya dalam Negara Islam Aceh suatu faksi yang amat kuat, yang dipimpin Daud Beureueh, yang tidak ingin mendengarkan kompromi apa pun juga dan berpegang pada prinsip perundingan resmi antara Negara Islam Aceh dan Republik Indonesia.

Hal ini terjadi pada Maret 1959, ketika, dengan menuh Daud Beureueh bertindak sewenang-wenang, Hasan Saleh dan pendukung-pendukungnya menggulingkannya. Mereka membentuk pemerintah mereka sendiri pada suatu

³⁰ (Abdul Murat Mat Jan 1976:40-41; DM 23-3:1959)

³¹ (Hasjmy 1958:57-58)

pertemuan di Pidie yang dihadiri kira-kira seribu orang pada 15 Maret, mereka yang berlainan pendapat ini menamakan dirinya Gerakan Revolusioner Islam Indonesia, kemudian membentuk Dewan Revolusi (Negara Bagian Aceh). Ketuanya adalah Abdul Gani Usman, dan wakil ketuanya adalah Hasan Saleh, dengan Abdul Gani Mutiara sebagai sekretaris umum dan kepala Bagian Penerangan. Sebagai anggota termasuk pemimpin-pemimpin *Darul Islam* terkemuka seperti Amir Husin al Mudjahid, T.A. Hasan, Ibrahim Saleh, T.M. Amin, dan Husin Jusuf.

Langkah pertama Abdul Gani Usman dalam kedudukannya sebagai ketua Dewan Revolusi adalah membuat pengumuman yang menyatakan, jabatan kepala negara untuk sementara dilaksanakan Dewan Pertimbangan Revolusi, yang diketuai Amir Husin al Mudjahid. Pada waktu yang bersamaan ia memerintahkan para pengikutnya menghentikan pemungutan pajak di desa-desa, disertai ancaman terhadap siapa saja yang masih terus melakukannya. Mengenai Tentara Islam, Hasan Saleh membatasi gerak para prajurit Divisi Tengku Chik Ditiro dalam asrama mereka, dengan menarik mereka dari desa-desa tempat mereka ditempatkan. Selanjutnya ia mengumumkan, Dewan Revolusi akan mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk membicarakan berakhirnya pemberontakan dengan para penguasa Republik. Pada bulan-bulan berikutnya Dewan Revolusi diikuti pasukan dari Aceh Barat yang dipimpin T.R. Idris dan Komandan Resimen VII Sumatera Timur, Haji Hasanuddin.³² Pada Agustus, Abdul Gani Mutiara menyatakan Dewan revolusi didukung 25.000 anggota *Darul Islam*.³³

³² Kedudukan Haji Hasanuddin sebagai komandan Resimen Sumatera Timur diambil alih Teuku Saat; tetapi kebanyakan prajurit mengikuti Hasanuddin (DM 7-8-1959).

³³ (D.M 18-3-1959, 23-3-1959, 28-3-1959, 25-5-1959, 6-8-1959, 7-8-1959,

Perkembangan-perkembangan ini memulai serangkaian perundingan baru. Pada awal Mei Sjammaun Gaharu dan A. Hasjmy bertolak lagi ke Jakarta, kali ini atas undangan Perdana Menteri Djuanda. Mereka menjelaskan situasi yang baru kepada Kabinet dan kepada Presiden Soekarno serta memberikan sejumlah anjuran tentang langkah-langkah yang harus diambil sehubungan dengan ini. Kemudian Juanda mengeluarkan keputusan yang menyatakan, sejak 26 Mei Provinsi Aceh dapat menamakan dirinya Daerah Istimewa Aceh.³⁴ Ini menempatkan Aceh dalam kedudukan yang agak khas, karena dari provinsi-provinsi yang lain hanyalah ibukota, Jakarta, dan Yogyakarta yang memiliki status istimewa. Kepada Aceh selanjutnya dijanjikan otonomi yang seluas mungkin, terutama dalam bidang agama, pendidikan dan hukum adat, tetapi dengan ketentuan, seperti dinyatakan Djuanda dalam keputusannya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada waktu yang sama Pemerintah Pusat mengirimkan sebuah misi ke Aceh untuk berunding dengan Dewan Revolusi. Misi ini dipimpin Wakil Perdana Menteri Pertama Hardi, dan di dalamnya termasuk Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Gatot Subroto dan Menteri Kestabilan Ekonomi tanpa Portfolio, Kolonel Suprajogi. Dua hari kemudian, 26 Mei 1959, sesudah melalui usaha A. Hasjmy dan Letnan Kolonel T. Hamzah menembus jalan buntu, tercapai persetujuan sementara dengan pemimpin-pemimpin Dewan Revolusi yang menerima usul-usul Pemerintah Pusat. Secara tertulis mereka sendiri berjanji kembali ke dalam haribaan Republik dan mengucapkan sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar.

Sifat yang sebenar-benarnya dari kompromi itu tetap

25-8-1959)

³⁴ (Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia no. 1/Miss8 1959)

samar-samar. Seperti telah ditetapkan Djuanda sebelumnya, otonomi janganlah di-tafsirkan sedemikian rupa hingga setiap ketentuan baru yang diadakan akan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hardi menambahkan di Banda Aceh, masalah apakah masyarakat Islam di Aceh dapat dipaksakan melaksanakan syariat Islam atau tidak, merupakan persoalan yang akan diputuskan Konstituante, yang ketika itu sedang membicarakan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Ia menghubungkan hal ini dengan Piagam Jakarta, yang kini kembali menjadi masalah yang hangat diperdebatkan dalam Konstituante di Jakarta. Seperti ternyata, kaum politisi Islam tidak cukup kuat untuk meluluskannya kali ini. Satu-satunya hasil yang mereka peroleh ialah diakuinya oleh Soekarno dalam Dekrit yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Piagam Jakarta telah mengilhami Undang-Undang Dasar ini dan merupakan kesatuan dengannya.³⁵

Selanjutnya disetujui secara prinsip, sebagian prajurit Tentara Islam, setelah melalui *screening* wajib, akan dijadikan wajib militer darurat. Kemudian, pada 1 Oktober disetujui akan dibentuk Divisi Tengku Chik Ditiro sebagai bagian khusus dari Divisi Tentara di Aceh. Pegawai-pegawai negeri

³⁵ Kekaburan kompromi ini menimbulkan beberapa masalah pada 1962. Pada akhir tahun itu tersiar berita, Angkatan Darat Pusat menentang (diberlakukannya hukum Islam di Aceh. Berita ini dibantah juru bicara Tentara. Ia membacakan sebuah pernyataan yang pokoknya berisi 1) hukum Islam tidaklah a priori ditolak, karena itu juga tidak di Aceh; 2) dapat dibuat hukum bagi masyarakat Islam yang mungkin di sesuaikan dengan hukum Islam; dan 3) Pemerintah Daerah Aceh, sesuai dengan keterangan misi Hardi, boleh mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hukum Islam, asal saja ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kebijaksanaan negara, kepentingan umum, atau peraturan hukum tingkat yang lebih tinggi. Dalam pembicaraan turut serta Menteri Agama, yang menyatakan dirinya yakin Angkatan Darat Pusat mengakui dan karena itu tidak menolak prinsip hukum Islam di Aceh (Boland 171: 90-100).

Darul Islam yang mengikuti Dewan Revolusi mendapat perlakuan yang sedikit banyaknya sama. Usaha yang menyatakan bahwa di mana mungkin mereka akan diintegrasikan ke dalam Pemerintahan Republik dikukuhkan para penguasa militer pusat pada akhir Oktober. Ini berarti memberikan kuasa kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk mengangkat bekas pemberontak yang telah menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan sipil.³⁶

Persetujuan Mei secara resmi diterima para pendukung Dewan Revolusi pada suatu konperensi besar yang diadakan dalam minggu pertama November. Pada akhir bulan itu Nasution bertolak ke Pidie. Di sini ia menerima pemberian hormat lima ribu pendukung Dewan Revolusi.³⁷

Sementara masalah-masalah yang terjadi di Aceh belum selesai, PKI mulai menyusup dalam lembaga pemerintahan tingkat propinsi. A. Karim AS selaku pimpinan PKI Sumatera Utara sangat sering datang ke Aceh. Ia melakukan berbagai rapat dan pertemuan-pertemuan terbatas, termasuk dengan berbagai politisi dan tokoh-tokoh lainnya di Aceh, di antaranya termasuk Thaib Adamy. Thaib Adamy adalah salah satu tokoh PKI yang terlibat dalam peristiwa revolusi sosial yang terjadi di Aceh pada tahun 1956 yang dikenal dengan peristiwa “Cumbok”..

Pada masa Pemilu 1955, walaupun secara nasional PKI telah ber-hasil nyata mencapai empat besar dalam Pemilu,

³⁶ Ini berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat no.010541959 31 Oktober 1959. Indonesia berada dalam keadaan perang dari Maret 1957 sampai Maret 1962. Selama masa ini terdapat Penguasa Perang Pusat (Peperpups dan di provinsi-provinsi Penguasa Perang Daerah (Peperda). Di Aceh yang menjadi ketua Peperda adalah panglima militer, Sjammaun Gaharu, dan wakil ketua gubernur A. Hasjmy.

³⁷ (Abdul Murat Mat Jan 1976: 43; DM 28-5-1959, 25-11-1959, 26-11-1959, 27-11-1959, 1-12-1959)

tetapi keadaannya di Aceh belum begitu muncul ke permukaan. Gerakan dan aktivitas PKI di Aceh baru diketahui secara terang-terangan pada tahun 1963, ketika Thaib Adamy mulai melakukan gerakan propaganda, kampanye dan mempengaruhi massa untuk mendukung PKI yang dipimpinnya. Thaib Adamy adalah kader PKI yang dianggap tangguh dan militan pada masa itu. Jabatannya selaku wakil Sekretaris Komite Central PKI, di samping itu ia juga berkedudukan sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Aceh mewakili Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh.

Banyak kaum muda yang tergiur dengan slogan-slogan revolusi-oner yang disuarakan oleh PKI waktu itu. Slogan yang dihembus terutama dalam rangka persiapan menghadapi agresi Belanda atau penjajahan asing sangat digemari oleh kalangan masyarakat Aceh yang telah lama memendam kebencian terhadap segala bentuk penjajahan dan mereka siap memberontak terhadap siapa saja yang hendak menguasai tanah airnya. Pada saat itu kegiatan yang dilakukan PKI sah-sah saja, karena PKI belum dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia, termasuk di Aceh. Dengan demikian seluruh usaha dan kegiatan PKI, membuat rapat-rapat dengan *onderbouw-onderbouw*-nya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sentral Organisasi Buruh seluruh Indonesia (SOBSI) serta anggota-anggota mereka yang bekerja sebagai buruh dan kuli di perkebunan dan pertambangan di Aceh dapat berjalan lancar dianggap legal.

Sikap anti penjajahan dan anti penindasan yang selama ini menjadi slogan dan doktrin PKI ditujukan untuk persiapan melawan Belanda di Aceh, secara kebetulan bertemu dengan realita sosial yang realtif timpang antara kaum Uleebalang, ulama dan rakyat bisa dalam sistem sosial masyarakat Aceh. Oleh karenanya tatkala Tengku A. Husein Al. Mudjahid dengan pasukan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR)

melakukan aksi protes dan menurunkan kaum bangsawan (Ulee-balang) dari tahta kekuasaannya pada bulan Februari-Maret 1956, yang kemudian dikenal dengan istilah “Peristiwa Cumbok” atau “Revolusi sosial”, disebut-sebut bahwa dua orang tokoh PKI terlibat di dalamnya yaitu Nathar Zainudin dan Thaib Adamy. Dalam pandangan mereka peristiwa Cumbok adalah sebuah gerakan pembebasan dalam rangka membebaskan rakyat dari segala bentuk kesewenang-wenangan kaum borjuis atau kaum ningrat di Aceh.

Sulit dipahami, apakah peristiwa Cumbok adalah murni sebagai aksi yang dilakukan oleh kaum pembebasan dengan tentara perjuangan rakyat (TPR) untuk melakukan koreksi total terhadap kekuasaan Uleebalang yang dianggap mewah sejak zaman penjajahan Belanda, atau ada intervensi dari PKI. Dalam perjalanan selanjutnya setelah peristiwa Cumbok, banyak dijumpai konflik-konflik yang relatif tajam antara PKI dengan tokoh-tokoh pemimpin Aceh, terutama dengan para penguasa. Keadaan ini menggambarkan peta hubungan PKI dengan berbagai elemen masyarakat Aceh selamanya harmonis³⁸.

Konflik yang cukup seru antara aktivis komunis dengan pihak penguasa Aceh terjadi pada masalah perebutan ladang minyak dan lahan perkebunan di Aceh Timur. Masing-masing pihak bersikeras untuk mempertahankan hak dan menguasainya yang kemudian melahirkan pemberontakan komunis terhadap pemerintah daerah pada bulan Mei 1949 yang dikenal dengan istilah “*Langsa Affair*” Konflik lain ketika terjadi rencana peleburan propinsi Aceh ke dalam Propinsi Sumatera Utara, di aman PKI waktu itu nyata-nyata menolak rencana Aceh untuk menjadi propinsi yang berdiri sendiri dan terlepas dari Sumatera Utara. Ketika masaah

³⁸ Ramadhan KH dan Hamid Djabbar, *Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm 243-244.

otonomi Aceh diperdebatkan tahun 1950-1953, tokoh-tokoh PKI bergabung dengan kekuatan luar agar Aceh menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini PKI selalu melihat dari sisi keuntungan politik yang lebih banyak dan lebih diuntungkan bagi perkembangan ide-ologinya jika Aceh hanya berstatus residen dalam wilayah propinsi Sumatera Utara. Perdebatan masalah ini telah mengundang lahirnya pemberontakan baru di Aceh yang dikenal dengan sebutan “Gerakan Darul Islam/tentara Islam Indonesia” yang dipimpin oleh Daud Beureuh.

Puncak dari aksi menghalang-halangi dan rasa ketidakpuasan PKI terhadap pemerintah dan rakyat Aceh dapat disimak dalam pidato Thaib Adamy tanggal 3 Maret 1963 di kota Sigli yang dide-ngarkan ribuan mass yang hadir. Isi pidato tersebut mengantarkan-nya ke meja pengadilan, di antaranya dapat dikutip sebagai berikut,

Tajak bak geusyik lagee boh piki hana sagoe
Tajak bak mukim lagee being hana rampage
Tajak bak aswed lagee langet hana uroe
Tajak bak wedaan lagee time hana taloe
Tajak bak bupati lagee jeungki hana sujoe
Tajak bak polisi lagee keudidi keunong taloe
Tajak bak tentara lagee nuga kayee jatoe
Tajak bak gubernur lagee cinue hana garoe
Tajak bak menteri lagee gusi hana gigoe

Artinya sebagai berikut,

Pergi mengadu kepada Kapala desa bagaikan gambas tak tak bersegi

*Pergi mengadu kepada Kepala Mukim seperti kepiting tak
punya penjepit*

*Pergi mengadu kepada Asisten wedana sama halnya se-
perti langit tak bermatahari*

*Pergi mengadu kepada Bupati sama seperti penumpuk
padi tak berbaji*

*Pergi mengadu kepada Polisi sama halnya seperti burung
kedidi terjerat tali*

*Pergi mengadu kepada tentara sama halnya dengan pen-
tungan kayu*

*Pergi mengadu kepada Gubernur sama halnya seperti
gayung tanpa gagangnya*

*Pergi mengadu kepada menteri sama saja, seperti gusi tak
punya gigi (ompong)*

Di depan pengadilan, Thaib Adamy menyebutkan bahwa apa yang diucapkannya merupakan “Sajak Rakyat Aceh zaman Dahulu Kala”. Walau dianggap mengada-ada dan dianggap menyebarkan khabar bohong, namu kata-kata ini sempat populer dan tersebar luas dalam masyarakat, terutama di kalangan aktivis politik.

Makna dan substansi dari setiap kata tersebut adalah mencer-minkan suatu keadaan di mana masing-masing pejabat pemerintah tidak bisa menampung dan menyelesaikan masalah yang disampaikan masyarakat. Keadaan ini menggambarkan betapa rapuhnya nilai-nilai wibawa dan kehormatan pemerintah di mata rakyat, karena citra tampilan yang lemah dan tak berdaya. Jika dilihat dari sisi pemerintah, ungkapan ini dianggap berlebihan, bersifat penghina-an dan dapat pula dituduh sebagai fitnah dan provokasi yang me-nanam rasa kebencian di masyarakat terhadap pemerintahan yang sah. Selain ungkapan-ungka-

pan tersebut di atas, ada beberapa ungkapan lain yang sering diucapkan dalam pidato Thaib Adamy, yang substansinya seperti menggambarkan keadaan pemerintah yang lemah dalam segi tanggung jawab dan otoritas.

*“Uek keubeu, keubeu mate lam seunamuek,
Pakon matee dikah hai keubeu?
Hana soe rabee dilon hai po
Pakan han karabee dikah hai cut?
Saket pruet dilon hai po
Pakon saket dihai hai pruet...?
Bu meuntah dikah hai bu..?
Kayee basah dilon hai po
Pakon basah dikah hai kayee...?
Ujeun rhaha dilon hai po
Pakon karhah dikah hai ujeun...?
Cangguek lakee dilon hai po
Pakon kalekee dikah hai cengguek..?
Uleue bathuep dilon hai po
Pakon kabathueb dikah hai hai uleue...?
Kleung sama dion po
Pakon kasama dikah hai keung..?
Siwah tak ilon po
Pakon katak dikah hai siwah..?
Galak-galak kutak sioe”.*

Artinya sebagai berikut,

*“Uwak, kerbau uwak, kerbau mati dalam kubangan
Mengapa mati dikau hai kerbau...?”*

*Karena tidak ada gembala
Mengapa tak gembala hai buyung...?
Karena aku sakit perut
Mengapa sakit perut engkau hai perut...?
Karena nasi kumakan mentah
Mengapa mentah engkau nasi...?"
Karena kayunya basah
Mengapa basah engkau hai kayu...?
Karena hujan menyirami aku
Mengapa engkau siram wahai hujan..?
Karena katak yang memintaku
Mengapa engkau meminta hai katak..?
Karena ular mematukku
Mengapa engkau patuk wahai ular...?"
Karena Siwah menyambar aku
Mengapa engkau menyambar wahai Siwah..?
Suka-suka kusambar sekali."*

Akibat dari semua gerakannya, Thaib Adamy ditangkap pada 29 Maret 1963 atas perintah Panglima Kodam I Iskandar Muda yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel M. Yasin selaku Penguasa Daerah Militer Aceh.

Selanjutnya setelah enam kali masa persidangan Thaib dipen-jara selama dua tahun. Terhadap keputusan ini, Sekretaris Komite PKI Aceh, Muhammad Samadikin menyatakan, "bahwa perkara Thaib Adamy adalah suatu proses terhadap pribadi yang bersang-kutan, yang juga sama prosesnya terhadap PKI dan proses terhadap rakyat. Ini merupakan tantangan yang ofensif Manipol dan walaupun ini terjadi di Aceh, tetapi mempunyai arti

nasional yang penting dan juga merupakan suatu perkara politik yang revolusioner besar setelah SOB dihapuskan.”³⁹

Setelah mendekam di penjara selama dua tahun, Thaib disam-but para pengikutnya dan langsung dibawa ke sebuah rapat umum yang sedang membicarakan berbagai persiapan untuk hari berse-jarah pada akhir bulan September 1965. Jumlah simpatisan PKI di Aceh tidak ada catatan yang pasti, tapi berdasarkan perkiraan se-mentara hanya belasan ribu orang saja. Salah satu penyebab peningkatan jumlah anggota adalah karena para pimpinan PKI sangat berani mengecam setiap tindakan/kebijakan pemerintah yang di-anggap merugikan masya-rakat. Seperti Thaib Adamy yang rela mendekam dua tahun di penjara, karena menghina pemerintah demi membela kepentingan rakyat dan sekaligus mempertinggi pamor dan pengaruh PKI di mata publik.

Melihat perkembangan PKI yang makin meluas tahun 1965, yang didukung aksi dan propaganda Thaib Adamy setelah keluar dari penjara, akhirnya muncul kekhawatiran dari kalangan maha-siswa dan pelajar, terutama yang aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Dari kalangan HMI muncul nama-nama seperti Sayed Hasan Babud dan M. Ali Basyah Amin.

Berikutnya dari kalangan PII muncul nama-nama seperti Man-sur Amin, Dahlan Sulaiman, Syarif Aamudian, A. Malik Raden, yang kemudian menjadi pimpinan KAPPI.⁴⁰ Dari kalangan kampus muncul nama-nama seperti Noor Majid, Nurdin Abdurrahman, Dhimur-tala, Let Bugeh, Thabrani Ibrahim dll. Dari kalangan santri seperti Said Zainal Abidin,

³⁹ A.R Ibrahim, *Awal Kehancuran PKI di Aceh*, Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh, Tanggal 30 September 1993.

⁴⁰ Sayed Abubakar, *Wawancara*, Banda Aceh, tanggal 8 Juli 2006

Usman WD, Hamdan, Yusuf Isa dan lain-lain.⁴¹ Reaksi yang diberikan kalangan pemuda terhadap gerakan PKI beraneka macam, mulai meminta perhatian pemerintah dan panglima TNI untuk selalu berhati-hati terhadap pengaruh dan propa-ganda PKI, hingga kepada aksi penyebaran pamflet-pamflet anti PKI, membentuk resimen mahasiswa anti PKI, membuat rapat-rapat, dan terakhir ikut serta dalam aksi pengganyangan dan penumpasan sisa G-30-S/PKI setelah nyata-nyata diketahui PKI terlibat aksi gerakan 30 September 1965 di Jakarta.

Mulai tanggal 2 Oktober 1965 mahasiswa Syiah Kuala dan mahasiswa IAIN Ar. Raniry bersama-sama di bawah komando Noor Majid melakukan rapat di lapangan tugu Darussalam dengan mengibarkan bendera merah putih, bendera dewan mahasiswa dan bendera senat mahasiswa. Kemudian massa mahasiswa bergerak ke gedung Rektor Unsyiah, Rektor IAIN dan Rektor IKIP Bandung Cabang Banda Aceh, untuk menyampaikan orasi dan pernyataan sikap bahwa mereka mengutuk PKI dan menggalang kekuatan selanjutnya untuk menumpas semua bentuk gerakan PKI yang ada di Aceh.

Kemudian massa bergerak menuju kota Banda Aceh dan menancapkan ketiga bendera merah putih di atas hotel Nyak sarong di jalan Mohd. Jam Banda Aceh, sebagai tanda perlawanan terhadap PKI sudah harus dimulai. Pada saat itulah muncul berbagai bendera ormas pendukung Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme dan segala bentuknya.

Atas desakan mahasiswa, pemuda pelajar dan segenap komponen masyarakat, pada tanggal 29 Oktober 1965 Panglima Daerah pertahanan A, Brigadir Jendral Ishak

⁴¹ Said Umar Al Habsyi, *Hanya Sekali PKI Lancarkan Aksinya di Banda Aceh*, Harian Waspada, Medan, tanggal 22 September 1986.

Juarsa mengumumkan bahwa PKI beserta organisasi *onderbouw*-nya telah dibekukan dan harus menghentikan kegiatannya di Aceh. Didukung oleh pernyataan dan fatwa ulama Aceh yang menyatakan bahwa komunisme adalah sebagai ajaran yang kufur dan haram hukumnya bagi setiap umat Islam untuk menerima ajarannya.***



Bab IV

PERISTIWA G-30-S/PKI DAN RESPON MILITER

Gerakan 30 September sering disebut juga Gestok. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Presiden Soekarno untuk menye-but “gerakan” yang terjadi pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 yang melakukan penculikan terhadap beberapa orang Jenderal TNI AD. Pelaku peristiwa itu sendiri menamakan dirinya “Gerakan 30 September”, tetapi pentolan Angkatan Darat menyebutnya “Ges-tapu” agar bisa disosialisasikan masyarakat dengan Gestapo Jerman yang kejam itu. Peristiwa ini menjadi catatan hitam bagi negara Indonesia dan bagian dari perjalanan panjang bangsa untuk dijadi-kan prasasti agar lebih mawas diri di masa mendatang.

A. Pembantaian Pahlawan Revolusi

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Re-publik Indonesia yang ke XX pada tanggal 5 Oktober 1965 di Taman Pahlawan Kalibata Jakarta⁴² telah dilakukan upacara pema-kaman 7 orang pahlawan revolusi yang telah menjadi korban ge-rombolan kontra revolusi

⁴² *Kompas*, 6 Oktober 1965.

yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

Peristiwa itu dimulai sejak hari kamis malam tanggal 30 Sep-tember 1965. Sekelompok pasukan yang terdiri dari berbagai kesa-tuan Angkatan Darat bergerak menuju ke-diaman 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Hanya satu tujuan mereka, membawa ketujuh orang jenderal tersebut hidup atau mati ke hadapan Presiden Soe-karno. Pada kenyataannya, mereka yang diculik tak pernah diha-dapkan kepada Soekarno. Dalam aksinya tanggal 1 Oktober 1965 dinihari, gerakan itu hanya berhasil menculik 6 jenderal saja. Ke-enam jenderal tersebut ialah Letjen. Ahmad Yani, Mayjen. Suprap-to, Mayjen. S. Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. D.I Pandjai-tan, Brigjen. Sutojo Siswomihardjo dan Lettu. Piere Tendean ajudan Jenderal A.H. Nasution. Nasution sendiri berhasil meloloskan diri dengan melompat ke rumah Duta Besar Irak yang terletak persis di sebelah kediamannya.

Pagi harinya tanggal 1 Oktober 1965, sebuah susunan Dewan Revolusi diumumkan melalui corong Radio Republik Indonesia (RRI). Pengumuman itu memuat pernyataan bahwa sebuah gerak-an yang terdiri dari pasukan bawahan Angkatan Darat telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari aksi *coup d' etat*. Menurut mere-ka, *coup d' etat* ini sejatinya akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal dan CIA pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari jadi ABRI ke 20.

Meski peristiwa G-30-S/PKI disebut sebagai aksi yang didalangi PKI, tetapi banyak pihak juga yang berpendapat lain, yang menyatakan bukan hanya PKI yang pantas disebut dalang peris-tiwa itu, tetapi banyak pihak-pihak lain yang ikut bermain dan ter-libat didalamnya. Dalam sebuah tulisannya tentang memecahkan teka-teki sejarah G-30-S/PKI, Salahudin Wahid berpendapat bahwa ketika terjad-

inya peristiwa itu tidak ada keraguan sedikit pun bahwa yang mendalangi kejadian tersebut adalah PKI. Keyakinan serupa sampai juga ke Aceh. Akan tetapi, sejak tahun 1971 ketika mulai beredar *Cornell Paper*, sebagian besar para sejarawan sa-dar, peneliti, dan pengamat politik baru sadar bahwa peristiwa G-30-S/PKI bukan hanya PKI saja yang terlibat, tetapi lebih disebabkan oleh pihak-pihak lain, terutama keterlibatan TNI Angkatan Darat. Bukan hanya sebatas *Cornell Paper* saja yang membahas tentang peristiwa tersebut, tetapi ada sepuluh teori yang mengungkapkan hal itu.⁴³

Cornell Paper adalah hasil penelitian Benedict R. Anderson dan Ruth T. Mc Vey dari universitas Cornell Amerika Serikat ten-tang pe-ristiwa G-30-S yang ditulis pada bulan Januari 1966, sekitar empat bulan setelah peristiwa itu terjadi. Paper ini pada intinya menyata-kan bahwa peristiwa itu pada dasarnya meru-pakan masalah internal Angkatan Darat dan tidak ada kaitannya dengan PKI. Sejumlah Kolonel AD dari divisi AD Diponegoro Jawa Tengah merasa tidak puas terhadap kepe-mimpinan tentara yang rusak oleh kemewahan di Jakarta. Tesis ini tentu saja tidak benar, karena sebagian besar Jenderal TNI/ AD masih bergaya puritan seperti Nasution dan Sudirman. Disebut juga bahwa keterlibatan PKI ke dalam arus per-tikaian adalah suatu kecelakaan. Secara garis besar disimpulkan oleh Salahudin Wahid, di antaranya: a) seperti diungkapkan oleh versi pemerintah yang berkuasa yang menyebutkan PKI sebagai dalangnya; b) versi *Cornell Paper* yang menegaskan bahwa peristiwa ini dipicu oleh persoalan internal AD; c) peristiwa itu digerakkan atas dasar kerja sama perwira-perwira pembelot dengan pemimpin PKI; d) ada teori yang

⁴³ Salahudin Wahid, *Memecahkan Teka-Teki Sejarah G-30-S*, dalam buku Aminuddin Kasdi, G. 30. S. PKI/ 1965 Bedah Cesar Dewan Revolusi Indonesia, Java Pustaka, Jakarta, 2005. hlm . vii.

meng-ungkap tabir keterlibatan tangan-tangan Amerika melalui agen-agen CIA; e) teori yang menyebutkan keterlibatan Presiden Soe-karno dalam kerangka mengim-bangi basis dukungan terhadap kepemimpinannya; f) ada teori yang menguak keterlibatan Soe-harto yang menjel-makan ketidakpuasan TNI/AD terhadap kepe-mimpinan Soekarno; g) Ketujuh, ada teori *chaos* yang menyata-kan tidak ada “*grand scenario*” daam peristiwa tersebut. Semua-nya didominasi oleh improvisasi lapangan, yang memungkinkan terjadinya kombinasi unsur-unsur Nekolim, pimpinan PKI dan oknum TNI yang membelot.

Terlepas dengan berbagai ragam teori yang mungkin ber-tambah atau mungkin menyusut karena saing ber-tentangan satu sama lainnya. Berikut ini diungkapkan seki-las bentuk *action plan* pada 30 September 1965 yang terja-di di Jakarta. Langkah pertama, dimulai dari Biro khusus PKI yang menyampaikan tiga macam lang-kah perintah yang harus dilaksanakan. *Pertama*, menculik dan membunuh para Jenderal yang reaksioner untuk meniadakan mereka dari Dewan Jenderal. *Kedua*, pasukan revolusioner dari TNI/AD yang asli menduduki Istana Presiden dan seki-tarnya, menguasai RRI pusat, menguasai pusat Telkom dan objek vital lain di Jakarta. *Ketiga*, Presiden Soekarno harus diamankan ke pang-kalan Udara Halim Perdana Kusumah dan dipaksa mengadakan kerja sama. Tugas pertama yang berkenaan dengan penculikan dan pembunuhan para Jen-deral reaksioner dibebankan pada ke-lompok Pasopati, yang terdiri dari Yon Cakrabirawa yang dibantu oleh sukare-lawan Pemuda Rakyat. Kelompok satu ini dipimpin oleh Ko-lonel A. Latief dan Letnan satu Dul Arief. Lettu Dul Arief ditugasi memimpin aksi penculikan para Jenderal. Pasukan ini berangkat dari Lubang Buaya pukul 3 dinihari dan tiba di sasaran pukul 4. Sebelum pasukan diberangkatkan, Syam memberikan instruksi agar menangkap para Jenderal itu

daam keadaan hidup atau mati. Masing-masing regu atau peleton (A) dipimpin oleh Sersan Mayor Soerono. Peleton (B) dipimpin oleh Sersan Kepala Bungkus dari Cakra Birawa. Peleton (C) oleh Sersan Mayor Sukardjo (dari Yon 454). Peleton (D) dipimpin Sersan Mayor Satar Cakra Birawa dengan Sersan Mayor Paat (Yon 530). Peleton (E) Pembantu Letnan Satu Mukidjan (Jaya Sakti-I). Peleton (F) oleh Letda Djahuruf Cakrabirawa. Dan Peleton (G) dipimpin oleh Sersan Dua Sulaiman. Masing-masing dengan target sebagai berikut, (a) Brigjen Soetojo di Jl. Sumenep. (b) Mayjen Haryono. (c) Brigjen Panjaitan di Jl. Hasanudian Kebayoran Baru. (d) Mayjen S.Parman. (e) Letjen Ahmad Yani di Jl.Lembang. (f) Jenderal A.H. Nasution di Jl. Teuku Umar dan (g) Mayjen Soeprapto di Jl. Basuki.⁴⁴

Pada pukul 5 pagi tanggal 1 Oktober 1965 di sekitar Lubang Buaya telah berkumpul 100 orang sukarelawan anggota GERWANI, BTI dan SOBSI untuk menyambut kedatangan kendaraan dan truk-truk yang membawa korban penculikan G-30-S yang dilancarkan sejak tadi malam itu, yang terdiri dari enam jenderal dan satu orang perwira ajudan yang saat itu dianggap jenderal A.H. Nasution. Para tawanan diserahkan dari pasukan penculik Pasopati kepada pasukan basis tempur Pringgodani. Di situ dilaporkan bahwa ada dua jenderal yang tewas di tempat kejadian, yaitu Jenderal A. Yani dan Mayjen S. parman. Selebihnya segar bugar.

Setelah menerima tawanan itu, Mayor Udara Gatot Sukirno, se-laku komandan pasukan Pringgodani melaporkan kepada atasan-nya Mayor Udara Soejono selaku Komandan

⁴⁴ Harian Sinar Harapan, 27 November 1965 dalam buku Aminuddin Kasdi, *ibid*, hlm. 61-74. Mengutip catatan dalam “*Bunga Kehormatan untuk Tujuan Kematian*” dalam Buku Keluarga Pahlawan Revolusi, Kunang-kunang Kebenaran di Langit malam, tuturan anak-anak Pahlwan revolusi Keluarga korban Peristiwa Dini hari 1 Oktober 1965, Jakarta, 2002. hm. 119-172.

Central Komandi-I. Selanjutnya sang atasan memberikan perintah agar tawanan se-gera “diselesaikan”. Lalu mulailah penyiksaan yang cukup sadis yang dilakukan oleh anggota GERWANI, BTI, SOBSI dan anak-anak PKI yang hadir. Sambil melakukan penyiksaan, mereka me-lantunkan lagu-lagu perjuangan ciptaan LEKRA, meneriakkan yel-yel anti Syetan Desa, Ganyang KABIR (Kapitalis Birokrat) dan Ga-nyang Dewan Jenderal. Mereka juga melakukan pesta harum bu-nga yang diikuti dengan tari-menari anak-anak wanita Gerwani sambil melakukan penyiksaan terhadap tawanan yang masih hidup.

Kesaksian Sukitman (Bharada Polisi yang ditawan G-30-S/PKI) sebagaimana disebutkan dalam buku “Kunang-kunang Kebenaran di Langit Malam” menjelaskan bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh anak-anak PKI terhadap tawanan G.30.S di Lubang Buaya benar-benar di luar perike-manusiaan, sadisme, dan kejam. Setelah disiksa dan tak berdaya lagi, masing-masing korban ditembak mati dan dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu diberondong lagi de-ngan tembakan kematian ke dalam sumur.

Aksi Dewan Revolusi. Pada pukul 07.00 pagi hari itu juga, RRI pusat yang telah diduduki dan dikuasai oleh Gerakan 30 Septem-ber, dipaksa untuk menyiarkan pengumuman pertama kepada se-luruh rakyat Indonesia setanah air, yang isinya adalah.

“... Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di ibukota Negara RI, Jakarta, teah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan bersenjata lainnya. Gerakan 30 Sep-tember yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, komandan ba-talyon Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, tampil memimpin perlawanan yang ditujukan kepada mereka yang mena-makan dirinya Dewan Jenderal . Sejumlah anggota Dewan Jenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi penting serta obyek-obyek vital lainnya telah dikuasai dan telah berada dalam ke-

kuasaan Gerakan 30 September. Presiden Soekarno telah selamat dan dalam lingkungan G. 30.S. Dewan Jenderal adalah gerakan *subversive* yang disponsori oleh CIA. Mereka mulai aktif pada saat Presiden Soekarno sakit pada bulan Agustus 1965, dengan menyebarkan berita bahwa Presiden Soekarno sakit dan diharapkan meninggal. Oleh karena itu, Dewan Jenderal merencanakan aksi pameran kekuatan pada hari ABRI tanggal 5 Oktober 1965 dengan menggelar pasukan yang didatangkan dari Jawa Timur, Jawa tengah dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasinya kekuatan militer di Jakarta, maka Dewan Jenderal akan mudah melakukan *Coup-contra* militer revolusioner. Atas dasar tersebut maka Let.Kol Untung selaku komandan gerakan 30 September menyatakan bahwa gerakan ini semata-mata gerakan dalam tubuh AD yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama baik AD, bermaksud jahat terhadap RI dan Presiden Soekarno. Let. Kol. Untung menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu keharusan sebagai anggota Cakrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden RI.⁴⁵

Selanjutnya, apa yang telah dilakukan di Jakarta, segera akan diikuti oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, yang ditujukan untuk membersihkan seluruh kaki Indonesia. Selanjutnya sebagai *follow up* dari semua Gerakan 30 September ini, segera dibentuk Dewan revolusi pusat, dewan revolusi propinsi, dewan revolusi Kabupaten dan kota, hingga dewan revolusi kecamatan, kelurahan dan desa-desa. Anggota dewan revolusi terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang setia dan mendukung gerakan 30 September 1965 tanpa *reserve*. Seluruh partai-partai politik, ormas-ormas dan juga seluruh surat kabar dapat meneruskan kegiatannya dengan catatan menyatakan kesetiaannya kepada dewan revolusi Indonesia. Kepada seluruh perwira, bintara dan tamtama angkatan darat di

⁴⁵ *Ibid.*

seluruh tanah air, Untung menyerukan supaya bertekad bulat agar segera mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan semua kaki tangannya yang ada dalam tubuh AD. Semua Jenderal dan perwira-perwira yang hidup di atas penderitaan anak buahnya, yang hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, meng-hina kaum wanita dan menghamburkan uang Negara semuanya harus ditendang dari TNI/AD dan diberikan hukuman yang setimpal. AD bukan untuk Jenderal-Jenderal tetapi milik semua prajurit AD yang setia kepada cita-cita revolusi Agustus 1945. "Kepada seluruh rakyat Indonesia, Letkol Untung menyerukan agar tetap waspada dan mempertinggi semangat untuk menyelamatkan RI dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat." Dalam waktu dekat, Letkol Untung akan segera mengumumkan Dekrit-I tentang dewan revolusi Indonesia yang segera disusul dengan dekrit-dekrit lainnya.⁴⁶

B. Militer (TNI-AD) Bertindak

Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, Pangdam Jaya, Mayjen Umar Wwirahadikusumah menerima telepon dari ajudan Jenderal Ahmad Yani, Mayor CPM Sudarto, yang me-

⁴⁶ Dalam isi pengumuman RRI tersebut, menurut versi Untung, dapat diketahui tiga hal, (1) ada gerakan jahat dari kalangan jendrak AD yang tidak setia pada Presiden Soekarno. Tujuannya untuk membangkitkan rasa benci rakyat terhadap jendral, yang namanya tidak disebutkan Untung saat itu. (2) Untung menggunakan lembaga Cakrabirawa sebagai penyelamat Bung Karno, sehingga Untung dan Cakrabirawa mendapat dukungan publik. (3) Dikesankan bahwa gerakan itu bukan suatu kudeta yang negatif, tetapi semata-mata murni gerakan dalam tubuh Angkatan darat (AD/TNI) dengan maksud agar satuan angkatan lain tidak ikut campur tangan. Berikutnya pada jam 14.00 hari itu juga ia mengumumkan DEKRIT-I tentang pembentukan dewan revolusi Indonesia, yang isinya, *"untuk sementara waktu menjelang diadakannya Pemilihan Umum MPR RI sesuai dengan amanat UUD 1945, maka dewan revolusi menjadi sumber dari segala sumber kekuasaan dalam Negara RI untuk mewujudkan Pancasila dan Panca azimat Revolusi seluruhnya."*

njelaskan peristiwa pen-culikan terhadap Jenderal Ahmad Yani dan lain-lain. Selanjutnya, Umar memerintahkan Sudarto agar segera melaporkan kepada Ko-lonel Sarwo Edhie Wibowo. Kemudian Sarwo Edhi langsung memerintahkan Mayor C.I Santoso agar segera menarik seluruh pasukan RPKAD yang sedang mengikuti latihan persiapan upacara HUT ABRI di parkir timur Senayan. Keadaan pagi itu memang sangat membingungkan, dan pengumuman Letkol Untung hanyalah se-buah isyarat bahwa peristiwa ini melibatkan orang-orang Cakra bira-wa. Mayjen Soeharto, selaku panglima KOSTRAD menerima kabar dari tetangganya Mashuri yang menyatakan telah terjadi gerakan miter yang mencurigakan di rumah beberapa orang Jenderal, dan dikabarkan beberapa orang dari mereka telah ditembak mati di rumahnya oleh gerombolan senjata yang mengaku dirinya dari Yon Cakrabirawa.

Setelah mendapat informasi itu, Mayjen Soeharto langsung pergi ke kantornya di Medan Merdeka Timur. Dalam perjalanannya itu Soeharto melihat sendiri ada dua batalyon Kostrad yang sedang siaga mengikuti latihan persiapan HUT 5 Oktober 1965. Kedua Batalyon itu adalah, Yon 454/Para dari Jawa Tengah yang ditempatkan di bagian utara lampung Medan Merdeka menghadap Istana Merdeka, dan Yon 530/Para dari Jawa Timur yang ditempatkan di sekitar Museum, Bundaran Air Mancur, gedung Postel dan terus ke selatan ke Stasiun Gambir. Setibanya di kantor Pankostrad, Soe-harto langsung melakukan pertemuan dengan para pembantunya untuk menganalisis situasi dan kondisi yang terjadi sejak tadi malam hingga keluarnya siaran pengumuman RRI pada pukul 07.00 dan siaran DEKRIT-I Tahun 1965 tentang pembentukan Dewan Revolusi pada pukul 14.00 hari 1 Oktober 1965 yang di pimpin oleh Letnan Kolonel Untung, selaku Komandan Pasukan Cakrabirawa. Hasil analisis situasi yang dilakukan di kantor Pangko-

strad itu menyimpulkan bahwa telah terjadi penghianatan terhadap TNI/AD dan usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang bersekongkol dengan gerakan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung.

Soeharto kemudian bertekad untuk melawan dan menumpas seluruh Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh Untung, dan bertekad pula untuk melawan semua upaya yang hendak merebut kekuasaan Negara Republik Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah segera mengambil alih jabatan pimpinan angkatan darat berdasarkan order tetap Menpangad tentang pejabat yang mewakili pimpinan TNI/AD apabila Menpangad berhalangan. Langkah ini disetujui oleh para perwira tinggi yang ada dalam tubuh jajaran organisasi Kostrad.

Soeharto segera memanggil Pangdam Jaya Umar Wirahadikusumah yang sedang di lapangan bersama dengan Letkol CPM Hidayat Wiryasanjaya “mengunjungi rumah-rumah duka” para korban peristiwa G.30.S tadi malam. Tibatiba A Haris Nasution keluar dari persembunyiannya (yang selamat dari aksi penculikan tadi malam) dan segera menemui Letkol Hidayat. Selanjutnya Letkol Hidayat bersama Bob Sunario (ipar Nasution) segera membawa Pak Nas keluar dari kediamannya itu untuk pindah ke tempat yang aman di sekitar Markas Kostrad.

Pada siang hari 1 Oktober 1965 Jenderal Nasution bergabung ke Kostrad di Markas Kostrad jalan Merdeka Timur Jakarta. Selanjutnya mereka bertiga (Soeharto, Umar Wirahadikusumah, dan Nasution) yang dibantu oleh perwira-perwira tinggi lainnya di Markas Kostrad melakukan rapat evaluasi terakhir terhadap situasi yang terjadi. Kesimpulan yang diambil dalam rapat itu adalah, segera melakukan pembelaan dan melakukan tindak pembalasan terhadap para pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap jende-

ral-jen-deral angkatan darat. Disinyalir bahwa pasukan penculik itu pada saat ini berkonsentrasi di sekitar PAU (Pangkalan Angkatan Udara) Halim Perdanakesuma.

Langkah berikutnya adalah melakukan konsolidasi pasukan untuk menggempur seluruh kekuatan G.30.S yang terkonsentrasi di PAU-Halim dan atau dimana saja mereka berada. Pada saat itu diakui oleh Pangkostrad masih sangat sulit untuk mendapatkan pasukan yang terpercaya dan terlatih, karena situasi yang sedang kacau. Namun berkat keseriusan dan kesiapan Kostrad, pada pukul 14.00 melalui Letkol. Ali Murtopo, diterima kabar dari Kapten Soekarbi, batalyon 530 Brawijaya, bahwa pada pukul 16.30 dijanjikan akan membawa batalyon 530 untuk bergabung dengan Kostrad. Pada pukul 20.00 malam bergabung lagi dua kompi dari pecahan pasukan Yon 454 yang membelot bergabung dengan Kostrad. Berikutnya juga bergabung Yon Para 328 Kujang yang sedang berada di Jakarta dalam rangka persiapan latihan HUT 5 Oktober 1965.

Dengan berbekal pasukan RPKAD dari Cijantung, Yon Para 328 Kujang, dan dua kompi dari Yon 454 tadi, Kolonel Sarwo Edhi Wibowo dengan penuh percaya diri, menghadapi Pangkostrad Soeharto, dan menyatakan pasukan siap diberangkatkan untuk menggempur seluruh tempat konsentrasi pengkhianat TNI/AD yang pada saat itu sedang berkumpul di sekitar PAU-Halim. Soeharto minta ditangguhkan untuk sementara, karena pada saat yang sama itu, ada sepucuk surat dari Presiden Soekarno yang sedang dibahas di dalam rapat para perwira tinggi Kostrad. Surat tersebut dibawa oleh Kolonel Bambang Widjonarko dari Presiden Soekarno kepada Pangkostrad Mayjen Soeharto.

Surat tersebut dibuat di Halim, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Presiden Soekarno dalam keadaan sehat dan selamat serta tetap memegang kendali selaku

Pimpinan Negara. Dalam surat itu juga disebutkan, bahwa Presiden telah mengangkat May-jen Pranoto Reksosamudro selaku Pejabat Harian (Caretaker) Menteri Panglima Angkatan Darat, selanjutnya Pangti ABRI (Presiden) juga memerintahkan agar pasukan-pasukan ditarik dari posnya masing-masing dan baru boleh bergerak hanya atas perintah. Para perwira tinggi yang berkumpul di Markas Kostrad termasuk Nasution, ikut melakukan telah dan pembahasan terhadap isi surat Presiden itu. Keputusan yang mereka ambil adalah menunda pelaksanaan perintah Presiden Soekarno dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁴⁷

Operasi penumpasan dan pengejaran terhadap pasukan penculik Jenderal-Jenderal TNI sedang berjalan. Para Jenderal diculik itu belum diketahui identitasnya dan belum juga diketahui bagaimana nasibnya.

Melaporkan kepada presiden, bahwa biasanya bila Mengandung Jenderal A. Yani tidak ada di tempat, maka yang mewakilinya ada-lah Pangkostrad Mayjend. Soeharto sebagai perwira paling senior. Selanjutnya melalui Bambang Widjanarko, Mayjen. Soeharto juga meminta bantuan agar dapat membantu Bung karno untuk segera keluar dari PAU Halim. Karena dalam waktu dekat PAU Halim akan segera diserang RPKAD dan Presiden tidak boleh ada di tempat salah. Karena panik, saat itu Umar Dani tidak dapat menunjukkan tempat yang aman bagi Presiden, antara ke Yogya, Bali atau ke Bogor. Sehubungan dengan itu Pangdam Jaya Umar Wirahadikusumah juga telah mengumumkan DKI-Jakarta “dalam keadaan bahaya perang” serta pemberlakuan jam malam mulai pukul 18.00 hingga jam 06.00 pagi. Selanjutnya Pangkostrad Mayjen Soeharto memerintahkan pas-

⁴⁷ Sugiarso Suroyo, *Siapa Yang Menabur Angin, Akan Menuai Badai*, Jakarta, 1988. Laporan yang tidak dipublikasikan, dalam buku Aminuddin Kasdi, *Ibid.* hlm.78.

ukan RPKAD dan Yon 328 Kujang untuk merebut kembali RRI serta obyek vital lain, dan semua bisa direbut kembali tanpa perlawanan. Sejak itu mulai disiarkan kembali semua kebijakan Pangkostrad selaku pimpinan sementara TNI/AD untuk menyelamatkan Negara dan mematahkan seluruh unsur-unsur pemberontakan G.30.S/PKI yang dikendalikan oleh dewan Revolusi dibawah pimpinan Let.Kol. Untung.

Soeharto segera meralat nama-nama perwira AD yang dicatut namanya dan disebutkan sebagai anggota dewan revolusi sebagai-mana diumumkan oleh Letkol Untung dalam DEKRIT-I tahun 1965. nama-nama tersebut adalah; Basuki Rahmat, Amir Mahmud, Umar Wirahadikusumah, Solihin, Ryacudu, dan Andi Rivai.

Selanjutnya Pangkostrad Soeharto melalui corong RRI me-nyampaikan pengumuman sebagai Komandan Pimpinan AD RI, se-bagai berikut;

PENGUMUMAN

No. 002/Peng/ Pus/1965

Dengan ini diumumkan bahwa :

- 1. Telah ada pengertian dan kerjasama dan kebulatan pen-uh antara AD, AL dan Angkatan Kepolisian untuk menumpas gerakan kontra revolusioner dari apa yang me-namakan dirinya "gerakan 30 Sep-tember".*
- 2. Dengan telah mengumumkan apa yang mereka sebut "Dewan Revolusi Indonesia" dan menganggap bahwa Kabinet Dwikora su-dah demisioner, maka jelaslah bahwa orang-orang gerakan 30 September itu adalah orang yang kontra revolusi yang telah melakukan pengambil alihan kekuasaan Negara RI dari tangan P.J.M Presiden/ panglima tertinggi ABRI/ Pimpinan besar Revolusi, Bung Karno, di samping mereka yang telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat.*

3. Masyarakat diharap tenang dan tetap waspada serta siap siaga.

Jakarta, 01 oktober 1965

Pimpinan sementara Angkatan RI

Ttd

Mayor Jenderal Soeharto.

C. Latar Belakang Peristiwa G-30-S/PKI

Skenario terjadinya peristiwa Gerakan 30 September dibuat dalam berbagai versi. Di antaranya adalah *Van der Plas Connection*. *Van der Plas Connection* adalah jaringan riil yang canggih, hanya anggota-anggota inti tertentu yang sadar akan keberadaannya sebagai anggota jaringan, lainnya adalah oknum-oknum oportunist tanpa sadar, sekedar sebagai alat saja. Ini adalah posting yang sudah cukup lama, 16 Januari 1998, yang dikirim oleh owner-nya milis

Pada tanggal 1 Oktober 1965, terjadi gerakan militer yg menamakan diri G30S, menculik dan membunuh 7 orang Jenderal dan seorang lolo Jend. Nasution karena keliru dengan Let. Tendean. Para Jenderal tersebut adalah anggota Tim Pengusut MBAD yang ditugasi mengusut -kejahatan terorganisasi- yang terjadi di Jawa Tengah dalam penggal kedua tahun 50-an. Mereka adalah Mayjen. Soeparto ketua Tim dan anggota Mayjen S. Parman, Majen. Harjono MT., Brigjen. Soetojo Siswomihardjo dan Brigjen Pandjaitan dan yang diluar Tim, Letjen A. Yani Menpangad. Drama berdarah subuh tgl. 1 Oktober 1965 yang traumatik, membuka jaringan mega konspirasi yang menelan korban rakyat besar sekali, komunis maupun non komunis dalam abad ini di Indonesia karena adanya interaksi konflik internal dengan kekuatan-kekuatan besar eksternal.

Disusul kemudian dengan pembentukan Dewan Re-

volusi yang diketuai oleh Letkol Untung, dengan anggota baik sipil maupun militer, a.l. tokoh yang menonjol ialah Dr. Soebandrio, Waperdam I (Wakil Perdana Menteri), orang kedua sesudah Bung Karno, May-jen Amir Mahmud, Pang Kodam Jaya, Brigjen Soepardjo, Panglima Komando Tempur II Kalimantan Barat. Apabila diikuti dengan cer-mat peristiwanya, ternyata yang mengeluarkan pernyataan mendukung Dewan Revolusi secara spontan dan vokal waktu itu, hanyalah Utomo Ramelan, Walikota Solo, sedangkan dari CDB (Comite Daerah Besar) PKI tidak ada yang mengeluarkan pernyataan se-perti itu. Ini bukan peristiwa yang kebetulan, tetapi jelas ada mere-kayasa di balik semua itu.

Para pelaku utama G-30-S adalah, Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Kawal Presiden Cakra Birawa, Kol. Latief, Komandan Brigade Infantri Kodam Jaya, Brigjen Soepardjo, Panglima Komando Tempur II Kalbar dalam rangka Ganyang Malaysia, Syam Kamaruszaman, Kepala Biro Khusus CC PKI. Keempat pelaku utama tersebut berorientasi dan ada hubungan jaringan dengan PKI, sebagai suatu hasil binaan dan infiltrasi komunis kedalam AD. Dengan Jenderal Suharto keempat pelaku utama tsb. juga mempunyai hubungan erat sejak dulu .

Latief bersama istri dan seorang perwira lain dari Solo bersama istri berkunjung kerumah kediaman Soeharto untuk menyamakan maksud pertemuan yang sebenarnya, yaitu untuk membicarakan penyingkiran para Jenderal anggota Tim Pengusut MBAD. Dengan hadirnya para istri justru kelihatan jelas betapa eratnya hubunngan mereka itu, sekaligus membantah pernyataan Soeharto, bahwa Latief datang ke Rumah Sakit itu akan membunuh diri Soeharto. seharusnya dibalik, salah satu tanda jelas adanya konspirasi dan rekayasa gerakan tersebut.

Dalam penggal kedua tahun 50-an, di Jawa Tengah ber-

pusat di Semarang, terjadi kejahatan terorganisasi (*organized crime*) berupa penyelundupan besar-besaran, penggelapan barang-barang milik perusahaan negara, manipulasi dump kendaraan bermotor milik Divisi Diponegoro dan pungutan liar atas barang-barang kebutuhan rakyat. (Pungli terkenal tahun 70-an di Jawa Tengah sudah berjalan 20 tahun lebih dulu).

Para pelakunya terdiri dari oknum-oknum militer dan sipil, terorganisasi baik seperti galibnya organisasi GANGSTER. Pelaksana utamanya a.l. adalah Liem Siu Liong, Thee Kian Seng (Bob Hasan), Tik Liong (Sutikno - pedagang besi tua). Baru-baru ini bahkan Bob Hasan dengan bangga berceritera di depan wartawan tentang hal tersebut. Sedangkan biang dari kejahatan terorganisasi tersebut tidak lain adalah Kol. Soeharto, Panglima Divisi Diponegoro waktu itu.

Adanya kriminalitas terorganisasi tersebut akhirnya sampai ditangan Jenderal Nasution Menteri Pertahanan / Ketua PARAN (Badan Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Aparat Negara). Atas laporan dari Kepala Staf Divisi Diponegoro Kol. Pranoto Reksosamodra dan Letkol. Soenarjo, komandan CPM Jawa Tengah yang mendeteksi dan mengamati kejahatan tersebut. (Letkol Sunaryo kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung Muda).

Jenderal Nasution memerintahkan agar kejahatan tersebut diusut, yang dilakukan oleh Tim Pengusut MBAD, terdiri dari Majen Soeprapto deputi Pangad sebagai ketua, dengan anggauta Majen. S. Parman, Majen Harjono MT, Brigjen Soe-tojo dan Brigjen Panjaitan. Dengan teliti dan kerja keras, dengan didukung bukti-bukti yang sah akhirnya Tim berkesimpulan, bahwa terhadap para pelaku, harus diambil tindakan.

Pertama Kol. Soeharto yang menjadi biangnya harus

dipe-cat dari kedudukannya selaku Panglima Divisi Diponegoro, dan kedua mereka yang terlibat diajukan ke depan Pengadilan.

Keputusan yang diambil atasan adalah, memecat Kol. Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro, tetapi tidak diajukan kedepan pengadilan. Kol. Soeharto kemudian dipindah ke Jakarta tanpa jabatan. Sedang Tik Liong diusut oleh Kejaksaan Negri Semarang atas perintah Jaksa Tinggi Jawa Tengah Mr. Imam Bardjo yang kemudian ternyata meninggal secara misterius.

Dengan pemecatan dirinya sebagai Panglima Divisi Diponegoro tersebut, Kolonel. Soeharto sangat marah dan dendam, bersumpah untuk membuat perhitungan dan akan meng-habisi, mereka-mereka yang membuat dirinya celaka. Mereka itu tidak lain adalah para perwira anggota Tim Pengusut MBAD, dan penanda tangan Surat Keputusan Pemecatan Panglima Divisi Diponegoro yang tidak lain adalah Panglima Tertinggi/Presiden Soekarno .

Dengan terjadinya drama berdarah subuh 1 Oktober 1965, ternyata seluruh anggota Tim Pengusut MBAD yaitu, Jenderal-jenderal Soeprato, S. Parman, Harjono MT, Soetojo dan Panjaitan, dibantai habis, dengan tambahan Men Pangad Letnan Jenderal A. Yani. Peristiwa tersebut menggocangkan Indonesia dengan hebat, suatu kondisi awal yang diperlukan untuk mengantar penggulingan Presiden Soekarno melalui G30S oleh *Van der Plas connection*.

Dengan dibantainya para Jenderal anggota Tim Pengusut MBAD yang terdiri dari Majen Soeprato, Majen S. Parman, Majen Harjono MT, Brigjen Soetojo Siswomihardjo dan Brigjen Panjaitan dan masih ditambah dengan Letjen A. Yani serta dilucutnya kekuasaan Presiden Soekarno, telah lengkap dan tuntas terlaksana, sumpah Kol. Soeharto yang

diucapkan tahun 1957.

Demikian pula dengan pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966, tugas pokok terakhir kolonel Soeharto yang dibebankan padanya oleh induk jaringanya (*Van der Plas connection*) yang merekrut dia telah dilaksanakannya dengan tuntas.

Amerika bersama sekutunya pada tahun 1958 meluncurkan se-buah proyek pemberontakan, dengan tujuan menggulingkan Presi-den Soekarno dan memecah Indone-sia untuk dijadikan beberapa negara dan menghapuskan PKI. Mereka menarik pengalaman dari Cina, yang secara utuh sesudah jatuhnya Chiang Kai Sek, seluruh daratan Cina jatuh ditangan komunis kecuali Taiwan karena terhalang lautan dan kemudian disekat oleh Armada ke-VII Amerika dengan dalih pakta dengan Cina (Chiang Kai Sek).

Di Indonesia Sekutu mempunyai kepentingan langsung yaitu sumber minyak di Sumatra dan Kalimantan yang meru-pakan milik-nya. Mereka meluncurkan proyek pemberontakan tersebut secara gegabah dan arogan, karena merasa telah menjadi pemenang dalam Perang Dunia ke II

Dengan dibantu koordinasi yang dilakukan oleh agen utamanya (*master agent*) Prof. Soemitro Djojohadikusumo, Sekutu menyalurkan dana dan senjata lewat Singapura untuk PRRI dan Permesta. Amerika dengan garang menodong Jakarta dengan Armada ke-VII, minta jaminan keselamatan warganya dan perusahaan-perusahaan miliknya. Jika Repu-blik Indonesia tidak sanggup maka mereka akan meng-gerak-kan Armada ke-VII yang sudah siap di laut Jawa.

Dengan terjadinya pemberontakan PRRI-Permesta, proyek Amerika Inggris tersebut, Bung Karno sebagai pe-mimpin kenamaan dunia, sempat jatuh citra dan martabat-nya sampai dititik terendah dimata dunia. Kemudian tampil Kolonel A. Yani dengan Operasi 17 Agustus untuk

menumpas pem-berontakan tersebut, dibawah ancaman Armada ke VII Ame-rika yang menang perang melawan Jepang di Pasifik. Bintang terang berada di pihak Yani. Dalam tiga hari berhasil direbut ibukota PRRI - Padang dan dalam waktu sekitar satu minggu seluruh PRRI berhasil digulung.

Permesta juga mengalami nasib sama, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diselesaikan pula. Di Sulawesi malahan terjadi seorang penerbang berkebangsaan Amerika, Allen Pope, ditembak jatuh oleh My. Ud. Dewanto, ditawan dan diadili serta mendapatkan vonnis hukuman mati, karena dia telah mengebomi wilayah Republik Indonesia dan juga beberapa kapal Indonesia, sehingga menimbulkan kerusakan dan tewasnya rakyat yang tidak berdosa. Dia mengaku bahwa operasinya dilakukan dengan terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Amerika di *Clark Field*, Fillipina

Dengan ditumpasnya pemberontakan projek Amerika - Inggris tersebut dalam waktu yang mengejutkan singkatnya, muka mereka tercoreng di mata dunia internasional dan terbuka kedoknya menyerang kedaulatan negara lain semaunya sendiri. Di samping itu Amerika terpaksa harus menjadi pengemis untuk memohon ampunan keselamatan jiwa Allen Pope, yang oleh Bung Karno dengan jiwa besar diluluskan.

Jika penumpasan berjalan agak lama dan pemerintahan-pe-merintahan tandingan tersebut sempat membuat perjanjian dengan Amerika, maka Amerika dapat menggerakkan Armada ke-VII untuk mendarat di wilayah Indonesia. Sikap yang garang dan arogan Sekutu tersebut dilandasi ego yang kuat karena telah menjadi pemenang dalam Perang Dunia ke-II dan Amerika di bawah pemerintahan Partai Republik ini berbau rasialis. . Wajah dan citra Bung Karno terangkat kembali dimata dunia dan Indonesia tidak

dapat dipandang remeh saja oleh negara-negara lain, terutama negara bekas kolonialis. Bung Karno merasa lega dan sangat berterima kasih kepada kolonel A. Yani yang mampu mengangkat kembali citra dan martabatnya dimata dunia internasional.

Apabila ditelusuri lebih mendalam, dalam rangka untuk lebih menjamin kepentingan Sekutu (politik, ekonomi dan keamanan di Indonesia) Amerika dan sekutunya merasa perlu untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan memecah-belah Indonesia menjadi beberapa negara, menyingkirkan para perwira yang berdedikasi dan menghapus PKI. Kegagalan yang dialami Amerika dan sekutunya dalam meluncurkan proyek pemberontakan PRRI-Permesta membuatnya sadar setelah mendapat advis dari Blanda, bahwa pendekatan dari daerah untuk menyingkirkan Presiden Soekarno adalah kesalahan yang fatal dan sulit untuk dapat berhasil.

Sekutu mulai melakukan pendekatan ke Pusat. Kepada Jakar-ta mulai ditawarkan untuk membeli pesawat angkut raksasa Hercu-les, Indonesia diberi bantuan stasiun komunikasi beserta perlengkapannya yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia (dengan demikian Sekutu dapat menyadap semua perintah-perintah dari pusat maupun daerah), kepada para perwira Indonesia diberi kesempatan untuk belajar ke Amerika, diadakan program *Civic Mission* dan perwira pelaksanaanya dilatih di Amerika beberapa bulan, juga dikirim ke *Indonesia Peace Corps*.

Para sarjana sipil dan mahasiswa diberi bea siswa untuk belajar ke Amerika. Para kader Dr. Soemitro Djojohadikusumo berbondong-bondong berangkat belajar ke Amerika dan kembali menggondol gelar-gelar akademis yang diperlukan untuk mengajar di Universitas. Hubungan yang semula tegang menjadi cair, tidak ada pesta atau

resepsi di Kedutaan Amerikayang tidak mengundang para sarjana yang kira-kira berpotensi.

Bersamaan dengan dilaksanakannya program-program tersebut diatas,dengan diam-diam dilakukan *talent scouting* (mencari calon jago berbakat) oleh perwira tinggi dari bagian sandi yang ternyata berada dalam jaringan Van der Plas. Calon jago adalah perwira-perwira dengan kriteria, avonturir, berani malu, berani mati, doyan duit, berpengalaman dan berhasil dalam berpetualang serta telah menikmatinya.

Ditemukan seorang perwira yang memenuhi kriteria tersebut, ialah seorang kolonel asal Jawa Tengah dan pernah menduduki po-sisi tertinggi ditempatnya sebagai Panglima Divisi,yaitu Kolonel Soeharto. Malahan padanya ditemukan faktor lain yang sangat pen-ting, yaitu menaruh dendam kesumat kepada para perwira atasan-nya, terutama anggauta Tim Pengusut MBAD dan rival berat A. Yani juga kepada Presiden Soekarno yang menandatangani Surat Keputusan pemecatannya sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Maka terpilihlah Kolonel Soeharto untuk dijadikan jago utamanya.

Dalam bulan Agustus 1965, datang sebuah Tim Dokter RRC, setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan Bung Karno, berkesimpulan penyakit Bung Karno adalah serius tak boleh diabaikan. Bagi Bandrio dan PKI berita ini adalah sangat menyentakkan. Sejak saat itu, mulai terjadi kegiatan dan manuver-manuver politik yang luar biasa. Bandrio melancarkan *move-move* politik dan PKI yang merasa belum siap sangat khawatir akan diterkam oleh AD (dokumen Gilchrist dsb). Lebih baik melakukan ofensif revolusioner daripada diam dan defensif.

Mereka bergegas untuk membuat persiapan-persiapan, guna menyingkirkan Jend. A. Yani dan para perwira pimpin-

an Angkatan Darat. Karena mereka sesudah penumpasan pemberontakan lebih terkonsolidasi, perhitungan Bandrio jika hanya Yani yang disingkirkan, kemungkinan Nasution akan dapat dimunculkan, maka Nasution segera dimasukkan juga dalam daftar untuk dihabisi. Dengan persiapan yang tergesa-gesa dan kurang cermat dan tidak rapi tersebut menjadikan para pelaksana penculikan tidak mampu membedakan antara Nasution dan Letnan Tendean, yang membuat lolosnya Nasution dari penculikan dan pembunuhan.

PKI segera meluncurkan kampanye politiknya, dengan melontarkan tudingan bahwa para perwira Pimpinan AD adalah fasis yang merencanakan kup ternadap Bung Karno dengan membentuk Dewan Jenderal. Pengertian Fasis adalah militer (yang ganas dan rakus) yang bekerja sama dengan kaum kapitalis (disini dikenal sebagai cukong, konglomerat). Sepanjang pengetahuan orang banyak, para jenderal Pimpinan AD tsb., tidak ada yang dikenal sebagai tukang dagang apalagi mempunyai cukong, maka tudingan fasis dari PKI tersebut jauh meleset dan kurang mendapat sambutan dari masyarakat bahkan oleh masyarakat mereka dinilai tertib, jujur dan disiplin.

Partai yang memberikan dukungan utama kepada Bung Karno dalam meluncurkan politik penggalangan negara Nefos (*New Emerging Forces*). Strategi politik ini, mengancam strategi politik Amerika Serikat, yang dalam rangka perang dingin menginginkan hanya ada dua kubu saja, kubu Kapitalis dan kubu Komunis. Bung Karno ingin menggalang kekuatan negara-negara berkembang, menjadi kubu ketiga karena PKI dalam hal ini merupakan pendukung utama, maka PKI selalu mendapat perlindungan dan dukungan Bung Karno, jika ada yang mengganggu atau menentanginya.

Sejak akhir tahun 1962, setelah Irian Jaya kembali ke pangkuan RI, PKI mengadakan evaluasi diri, mengapa sejak aktif kembali sudah hampir 15 tahun mulai 1949, belum juga dapat meraih kekuasaan, sedang dalam Pemilu 1955 sudah menjadi salah satu dari empat besar. Diluar negeri partai komunis dengan massa 10% saja sudah dapat meraih kekuasaan dengan mudah.

Mereka menemukan kesalahan tersebut, yaitu PKI telah mene-rapkan strategi politik yang keliru, yaitu strategi 'kon-formisme' me-nyesuaikan diri dengan garis politik Pemerintahan Nasional -Bung Karno. Maka PKI segera mengambil keputusan untuk beralih ke strategi 'konfrontasi' sesuai dengan garis perjuangan kominis yaitu '*Klassen Strijd*', per-tentangan kelas.

D.N. Aidit dan Nyoto ke Moskow untuk menyampaikan kepu-tusan tsb., tetapi justru mendapat marah dari bos Par-tai Komunis Sovyet, yang tidak dapat menyetujuinya, kar-ena kerjasama dengan pimpinan borjuis nasional seperti Bung Karno masih diperlukan dalam menghadapi kapitalis Amerika Serikat. Dengan adanya tokoh seperti Bung Karno, dapat digunakan menarik negara-negara berkembang disisi komunis.

Aidit merupakan tokoh yang misterius, dia dengan alasan untuk melaksanakan alih strategi politik yaitu "-kon-frontasi-" dalam rangka mengemban misi dari induk jaringannya lewat Syam yaitu *Van der Plas connection*, guna menyesuaikan agenda waktu yang sudah di-tentukan oleh jaringan tersebut dalam upaya hendak menggoncang In-donesia. Maka baginya tidak ada jalan lain selain beralih kiblat ke Beijing, yang masih berwawasan nasional / lokal yang menerapkan doktrin, -kekuasaan ada di ujung bedil- desa mengepung kota – berkonfrontasi dengan penguasa nasional, hal yang tidak dapat di-elakkan. Dengan men-

erapkan strategi politik konfrontasi tersebut, akan sesuai dengan agenda waktu yang sudah ditentukan *Van der Plas connection* - (Sekutu) untuk menggoncang Indonesia dalam rangka menyingkirkan Presiden Soekarno.

Sebagai realisasi strategi konfrontasi, dilancarkan Gerakan Aksi Sefihak, yang menimbulkan antagonisme dan konflik dengan partai dan golongan lain, seperti a.l. Masyumi, PSI, PNI, NU dan AD serta lain-lain kelompok. Menciptakan setan-setan kota dan setan desa, kabir (kapitalis birokrat), dsb. yang membikin suasana politik semakin panas, seperti, Peristiwa Bandar Betsi, Jonggol, Boyolali, Klaten dll.

Kekuatan yang menentang aksi-aksi PKI tsb. dituding oleh Bung Karno sebagai kaum kontrev (kontra revolusioner), komunisto fobi dan reaksioner, karena tidak berani melakukan kompetisi revolusioner. Terhadap AD, oleh PKI diluncurkan tuduhan bahwa pemimpinnya membentuk Dewan Jenderal yang mau mengkup Bung Karno.

Bung Karno secara sistematis dihasut bahwa para Jenderal tersebut. tidak dapat dipercaya maka adalah mendesak untuk dibentuk Angkatan ke V, dengan mempersenjatai buruh dan tani. Hasil Hasutan tersebut membuat sikap Bung Karno mendua. RRC politis mendukung usul PKI tersebut dan bersedia untuk membantu perseniataannya. Sikap mendua Bung Karno, dimanfaatkan dengan pengiriman senjata secara diam-diam dari Beijing ke Jakarta, baik dengan pesawat-pesawat Hercules maupun dengan kapal laut, yang dibaurkan dengan pengiriman barang-barang untuk Asian Games.

Semua usaha ekstra PKI tersebut dilakukan karena partainya belum siap dan merasa dirinya berada dalam keadaan kritikal, sejak diketahui sakitnya Bung Karno yang serius. Menyangkut rencana PKI terhadap Yani, Bandrio ter-

us mendukungnya sepanjang paralel dengan rencana dan keuntungannya sendiri, bahkan mengipas dan mendorongnya, agar PKI segera bertindak.

Didepan sidang para menteri bersama para panglima daerah dan para gubernur, (waktu itu unsur PKI sudah ada yang duduk da-lam kabinet menjadi menteri) Jenderal A Yani secara terus terang atas nama para panglima daerah menyatakan, menolak dibentuk-nya angkatan ke lima usulan PKI dengan mempersenjatai buruh dan tani. Dengan menarik pelajaran dari pengalaman tahun 45-an, adanya Biro Perjuangan-TNI-Masyarakat, hanya menimbulkan konflik dan perpecahan yang memperlemah bahkan merusak kekuatan nasional. A Yani juga menyatakan ketidak senangannya PKI diberi posisi di dalam kabinet.

Aidit tokoh muda PKI yang misterius. Sejak 1948 (*af-fair* Madiun) tertawan di Solo, dapat lolos dari tahanan di Solo, terus meloloskan diri ke luar negri, lewat Surabaya meskipun Surabaya dan sekitarnya diduduki oleh Inggris-Belanda. Aidit adalah sekelom-pok dengan Soemarsono (Ketua Pesindo yang melakukan prokla-masi negara Sovyet dari Madiun atas suruhan Van der Plas, maka dapat lolos sewaktu tahun 1948 terus ke Australia dan selanjutnya menjadi warga negaranya). Demikian pula Syam Kamaruzzaman adalah sekelompok dengan mereka itu. Dari peristiwa ini sudah je-las, siapa-siapa mereka itu ialah agen-agen Sekutu-Belanda mau-pun komunis.

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Aksi Militer ke II dengan penyerbuan ke wilayah Republik Indonesia tiga bulan sebelumnya yaitu pada tanggal 18 September 1948, Van der Plas menyuruh PKI berontak di Madiun (dengan proklamasi negara sovyet tersebut), guna memperlemah Republik Indonesia. Namun TNI berhasil menumpas pemberontakan PKI, bahkan Mr. Amir Syarifudin

anggauta jalur Van Mook (pernah jadi Perdana Menteri RI) tertawan didesa Klambu, Purwodadi Jawa Tengah, bersama-sama tokoh-tokoh PKI lainnya. Kecurangan Belanda dengan siasat adu domba dapat kita patahkan sebelum Belanda menyerbu wilayah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948 tersebut.

Setelah beberapa tahun di luar negeri, Aidit kemudian dapat diselundupkan kembali ke dalam negeri, berkat rekayasa Syam Kamaruszaman. Sejak datang kembali, karier politiknya dengan lancar dan cepat terus menanjak seperti diroketkan, hingga menjadi bos partai Sekjen PKI, Ketua Politbiro CC PKI (sebagaimana biasa-nya seseorang yang diorbitkan, selalu diatur kariernya).

Dengan melalui Van der Plas connection, pertama terlihat jalur lewat DR. Bandrio. Dia yang sangat berambisi untuk menggantikan kedudukan Presiden Soekarno (didukung oleh induk jaringanya), tetapi terhalang oleh Yani dan Nasution. (Dewan Revolusi yang dia sponsori mendapat dukungan hanya dari Utomo Ramelan-yang sejarangan dengan Bandrio dalam *Van der Plas Connection*).

Kedua adalah jalur PKI, atas rintisan Syam Kamaruszaman ber-sama DN Aidit dengan menciptakan kondisi-kondisi politik dengan strategi baru sehingga PKI yang belum siap terjebak didalamnya.

Ketiga adalah lewat Jenderal Soeharto yang melancarkan ope-rasi intel (menghapus jejak dengan cara menyinkirkan atau meng-habisi orang/organisasi yang telah berhasil mencapai tujuan atau sasarannya, seperti G30S yang seminggu setelah terjadi, di belakangkannya diberi label PKI, meskipun Letkol Untung termasuk jalur PKI, tetapi juga juga termasuk jalur Jenderal Soeharto).

Letkol Untung yang telah berhasil menghabisi para Jenderal anggauta Tim Pengusut MBAD kemudian juga dih-

abisi. Dan Perwira Tinggi yang telah melakukan mencuci *het vuile was* (melaksanakan pekerjaan kotor) masih beruntung hanya disingkirkan keluar negeri, mengingat dia adalah orang penting di Kostrad.

Van der Plas Connection adalah jaringan riil yang canggih, hanya anggota-anggota inti tertentu yang sadar akan keberadaannya sebagai anggota jaringan, lainnya adalah oknum-oknum oportunist tanpa sadar, sekedar sebagai alat saja. Jelaslah yang "punya gawe" G30S adalah: PKI, Soeharto, Soebandrio dan CIA.^{48***}



⁴⁸ Dikutip dari Mediakrasi.com.

Bab V

SUARA SUNYI KORBAN TAK BERDOSA

*"Sejarah, hanyalah catatan atas aneka kejahatan dan
kemalangan manusia."*

(Voltaire, 1694-1778)

SHADOW Play karya sutradara film Chris Hilton adalah gambaran catatan pilu sejarah Indonesia. Film tentang peristiwa G-30-S/PKI 1965 di Indonesia ini, membuka lagi genocida dahsyat sepanjang abad 20 lalu. Sebuah kurun waktu yang disebut sebagai zaman ekstrim. Menurut catatan sejarah, kebiadaban abad 20 berawal pada tahun 1904 saat penguasa Jerman membantai 65.000 orang di Selatan Afrika. Berturut-turut jutaan manusia tewas di era kekuasaan Hitler dan Stalin. Dari Eropa kekejaman menyebar ke Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Kaum Budhist dibantai di Tibet, etnis Hutu oleh kaum Tutsi di Burundi, kaum Indian di Gua-temala dan Paraguay, orang-orang Iho di Nigeria, Bengalis di Pakistan, Kamboja, Timor-Timur, anggota Baha'i di Iran, Kurdi di Irak, serta Muslim Bosnia. Indonesia ikut menyumbang kisah buruk itu melalui tragedi yang hingga kini masih menoreh Tak kalah dengan Hitler dan Stalin, Tragedi 1965 memakan korban yang tidak sedikit. Sekedar mengingatkan laporan para peneliti, jumlah korban disebut-sebut mencapai 60.000 hingga 400.000 jiwa; 500.000

jiwa; 200.000 jiwa. Sementara di masyarakat bahkan ada yang menyebut sampai jutaan orang.

Sepanjang abad 20 itu angka pasti jumlah jiwa yang melayang tidak pernah diketahui. Eric Hobsbawm menyebut 187 juta jiwa. Tapi Hobsbawm menulis sebelum pembantaian di Bosnia. PBB juga tidak berani menyebut angka yang pasti. PBB mendefinisikan *geno-cide* sebagai upaya penghancuran dengan sengaja suatu kelompok ras, agama, suku atau suatu bangsa. Dengan begitu pembunuhan massal berbasis kelas, jender dan kelompok politik tidak dianggap sebagai *genocide*.⁴⁹

Kesadaran sejarah menyangkut kebiadaban terhadap kemanusiaan, pertama-tama memang bukanlah soal statistik dan debat definisi. Ini adalah inspirasi agar kita tidak lagi membuat kesalahan yang serupa atas nama ideologi dan kekuasaan. Perang antara blok barat dan blok timur. Ketegangan politik internasional berimplikasi pada wajah politik nasional. Diam-diam, di antara kekuatan politik dominan Indonesia saat itu; PKI—Partai komunis berbasis massa jutaan orang, dan tentara (Angkatan Darat) saling berebut pengaruh. tindak-tanduk kekuatan-kekuatan asing yang sibuk men-cermati ketegangan-ketegangan ini. Peristiwa 1965 dalam konteks perseteruan dua negara adi daya AS dan Uni Soviet.

Antah-berantah politik bagi banyak orang mungkin menarik sebagai sebuah tontonan. Tetapi gairah politik, sering membuat lupa diri politikus. Trik, persekongkolan dengan ambisi kekuasaan, akhir-nya bermuara pada kesengsaraan insan manusia dan penderitaan para korban. ‘kebenaran utuh obyektif’ menyangkut tragedi kema-nusi-

⁴⁹ Fendry ponomban, Periset dari Off Stream Komunitas Media dan Dolumenter Jakarta.

aan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.⁵⁰

A. *Genocide* Skala Nasional

Pemberontakan PKI yang didalangi oleh beberapa pihak pada tanggal 30 September di Jakarta bukan hanya memberi pengaruh pada anggota PKI di daerah itu saja, namun mempengaruhi seluruh negeri. Pada pemberontakan gerakan PKI tahun 1926 pemerintah ko-lonial memberangus gerakan ini dengan membuang dan mem-bunuh pengikutnya. Kemudian pada pemberontakan PKI Madiun 1948 setelah dihancurkan juga disertai “pembersihan” yang diikuti dengan penumpasan sisa-sisa PKI di basis-basisnya di Blitar Sela-tan. Terakhir, pada masa Orde Baru, gerakan kiri lagi-lagi diper-salahkan atas tragedi Gestapu 1965. Ratusan ribu pengikut PKI (kali ini bukan hanya di satu daerah, tapi di hampir seluruh daerah di nusantara) ditangkap, dibuang, bahkan dibunuh secara biadab. Tengku Darwis Djeunieb (Ketika itu panglima GAM di Batee Iliek) memberikan himbauan yang intinya, “sejarah PKI di Aceh harus di-luruskan” terutama soal pemberangusan tahun 1965, yang menu-rutnya cukup banyak rakyat Aceh yang tidak tahu apa-apa menge-nai PKI menjadi korban pembunuhan dengan tuduhan sebagai anggota PKI dan simpatisannya. Ini menjadi tanggung jawab peme-rintah Indonesia.⁵¹

Hal ini adalah merupakan salah satu sudut pandang betapa masalah pemberangusan PKI di Aceh dan Indonesia pada umum-nya, telah menjadi sedemikian rupa, sehingga seperti lepas kendali dan jatuh korban begitu banyak, dan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sejarah G.30. S/PKI di Aceh perlu diluruskan, Serambi Indonesia, Banda Aceh, tanggal 4 Oktober 2000. Di dalamnya termuat komentar Tengku Darwis seperti disebutkan di atas.

termasuk mereka korban yang sia-sia tanpa ikut terlibat PKI. Sebanyak 3000 rakyat Aceh jadi korban, baik karena keterlibatannya maupun karena dianggap terkait atau terlibat dengan PKI. Ada juga yang salah tangkap, khususnya para penduduk di daerah pedalaman Aceh yang umumnya petani miskin. Bukan tidak mungkin mereka tertuduh karena menerima cangkul dari BTI, yang diplesetkan menjadi Barisan tani Islam pada-hal sebenarnya adalah BTI (Barisan Tani Indonesia). Selain itu se-mua bangunan, rumah, gedung atau kantor yang ada hubungannya dengan PKI. Semua itu juga rata dengan tanah karena diamuk mas-sa pada saat itu.

Sehari setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mengeluarkan surat perintah bernomor 1/3/ 1966 yang memuat tentang pembubaran serta pelarangan PKI dan organisasi *onderbouw*-nya di Indonesia. Inilah *coup d'état* sesungguhnya. Bersamaan ini, dimulai drama malapetaka kemanusiaan di Indonesia.

Di daerah-daerah seluruh Indonesia, kampanye pengga-nyangan PKI diwujudkan dengan tindakan penculikan dan pembu-nuhan secara massal terhadap anggota dan simpat-isan PKI. Se-mua anggota organisasi massa yang disinyalir memiliki hubungan dengan PKI pun tak luput mengalami hal serupa. Pembantaian dila-kukan kadang-kadang oleh tentara, kadang-kadang oleh sipil, orang-orang Islam atau lainnya. Di sini, tentara merupakan pendu-kung utama. Masyarakat merupakan unsur korban propangadis Angkatan Darat yang secara nyata memiliki konflik dengan PKI. Di beberapa tempat memang terjadi konflik antara PKI dan kelompok lain di kalangan masyarakat. Di Klaten mis-alnya, aksi pembantaian massal menjadi ajang balas dendam musuh-musuh PKI yang ber-kali-kali melakukan aksi sepihak penyerobotan lahan-lahan milik tuan tanah di

sana. Aksi sepihak ini berakibat bagi kemunculan be-nih-benih konflik di masyarakat. Pasca Gestapu 1965, PKI menjadi sasaran utama kebencian yang terpendam sekian lama.

Apa yang terjadi di Klaten tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jombang dan Kediri. Namun kedua daerah ini memiliki se-jarah konflik yang sangat kronis. Kaum komunis menuduh umat Islam telah mengobarkan “jihad” untuk membunuh orang komunis dan mempertahankan tanah miliknya atas nama Allah, sedangkan umat Muslim menuduh PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Saling tuduh ini merupakan manifestasi konflik kepentingan di antara dua kelompok. Bagi PKI, tanah merupakan komoditi politik-ekonomi yang dapat dijadikan alasan untuk menyerang kaum Muslim sebagai penguasa tanah mayoritas. Sedangkan kaum Muslim menggunakan isu ideolo-gis atheis terhadap PKI untuk menyerang balik. Dua hal ini memang berujung pada kepentingan ekonomis. Namun, dengan keyakinannya masing-masing, kedua kelompok ini berhasil membangun se-buah opini yang mengarahkan pengikutnya pada titik temu konflik berkepanjangan. Keduanya sama-sama ngotot.

Berbeda dengan di Jombang, Kediri dan Klaten, di Purwodadi, pembunuhan massal lebih tepat dikatakan sebagai bagian dari genosida yang dilakukan oleh militer terhadap massa PKI. Di daerah lain yang menjadi ladang pembantaian, tentara hanya bermain sebagai sponsor di belakang kelompok agama dan sipil. Sementara di Purwodadi, tentara memegang peranan aktif dalam pembunuhan massal. Purwodadi ialah sebuah kota kecil yang terletak 60 Km di sebelah Tenggara Semarang. Purwodadi ialah ibukota Kabupaten Grobogan. Daerah ini merupakan salah satu basis

komunis terbe-sar di Jawa Tengah. Amir Syarifudin, tokoh komunis yang terlibat dalam *Madiun Affairs* tahun 1948, pun tertangkap di daerah ini.

Kasus Purwodadi sempat mencuat ketika pada tahun 1969, H.J.C Princen, seorang aktivis kemanusiaan, berkunjung ke Purwodadi. Dengan disertai Henk Kolb dari Harian *Haagsche Courant* dan E. Van Caspel⁵², Princen meninjau secara langsung keabsahan be-rita pembunuhan massal yang didengarnya dari seorang pastor. Adalah Romo Wignyo-sumarto yang kali pertama menyampaikan adanya pembunuhan besar-besaran ini. Romo Sumarto melaporkan berita tersebut pada Princen setelah ia mendengarkan penga-kuan dari seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan massal. Digunakannya unsur Hanra dalam pembunuhan massal sangat dimungkinkan karena lebih mudah di-organisir dan dikendalikan secara langsung oleh tentara setempat. Tak terjadinya konflik *horizontal* di Purwodadi menyebabkan militer harus turun tangan langsung untuk melakukan pembunuhan massal. Di Jombang, Kediri dan Klaten, tentara hanya menyuplai sen-jata bagi kelompok-kelompok sipil. Selanjutnya mereka hanya mem-berikan dukungan-dukkungan baik dalam penangkapan maupun da-lam hal penahanan Anggota dan Simpatisan PKI.

Pembunuhan dan penangkapan Anggota dan Simpatisan PKI di Purwodadi dibagi kedalam dua periode. Pertama, ialah penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan tahun 1965. pada peristiwa ini ukuran penangkapan ialah jelas, artinya militer hanya menangkap mereka yang memiliki indikasi anggota PKI aktif beserta anggo-ta-anggota organisasi *onder-bouw* PKI. Penangkapan periode per-tama lebih mem-perlihatkan bagaimana militer melakukan strategi

⁵² *Sinar Harapan*, 3 Maret 1969.

penghancuran se-cara sistemik terhadap PKI. Organisasi yang me-miliki hubungan dengan PKI atau apa pun itu sepanjang berbau ko-munis dapat dipastikan ditangkap. Ini memang cara yang paling efektif kendati jumlah korban tentu sangat banyak.

Dengan cara ini penguasa Orde Baru dapat meminimalisir ancaman komunisme. Perang terhadap penganut Marxisme ini memang lebih rumit dari sekedar anti-komunisme.⁵³ Dari sudut pandang mana pun terlihat jelas jika Orde Baru beru-saha membangun se-buah konstruk kekuasaan tanpa aroma komunisme sedikit pun.

Periode kedua, penangkapan dan pembunuhan massal yang dilakukan pada tahun 1968. Pada periode ini, ukuran penangkapan sangat tidak jelas, serba semrawut dan serba asal-asalan. Hanya karena menjadi anggota Partai Nasional Indonesia –faksi Ali Sastroamidjojo- Surachman– militer sudah dapat menangkapnya. Penangkapan ini dikenal sebagai penangkapan terhadap Soekarno – Sentris atau dikenal sebagai SS.⁵⁴

Operasi penangkapan pada tahun 1968 ini dilakukan di bawah Komandan Komando Distrik (Kodim) 0717 Purwodadi dengan di-bantu Batalyon 404 dan 409. Operasi ini diberi nama Operasi Kikis. Melalui operasi inilah seluruh anasi-anasir kekuatan komunis dan Orde Lama (SS) ditangkap.

⁵³ Memorandum Intelegen CIA, "Indonesian Army Attitudes toward Communism" Directorate of Intelligence, *Office Current Intelligence*, 22 November 1965, case #88-119, Doc. 119, butir 1.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak S., seorang Sekretaris Sarekat Buruh Kereta Api (SBKA) Stasiun Purwodadi. SBKA, menurut versi Orde Baru, adalah onderbouw PKI. Bapak S., mengatakan bahwa penangkapan dan pembunuhan yang paling besar justru terjadi pada tahun 1968. Tentara dapat menangkap orang-orang hanya karena menjadi anggota PNI Ali Sastroamidjojo – Surachman (PNI-ASU) atau motif dendam lainnya.

Tak jelas apa motivasi penangkapan terhadap orang-orang SS ini. Namun ini dapat dipahami sebagai usaha untuk mengikis ke-kuatan Orde Lama. Di pusat kekuasaan, Soeharto sedang ber-usa-ha untuk mengukuhkan kekuasaanya. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, kekuatan anti Orde Baru tentu menjadi penghalang bagi kekuasaanya.

Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang yang dianggap komunis ini didesain sebagai massa mengambang atau *floating mass*. Mereka tak dibiarkan memasuki sebuah organisasi politik tertentu selama kurun waktu lima tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu),⁵⁵ namun suara mereka dapat dipastikan disalurkan melalui Golongan Karya (Golkar). Konsep massa mengambang sendiri ia-lah sebuah konsep yang diajukan oleh Mayjen Widodo, Panglima Kodam VII/ Diponegoro Jawa Tengah. Lalu konsep ini dikembangkan oleh pemikir dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga *think-tank* Orde Baru yang berdiri pada ta-hun 1971 atas sponsor Ali Murtopo dan Soedjono Hoemardani, dua orang jenderal yang memiliki hubungan spesial dengan Soeharto. Tak berlebihan jika kasus di Purwodadi dapat dikategorikan ke dalam tindakan genosida. *Genocide* menurut Helen Fein adalah suatu strategi berupa pembunuhan, bukan semata-mata karena benci atau dendam, terhadap sekelompok orang yang bersifat ras, suku, dan politik untuk meniadakan ancaman dari kelompok itu terhadap keabsahan kekuasaan para pembunuh.

Penangkapan dan pembunuhan massal pada tahun 1968 ini banyak menimbulkan korban. Banyak mereka

⁵⁵ General Widodo maintained that party activity in the villages disrupted the hard work and unity necessary for development. Far better to let the population 'float' without party contact in the five year period during elections....diskusi lebih lanjut lihat Hamis McDonald dalam *Suharto's Indonesia* (Blackburn, Victoria: Fontana Books, 1980), hal. 109.

yang tak mengetahui apa pun tentang politik ditangkap bahkan dibunuh. Contohnya se-perti apa yang diungkapkan oleh Bapak SP. “Saya hanya pemain sandiwara Ketoprak pedesaan. Namun, saya ditangkap karena saya dianggap memiliki hubungan dengan Lekra. Oleh karena itu saya sempat mendekam di Penjara Nusa Kambangan selama 3 tahun. Di sebuah Kamp di Pati, saya dipaksa untuk mengakui bah-wa saya anggota PKI.”. Ini membuktikan ekses negatif pada sebuah operasi militer. Hal serupa pernah diungkapkan oleh Ali Murtopo, ia mengatakan jatuhnya korban pembunuhan massal di Purwodadi ialah sebuah konsekuensi dalam sebuah operasi militer. Operasi militer merupakan salah satu usaha yang digunakan tentara Indonesia dalam mengontrol, memperkuat dan memberikan sebuah ukuran kesetiaan bagi pemerintah pusat. Operasi ini kerap dilaku-kan dalam rangka menumpas gerakan perlawanan daerah terhadap pusat. Penguasa Pusat (Baca: Jakarta) memposisikan sebagai kos-mis kekuasaan Raja sementara daerah ditempatkan sebagai Ka-wula. Hal ini merupakan hasil dari interdependensi antara kekayaan dan politik dalam masyarakat tradisional. Jelas sebuah operasi mili-ter memiliki arti strategis dalam menjaga kekuasaan pusat atas kekayaan daerahnya.

Kebijakan operasi militer di Purwodadi tidak terlepas dari peran-an komandan Kodim 0717 sendiri sebagai penguasa militer setem-pat. Letkol Tedjo Suwarno, Komandan Kodim dikenal sebagai orang yang keras dan berambisi. Atas perintahnyalah ratusan orang di-tangkap selama tahun 1968. Pada waktu itu banyak perwira-perwira yang menumpuk kekayaan hasil dari uang sogok kerabat tahanan tahanan. Di waktu selanjutnya sudah menjadi kebiasaan jika se-orang penguasa militer merupakan pelindung yang ampuh untuk apa pun. Seorang pengusaha misalnya, ia dapat bebas berdagang di sebuah daerah dengan

meminta *backing* pada penguasa militer setempat bukan isapan jempol jika penguasa militer di daerah me-miliki pengaruh besar.

Figur kepemimpinan militer di daerah seperti halnya di Purwodadi memang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Di masa Orde Baru, sudah menjadi kebiasaan jika seorang Komandan Kodim (Dandim) diangkat menjadi Bupati. Ini dilakukan atas pertimbangan kemandirian dan realisasi dari Dwi Fungsi ABRI.

Fenomena tersebut dikenal sebagai konsep kekaryaan ABRI. Konsep ini diperuntukan bagi perwira militer yang karirnya mentok atau tak lagi memiliki kesempatan menapaki jenjang karir yang lebih tinggi. Para perwira ini biasanya diplot menjadi kepala daerah baik di tingkat I atau II. Orde Baru menciptakan kategori daerah-daerah tertentu bagi penempatan perwira-perwira mentok ini.

Pada masa Orde Baru, Penguasa militer di daerah, dari Tk I hingga II atau bahkan tingkat Komando Rayon Militer (Koramil) berusaha dengan keras menciptakan suasana aman dan stabil. Maka ukuran kestabilan keamanan pasca Gestapu 1965 ialah dengan mencegah timbulnya kembali kekuatan komunisme di Indonesia.

Ada kesan dengan menahan sebanyak-banyaknya massa PKI merupakan prestasi tersendiri. Dengan cara ini kondisi sosial-politik setempat dinyatakan stabil dan terkendali. Pemerintah Orde Baru menganggap komunisme ialah musuh yang paling utama dalam pembangunan. Selama hampir 32 tahun, bahaya laten komunis didengungkan-dengungkan sebagai sebuah momok yang menakutkan. Ini ditunjukkan dengan cara memutar film *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia* atau *G.30.S/PKI* yang disutradarai oleh Arifin C. Noor setiap tahunnya.

Kekhawatiran yang teramat sangat pada komunis

(*komunisto phobia*) memang terlihat begitu jelas inheren pada masa Orde Baru. tak hanya itu, pemerintah Orde Baru tak segan-segan melemparkan stigma PKI pada organisasi-organisasi yang berlawanan dengan kebijakannya. Kasus 27 Juli 1996 memperlihatkan secara jelas usaha Orde Baru dalam membangkitkan ketakutan masyarakat akan komunisme.

Penahanan ribuan anggota dan simpatisan PKI selama kurun waktu 1965-1980-an (dalam beberapa kasus bahkan hingga masa Reformasi tiba) juga bagian dari usaha Orde Baru mencegah penulisan komunisme pada masyarakat. Tahanan politik ini dibuang di Pulau Buru, Nusa Kambangan dan penjara-penjara di tiap daerah. Tak ada itikad dari Orde Baru untuk melepaskannya. Segera setelah mendapatkan tekanan internasional, khususnya Amnesti Internasional, pemerintah Orde Baru melepaskan beberapa tahanan politik dengan klasifikasi A, B dan C. Pemerintah memiliki berbagai dalil dalam aksi penahanan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Pada tahun 1975, Pangkopkamtib Laksamana Sudomo mengatakan bahwa pelepasan tahanan politik di saat itu merupakan ancaman bagi kestabilan nasional.

Penahanan atas anggota dan simpatisan PKI tidak saja menyisakan trauma mendalam⁵⁶ bagi mereka namun keluarganya juga harus menghadapi kenyataan hidup yang serba kekurangan. Di Purwodadi banyak keluarga yang hidup dalam kesederhanaan akibat penahanan dan pembunuhan terhadap anggota keluarganya yang dituduh anggota maupun simpatisan PKI. Bahkan di sebuah desa di Purwodadi, dikenal sebagai “kampung janda” karena

⁵⁶ Untuk lebih lengkap periksa Liem Soei Liong, *It's the Military, Stupid!* Dalam Freek Colombijn dan Thomas Lindblad (ed) et.al., *Roots of Violence In Indonesia* (Leiden: KITLV, 2002), hal. 199.

suami-suami mereka diciduk oleh militer.

Hingga kini tak dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah korban yang meninggal dalam peristiwa pembunuhan massal di Purwodadi dalam kurun waktu tahun 1965-1968. H.J.C Princen mengatakan bahwa korban tewas ada sekitar 850-1000 orang. Sementara itu menurut perhitungan Maskun Iskandar, seorang wartawan harian *Indonesia Raya*, korban berkisar 6.000 jiwa. Berapa pun jumlahnya, satu nyawa manusia yang hilang merupakan dosa yang tak terampuni. Maka penegakan hukum ialah jawabannya untuk menghindari perulangan peristiwa serupa. Penderitaan tidak berakhir begitu saja. Setelah para tahanan politik pulang dari pembuangan di pulau Buru, Nusa Kambangan atau penjara lainnya, aparat militer masih saja melakukan pengawasan pada diri mereka dan keluarganya. Bapak Rk, seorang tahanan politik jeblon Pulau Buru menceritakan bagaimana dirinya diintimidasi oleh aparat setelah pulang dari Pulau Buru pada tahun 1979. "Sepulangnya dari Pulau Buru, saya membuka praktek sebagai mantri. Obat-obatan yang saya bawa dari Pulau Buru saya gunakan untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan. Namun karena hal tersebut, Koramil menda-tangi saya dan memanggil saya untuk diinterogasi". Pengawasan yang extra ketat ini memang diberlakukan bagi mantan tahanan politik. Salah satu cara untuk memantau gerak gerik mereka pemerintah Orde Baru menetapkan untuk memberi tanda khusus Ex Tapol (ET) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) para mantan tahanan politik. Tindakan lainnya, selama Orde Baru, keluarga mantan tahanan politik tidak diperkenankan memasuki dunia politik atau menjadi pegawai negeri. Untuk yang satu ini pemerintah menetapkan Penelitian Khusus (Litsus) kepada calon pegawai negeri. Seorang mantan tahanan politik pernah mengatakan sebuah lelucon bahwa label ET dalam

KTP-nya bukan berarti Ex-Tapol tapi tidak lain adalah “elek terus”

Pemberitaan mengenai pembunuhan massal dalam pembersihan PKI dan antek-anteknya bukan hanya tersebar di Indonesia, namun juga tersiar ke manca negara. *Time Magazine* pada tanggal 17 Desember 1965 melaporkan bahwa “Ribuan pengikut-pengikut PKI beserta keluarga mereka telah dibunuh secara massal. Setelah diinterogasi dan terbukti terlibat, bukan hanya TNI tapi juga rakyat mengeksekusi ribuan dari anggota PKI. Contohnya, dengan bersen-jatakan parang, sekelompok muslim mendatangi rumah para ang-gota partai komunis, membunuh seluruh keluarga mereka kemu-dian menguburkannya dalam kuburan dan *The New York Maga-zine* pada tanggal 8 Mei 1966 melaporkan bahwa ada suatu seko-lah di sebuah desa dekat Yogyakarta di mana sang guru mengata-kan bahwa anak didiknya dibawa oleh tentara. Keluarga anak itu di-tuduh terlibat PKI dan merupakan anggotanya. Kemu-dian tentara menembaki seluruh anggota keluarga tersebut. Baik sang ayah yang anggota PKI maupun sang istri dan anak mereka yang masih kecil. Sangat mengerikan.

Di Bali yang merupakan daerah tercepat dimana organisasi PKI berkembang pembunuhan massal dilakukan tanpa pandang bulu sehingga akhirnya Angkatan bersenjata mengambil langkah untuk mengendalikannya.

"The murder campaign became so brazen in parts of rural East Java that Moslem bands placed the heads of victims on poles and paraded them through villages. The killings have been on such a scale that the disposal of the corpses has created a serious sanitation problem in East Java and Northern Sumatra where the humid air bears the reek of decaying flesh. Travellers from those areas tell of small rivers and streams that have been literally clogged with bodies. River transportation has at places been seriously impeded."

Berkenaan dengan aksi pembantaian terhadap mereka yang di-indikasikan anggota dan simpatisan PKI, permasalahan yang muncul berada di seputar keakuratan jumlah korban pembantaian. Robert Cribb memperkirakan jumlah korban berkisar antara 78.000 jiwa hingga 2 juta jiwa. John Hughes, dalam bukunya *"Indonesian Upheaval"* (1967), memprediksikan antara 60.000 hingga 400.000 orang. Donald Hindley, dalam tulisannya, *"Political Power and the October 1965 Coup in Indonesia"* (1967), memperkirakan sekira setengah juta orang. Guy J. Pauker, dalam tulisannya, *Toward A New Order in Indonesia* (1967), memperkirakan sekira 200.000 orang, sedangkan Yahya Muhaimin, dalam bukunya, *"Perkembangan Mili-ter dalam Politik di Indonesia 1945-1966"* (1982), memprediksikan sekira 100.000 orang. Khusus untuk Jawa Barat, tanpa menyebut angka, Ulf Sundhaussen, dalam bukunya, *"The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967"* (1982), mengatakan bahwa dari seluruh anggota komunis yang dibunuh di Jawa Barat, bisa jadi hampir seluruhnya dibantai di Subang.

Sebuah sumber dari CIA mengatakan bahwa "Dalam hal jumlah orang yang terbunuh dalam peristiwa pembunuhan massal anti-PKI di Indonesia, Indonesia menempati salah satu peringkat dalam pembunuhan terburuk sepanjang sejarah abad 21."

B. Kuburan Massal G30S/PKI

Dari polemik antara Menhankam/Pangab dengan tim Komnas HAM telah muncul ke permukaan masalah kuburan massal G30S PKI. Padahal selama ini ditutup-tutupi oleh pejabat. Sampai-sampai dalam Buku Putih (G30S Pemberontakan PKI) yang diterbitkan tahun 1994 tidak disinggung sama sekali tentang adanya kuburan massal G30S/ PKI.

Dalam arti tertentu dimunculkannya masalah ku-buran massal G30S/PKI oleh mantan Menhankam/Pangab Wiranto, banyak sedikitnya akan mendorong saksi sejarah yang menyaksi-kan pembantaian massa anggota dan simpatisan PKI di tahun 1965/1966 akan menuliskannya, baik melalui media massa atau lainnya.

Karena itu adalah sangat menarik cerita seram Pendeta Johannes Tua Boro S.Th tentang penjagalan manusia di NTT tahun 1965.⁵⁷ Tampaknya massa anggota dan simpatisan PKI yang diban-tai pada tahun 1965 itu, bukan saja di Aceh yang dilemparkan ke laut, tetapi di NTT pun ada yang demikian. Pendeta Johannes Tua Boro S.Th mengatakan dengan terungkapnya peristiwa berdarah/ pembantaian di Aceh, Santa Cruz, Tanjung Priok, Lampung dll, maka perlu juga peristiwa berdarah secara massal, sejumlah kurang lebih 2-3 juta orang dalam Peristiwa G30S/PKI juga harus diungkapkan secara terbuka, sesuai tuntutan pelaksanaan refomasi secara transparan dan menyeluruh.

Kalau peristiwa berdarah di Aceh karena menuntut memisah-kan diri dari wilayah RI, dan dianggap mengkhianati cita-cita Prok-lamasi 17 Agustus 1945, tetapi mengapa sehingga mereka dibunuh secara massal? Maka demi hukum dan HAM kasus itu diungkap ke permukaan. Mengapa pembunuhanmassal G30S/PKI yang dituduh anti Pancasila dan UUD 1945 tidak dipermasalahkan atau ditutup-tutupi? Padahal belum tentu tuduhan itu benar berlaku atas mereka, karena saksi kunci Aidit dan Untung tidak diadili secara terbuka sebagaimana mestinya.

Padahal Pendeta Johannes anti-PKI, namun mendambakan ke-adilan hukum, perlindungan HAM bagi setiap orang, sesuai dasar Pancasila, keadilan sosial, keadilan hukum dan peri kemanusiaan yang adil dan beradab

⁵⁷ *Swadesi* (No 1545/th XXX/Agustus 1998)

ditegakkan. Manusia membunuh sesama manusia yang tidak berdasarkan hukum, atau hanya didorong den-dam kesumat karena kuasa adalah berlaku hukum rimba, seperti perilaku binatang di hutan tanpa hukum.

Perlu diketahui kata Pendeta Johannes bahwa pemerintah pusat untuk menindak mereka yang terlibat dalam Peristiwa G30S/PKI adalah Instruksi KOTI No 022/XII/65, bulan Desember 1965, yang isinya bahwa mereka yang terlibat ditentukan 3 klasifikasi, yaitu A, B, dan C.

Klasifikasi A dipidanakan, yaitu bagi mereka yang terlibat langsung seperti Untung beserta anggota pasukan Cakrabirawa dan lain-lain. Klasifikasi B adalah mereka yang mengetahui rencana gerakan, namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, dikenakan pemberhentian sementara dari tugas jabatannya (*diskor-sing*). Sedang bagi mereka yang berklasifikasi C, hanya diindok-trinaskan beberapa waktu (semacam pembinaan mental).

Dengan adanya Surat Perintah 11 Maret 1966, maka Soeharto telah bertindak menyimpang dari instruksi KOTI itu dan membabat secara membabi buta, baik dari klasifikasi A, B, dan C, termasuk orang yang tidak tahu menahu sama sekali. Yang sangat kasihan ialah bagi anggota biasa di desa-desa tanpa diproses secara hukum langsung ditangkap dan dijagal begitu saja. Bukan saja anggota dan simpatisan PKI yang dibabat, orang-orang yang dicurigai sebagai aktivis Bung Karno, orang-orang PNI dan Partindo yang kena pembabatan massal tanpa proses hukum. Di provinsi NTT saja terbabat massal pada waktu itu sejumlah kurang lebih 10-20 ribu orang.

C. Pelaksanaan Pembabatan Anggota PKI

Menurut Pendeta Johanes cara pelaksanaan pembabatan di NTT bervariasi. Ada yang dibuang hidup-hidup di tengah laut se-telah lehernya digantungkan batu untuk mudah tenggelam, ada yang dipenggal batang lehernya, ada yang ditembak dengan sen-jata api, belum mati didorong masuk ke dalam lubang kubur, ada yang dipotong kemaluannya lalu disuruh memakannya.

Di kota Ende/Flores seorang aktivis PKI dibakar hidup-hidup. Rakyat kota Ende dikerahkan oleh Kodim untuk datang berduyun-duyun buat menonton drama maut yang mengerikan itu.

Di kabupaten Sikka/Flores Timur dalam satu daerah Kecamatan semua lelaki tua muda besar kecil semua dibabat rata, yang dibiarkan hidup wanita saja. Di kampung Mangulewa Dati II Ngada, lima orang pencuri kerbau dilibatkan lalu ditembak oleh tentara dan rakyat disuruh menyaksikan *live-show* itu.

Pelaksanaan teknis penganyangan/pembabatan di NTT umumnya dan kota Kupang khususnya sebagai berikut: Asal ada laporan dari masyarakat dengan berbagai motif ke Kodim, malam-malam orang-orang yang dilaporkan itu dijemput tentara dibawa ke Kodim, rumah-rumah tahanan Pelelrada, Kantor Resor Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk ditahan, untuk diperiksa atau diinterogasi.

Setelah tiba saat pembabatan massal, mereka dikeluarkan dari sel-sel dan rumah tahanan menghadap ke kantor Kodim, di sana diatur secara berbaris, bergiliran mencap jari mereka dengan tinta stempel dengan ibu jari kanan di atas kertas putih bagian kanan bawah yang masih kosong.

Selanjutnya mereka yang sudah mencap jarinya pindah ke kamar lain untuk ditutup matanya dengan kain hitam

segitiga, ke-mudian dinaikkan ke atas truk-truk terbuka, disaksikan oleh rakyat banyak, lalu truk-truk itu meluncur ke arah luar kota. Di atas truk tubuh mereka disilet oleh pengawal lalu luka-luka mereka ditetesi perasan air jeruk nipis, sehingga orang-orang tawanan yang sedang menuju lobang maut itu berteriak histeris kesakitan. Kertas yang sudah dicap itu ditulis pengakuan-pengakuan palsu.

Setelah rombongan tahanan itu tiba di pinggir lubang, mereka ditembak atau dipenggal batang lehernya, walaupun belum mati mereka diseret ke lubang kubur dan ditutup seadanya. Di Maumere, seperti diceritakan di atas, bau mayat melanda desa-desa dan kota, karena kepala yang dipenggal dikubur tidak dalam, sehingga dibawa anjing ke sana ke mari.

Di Tarus, sebuah desa terletak lebih kurang 10 km dari sebelah Timur kota Kupang, wanita-wanita yang dituduh Gerwani ditahan dalam satu ruangan, diperkosa oleh tentara seenaknya, lalu dinaikkan ke atas truk, dibawa untuk dijagal.

Salah satu desa di Dati II So'e Timur Tengah Selatan, ada seorang ibu dituduh Gerwani, dibawa ke pinggir lubang kubur. Sebelum ia dipenggal batang lehernya, ia sempat memeras air tetek di telapak tangannya untuk meminumkan bayinya yang baru berumur 3 bulan.

Dampak peristiwa gerakan 30 September yang menyebabkan pemberangusan massal atau *genocide* bukan saja mengakibatkan banyak nyawa melayang, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah dampaknya bagi yang hidup. Keluarga dari orang-orang yang ter-sangkut PKI ataupun orang-orang yang pada saat itu dianggap ter-libat dengan PKI meski tidak tahu banyak tak urung mendapat getahnya. Di antaranya adalah para dosen UI yang diberhentikan untuk sementara karena terlibat dalam peristiwa GESTAPU,

mereka menolak keputusan Rektor UI no. 040/SK/BR/65, tgl 23 Oktober 1965.⁵⁸

Dr. Sumijarsi adalah dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang terlibat dalam petualangan kontra-revolusioner G-30-S. Berhubung dengan itu maka seluruh mahasiswa FK UI menuntut ke-pada Dekan agar mengeluarkan dr. Sumijarsi karena perbuatannya yang mengkhianati Negara Pancasila.⁵⁹ Dalam rangka membersihkan Universitas Indonesia (UI) dari oknum-oknum yang baik secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dalam apa yang menamakan diri "Gerakan 30 September". Rektor Universitas Indonesia memutuskan bahwa bagi para staf pengajar UI anggota HSI (Himpunan Sarjana Indonesia) telah dibebaskan untuk sementara dari jabatannya.⁶⁰ Mereka berasal dari semua kegiatan politik atau yang mengarah ke-pada politik, bagi semua dosen, Asisten, Pimpinan, semua pegawai Tata usaha, Panitia-panitia, dan bagian-bagian Tata usaha yang menjadi anggota PKI dan semua organisasi yang berkaitan dengan Gestapu.⁶¹

Rektor ITB Kol. Kuntoadji telah memutuskan membekukan PKI dan semua organisasi mantelnya yang ada di lingkungan ITB serta memecat sementara semua anggota-anggotanya yang berstatus sebagai mahasiswa, karyawan dosen non dosen dari kedudukannya di lingkungan ITB.⁶² Sejumlah 227 mahasiswa dari berbagai fakultas dalam lingkungan Unpad telah diberhentikan untuk sementara, terhitung mulai tanggal 1 Nopember yang lalu, dalam

⁵⁸ *Kompas*, 29 November 1965.

⁵⁹ *Kompas*, 21 Oktober 1965.

⁶⁰ *Kompas*, 4 November 1965

⁶¹ *Kompas*, 8 November 1965.

⁶² *Kompas*, 8 November 1965.

rangka pembersihan taraf pertama akibat petualangan politik "G-30-S". 25 Dosen/asis-ten Unpad dan 17 karyawan Unpad telah diberhentikan.⁶³

Pada tanggal 20-1-1965, dihalaman depan Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada di Bulaksumur Yogyakarta telah dilangsungkan upacara penutupan Indoktrinasi khusus bagi para Dosen, Asisten, Pegawai dan Mahasiswa yang secara tidak langsung tersangkut dalam "G-30-S" dan selama ini dinonaktifkan.⁶⁴ Enam orang dosen dari universitas Gajah Mada, berdasarkan keputusan dari Dewan Penyantun, telah dipecat dan dicutikan. Nama-nama mereka itu pernah diajukan oleh KAMI Yogyakarta kepada Rektor dan Dewan Penyantun Gama, agar dipecat. Seorang dari 6 dosen itu, yakni Purbadi SH dari fakultas hukum.⁶⁵

PB. PGRI Kongres pimpinan Subiadinata Jusuf menjelaskan bahwa memang ada Guru yang terlibat didalam Peristiwa kontra revolusioner apa yang disebut G-30-S. Juga diketahui adanya Guru yang terlibat dalam perbuatan keji di Lubang Buaya.⁶⁶ Setelah diselidiki ternyata mereka itu adalah aktivis.⁶⁷ Dari jumlah 120.000 orang guru Sekolah Dasar di daerah Jawa Tengah yang terlibat peristiwa kontrev Gestapu/PKI, setelah *discreen* dengan teliti ternyata 58.000 orang yang nyata-nyata terlibat Gestapu/PKI. Menurut Inspeksi PDK Jawa Tengah, Sumadi mereka yang positif terlibat Gestapu/PKI.⁶⁸ Karena itu tidak kurang dari 25.000 orang guru di Indonesia yang diberhentikan atau diamankan karena terlibat dalam petualan-

⁶³ *Kompas*, 26 November 1965.

⁶⁴ *Kompas*, 3 Februari 1966.

⁶⁵ *Kompas*, 9 Juni 1966.

⁶⁶ *Kompas*, 23 Oktober 1965.

⁶⁷ *Kompas*, 7 Oktober 1966.

⁶⁸ *Kompas*, 17 Desember 1966.

gan Gestapu/PKI.⁶⁹

Di seluruh daerah dilakukan pembersihan guru, karena dikhawatirkan bahwa mereka akan doktrin PKI pada murid-muridnya. Bahkan buku "*civics*" karya Supardo Sh yang anggota PKI juga dilarang. Untuk mengisi kekosongan dan sambil menunggu terbitnya buku pegangan guru mengenai kewarga negaraan yang baru, Menteri PDK dalam surat keputusannya menetapkan untuk mengganti buku pegangan guru mengenai kewargaan negara "Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia" ("*Civics*") karangan Supardo S.H.⁷⁰

Sementara itu 221 guru dari 1400 orang tenaga pendidik telah dipecat dari seluruh daerah dikabupaten Sukoharjo, Surakarta yang meliputi 245 Sekolah Dasar negeri, subsidi dan swasta, berkenaan dengan terlibatnya dalam G-30-S. Untuk mengisi kekosongan tersebut, telah dapat dimasukkan tenaga-tenaga pendidik baru.⁷¹ Dari jumlah 120.000 orang guru Sekolah Dasar di daerah Jawa Tengah yang terlibat peristiwa kontrev Gestapu/PKI, setelah *discreen* dengan teliti ternyata 58.000 orang yang nyata-nyata terlibat Gestapu/PKI. Menurut Inspeksi PDK Jawa Tengah, Sumadi mereka yang positif terlibat Gestapu/PKI.⁷²

Permohonan beslit kenaikan golongan guru yang telah dikirimkan ke Departemen P dan K sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, ternyata banyak yang hilang terutama yang berasal dari daerah. Menanggapi berita sementara pers yang bersumber pada PAB mengenai "Permohonan Beslit Kenaikan Golongan Guru-guru Banyak yang Hilang" Departemen P dan K menjelaskan kemarin bahwa

⁶⁹ *Kompas*, 20 Maret 1967.

⁷⁰ *Kompas*, 19 Februari 1966.

⁷¹ *Kompas*, 7 Oktober 1966.

⁷² *Kompas*, 17 Desember 1966.

memang beberapa usul kenaikan tingkat para guru dan pegawai lenyap terutama yang diajukan sekitar tahun 1966.⁷³

Operasi pembersihan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata bukan hanya terjadi di kota-kota atau desa-desa tetapi juga masuk ke dalam hutan atau bahkan luar negeri. Dibawah pimpinan Letnan Kardiat berhasil membersihkan pemusatan gerombolan PKI disekitar hutan-hutan Kombi (Tondano). 3 Orang anggota gerombolan PKI antaranya L. Watuseke bekas Kepala Penjara Tondano tewas dalam penyer-buan.⁷⁴ Seekor beruk di daerah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Pariaman, membantu massa rakyat untuk mering-kus sisa gerombolan "Gestapu/PKI", yang melarikan diri ke hutan-hutan sejak gagalnya kudeta PKI. Massa rakyat melihat antek "Gestapu/PKI" itu memanjat pohon kelapa.⁷⁵ Tiga gembong kontrev Gestapu/PKI masing-masing (ketua Gerwani Bengkulu Selatan), E. Ridwan (Sekretaris CR PKI Palak Bangkarun) dan Kamaluddin anggota BTI Bengkulu Selatan Sumsel yang sejak tgl. 13 Oktober 1965 melarikan diri masuk hutan, pada 3 Oktober telah ditangkap oleh Koramil Pagar Agung di Bengkulu.⁷⁶ "Ngalah, ngalah, ngalas, ngantem" merupakan doktrin baru PKI yang berhasil diketahui, setelah disitanya beberapa dokumen PKI. "Ngalah" (mengalah) - bukan berarti kalah - dengan jalan "ngalah" (berpindah tempat), kalau perlu "ngalas" (masuk hutan) untuk kemudian menyusun kekuatan di hutan.⁷⁷

17 Wartawan buronan bekas anggota Persatuan Wartawan Indonesia berkeliaran di luarnegeri sejak kudeta yang

⁷³ *Kompas*, 11 Agustus 1970.

⁷⁴ *Kompas*, 19 Maret 1966.

⁷⁵ *Kompas*, 12 April 1966

⁷⁶ *Kompas*, 4 November 1966.

⁷⁷ *Kompas*, 14 April 1967.

gagal awal Oktober 1966, dikabarkan telah membuat pernyataan yang telah dimasukkan oleh seorang "penyumbang istimewa" kedalam harian Belanda "*Algemeen Handelsblad*"⁷⁸ Kemudian KBRI di Bukarest (Rumania) juga mencabut paspor 13 orang mahasiswa Indonesia yang memberikan bantuan kepada gerakan-gerakan G30S/PKI di Luar Negeri. Pencabutan paspor terhadap pembantu2 G30S/PKI juga dilakukan negara Eropa Timur lain seperti Sofia, Warsawa, Praha.⁷⁹

D. Peninjauan Kembali Sejarah Kekejaman PKI

Penting untuk menyelidiki sejarah peristiwa tahun 1965. Sebuah bukul yang berisi sajak dari Magusig O. Bungai yang berjudul "Anak Naga dan Tahun-Tahun Pembunuhan". Yang isinya bahwa hutan pun bukan lagi di mana rahasia bisa berlindung, Magusig O. Bungai menulis tentang pembunuhan massal antas perintah Stalin.

"50 tahun berlalu 50 tahun hutan Katyn menutup rahasia 15.000 prajurit polan dimasakre di tengah rimba 50 tahun kemudian waktu memaksa kekuasaan terkuat membuka suara menurut kebenaran."

Menurut saya penting sekali bahwa Magusig mendorong anak-anak negerinya agar mencari kebenaran. Ahli sejarah Abdurahcman Suriomihardjo dalam "Editor" 2 Juni 1990 menulis, bahwa "pembukaan dokumen yang semula rahasia itu sangat membantu rekonstruksi sejarah". Akan tetapi duduk perkara masakre di Indonesia 25 tahun yang lalu agak berlainan dari pembunuhan Katyn yang menimpa 15.000 orang perwira Polandia. Kelainannya ialah oleh karena masakre di Indonesia itu pada hakikatnya tidak ada ra-

⁷⁸ *Kompas*, 9 Maret 1966.

⁷⁹ *Kompas*, 27 April 1967.

hasianya sama sekali. Pembunuhan massal di Indonesia atas tanggung jawab Jenderal Soeharto bukanlah suatu rahasia. Si penanggungjawab ini justru terus-menerus bangga akan perbuatannya. Terhadap masacre benar-besaran dalam tahun-tahun pembunuhan sesudah 1965, Soeharto tidak pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak azasi manusia yang luar biasa itu. Sebaliknya, ia selalu memamerkan dengan bangga tindakannya yang durjana itu. Tentang ini telah terbukti sekali lagi baru-baru ini. Dengan adanya pengakuan pers Amerika Serikat, bahwa staf kedubes Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan daftar nama-nama kader PKI dan ormas yang dekat dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia agar mereka itu ditangkap dan dibunuh, tidak seorangpun juru bicara pemerintah Orde Baru yang memungkirkan telah terjadinya pembantaian massal, ataupun mengucapkan penyesalan mereka terhadap peristiwa yang terjadi 25 tahun yang lalu itu. Mereka ini cukup berpuas diri dengan penegasan pengakuan: bahwa militer Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar tersebut dari pihak asing, oleh karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa-siapa kader-kader PKI!

Juga di dalam otobiografinya, Soeharto sama sekali tidak menunjukkan tanda, bahwa ia menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak setengah atau satu juta. Justru sebaliknya, terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia tidak mencela perbuatan mereka. Misalnya dalam hal kolonel Jasir Hadibroto, dalam "Kompas Minggu", 5 Oktober 1980 ia menceritakan pengakuannya kepada Soeharto, yaitu bahwa ia telah membunuh ketua PKI DN Aidit tanpa keputusan pengadilan. Dengan jalan demikian Aidit tidak bisa membela diri di depan sidang pengadilan, dan karenanya pula penguasa dengan leluasa dapat menyiarkan 'pengakuan' Aidit yang palsu. Kolonel ini justru di-

hadiahi Soeharto dengan kedudukan sebagai gubernur Lampung. Dalam hal ini tentu saja Soeharto sendirilah yang bertanggungjawab. Karena pembunuhan itu hanya terjadi sesudah Jasir Hadibroto menerima perintah dari Soeharto yang, menurut Jasir, mengatakan: "Bereskan itu semua!".

Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang tertera didalam tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI atau BTI (Barisan Tani Indonesia) yang selalu dibenarkan dengan dalih, seakan-akan mereka dibunuh karena "terlibat dalam Gestapu/PKI 1965". Barangkali benar, ada beberapa kader PKI yang telah ikut memainkan peranan dalam peristiwa 1 Oktober 1965 itu. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi-pagi buta 1 Oktober 1965 saat itu di Jakarta? Dari berita "The Washington Post" 21 Mei 1990 menjadi jelas, bahwa sejak semula Soeharto telah berketetapan hati untuk menghancurkan PKI. Dalih umum yang dikemukakan oleh Mahmilub atau pengadilan semacamnya adalah bahwa semua anggota atau simpatisan PKI 'terlibat dalam peristiwa G30S-PKI'. Dalih demikian pulalah yang dipakai pemerintah untuk membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan lebih dari 10.000 orang yang dipandang sebagai simpatisan gerakan kiri ke Pulau Buru, yang pada umumnya selama 10 tahun lebih. Mereka itu dianggap sebagai 'terlibat secara tidak langsung dalam Gestapu/PKI'. Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat langsung adalah seorang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu, tak lain tak bukan ialah Jenderal Soeharto sendiri.

Ada sebuah kewajiban lagi yang penting, yaitu meneliti kembali duduk perkara Gerwani di dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Dari semula penguasa menuduh gadis-gadis Gerwani di Lubang Buaya berbuat paling keji dan tak tahu malu. Melaui media pers bertahun-tahun disiarkan, seolah-olah mereka dihadirkan di sana oleh PKI untuk melakukan upacara 'harum bunga' sambil menari-nari lenso untuk mengantar jiwa jenderal-jenderal itu, melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh, dibagi-bagikan pisau silet, dan lantas ikut ambil bagian dalam perbuatan jahat serta menyiksa jenderal-jenderal itu sebelum mereka tewas. Sebagai akibat dari cerita-cerita demikian terbentuklah bayangan, seakan-akan Gerwani adalah perkumpulan perempuan lacur, jahat dan bengis yang harus dihinakan dan bahkan dibinasakan.

Cerita-cerita demikian sebenarnya tidak terbukti. Tidak pernah ada suatu proses, di mana dakwaan demikian bisa dibenarkan. Seorang saksi dalam sidang yang, menurut Sudisman 'terbuka tapi tertutup' dan 'serba umum tapi tidak umum', bernama Jamilah dan yang mereka gunakan sebagai dasar bangunan dongengan itu, adalah seorang perempuan bayaran belaka. Beberapa tahun yang lalu Profesor Benedict Anderson, di dalam majalan ilmiah "Indonesia", memuat keterangan resmi dari lima dokter yang memeriksa mayat-mayat para jenderal itu sesudah diangkat dari Lubang Buaya. Jauh sebelum itu, keterangan resmi para dokter ini pun telah diumumkan oleh Soekarno di depan sidang kabinet, sengaja untuk membantah dongengan yang beredar saat itu, yang antara lain mengatakan bahwa mata para jenderal itu telah dicungkil dan bahwa kemaluan mereka dipotong-potong sebelum ditembak mati. Keterangan dokter-dokter resmi itu ringkasnya mengatakan, bahwa tidak ada tanda penyiksaan pada korban, dan tidak sebiagi mata pun di-

cungkil sebelum mereka dibunuh.

Penting sekali membersihkan Gerwani dari tuduhan yang tidak adil itu. Terutama sangat perlu, oleh karena sebelum 1965 Gerwani sangat aktif dalam membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti diketahui, sejak Orde Baru berkuasa semua perjuangan untuk kepentingan perempuan melalui pergerakan yang bebas dan mandiri, dianggap oleh penguasa sebagai kegiatan yang harus diharamkan dengan mengingat kepada 'perbuatan Gerwani' dalam akhir tahun 1965 itu.

Ada satu tuduhan lagi yang harus dibantah. Dari sejak awal telah disiarkan cerita, bahwa seolah-olah di rumah-rumah orang PKI terdapat (kecuali cungkil mata dan kursi listrik) daftar nama-nama orang yang memusuhi komunisme, dan yang harus dibinasakan sesudah PKI beroleh kemenangan dengan gerakannya di akhir 1965 itu. Tidak selebar daftar seperti itu bisa dipertunjukkan di pengadilan mana pun. Sekaranglah, sesudah adanya pengakuan pers Amerika Serikat itu, kita ketahui bahwa sesungguhnya daftar orang-orang yang harus dibinasakan itu memang ada. Tetapi, inilah bedanya, daftar yang ada justru bukan daftar buatan komunis, melainkan daftar yang diberikan oleh Kedubes Amerika Serikat kepada Soeharto yang memuat ribuan nama komunis Indonesia yang harus dibunuh!⁸⁰

Begitu beragamnya versi yang berbicara tentang dalang G30S serta jumlah korban pembantaian jelas menjadikan peristiwa G30S menjadi demikian menarik untuk dikaji kembali. Terbukanya akses untuk menggali sumber dari aktor-aktor sejarah yang selama ini menjadi "terpidana" hendaknya mampu disikapi secara arif sebagai pelu-

⁸⁰ Prof. Dr. W.F. Wertheim, "Sejarah Tahun 1965 yang Tersembunyi", *Arah*, No.1/ tahun 1990.

ang berharga untuk mengungkap peristiwa G30S secara transparan sehingga setiap pelaku sejarah dapat ditempatkan sesuai dengan peran sejarah yang dimainkannya. Sikap emosional dan membabi buta dalam upaya pengkajian atau penelusuran kembali peristiwa G30S bukan saja hanya akan menjadikan peristiwa tersebut tetap tidak jelas dan penuh rekayasa, tetapi juga akan membuat karya sejarah yang dilahirkan nanti tidak ada bedanya dengan karya sejarah yang dilahirkan pemerintah Orba, yakni sejarah yang sarat dengan kepentingan sesaat atau kepentingan subjektif para tokoh atau penguasa. Bila demikian, apa gunanya membaca dan mempelajari karya sejarah. Dalam kaitan itu pula, penggunaan istilah pelurusan sejarah hendaklah dihindari dan akan terasa lebih tepat bila yang digunakan adalah istilah penelusuran kembali peristiwa sejarah atau pengkajian kembali peristiwa sejarah.***



Bab VI

RESPON INTERNASIONAL DAN NAIKNYA SOEHARTO SEBAGAI PENGUASA ORDE BARU INDONESIA

A. Lahirnya Orde Baru dan Strategi Pementapan Kehidupan Politik

ORDE Baru lahir dari suatu pertentangan dalam ruang lingkup nasional.⁸¹ Pertentangan ini bersifat pertentangan antara dua aspirasi yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia, yang masing-masing diejawantahkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, baik secara terorganisir maupun tidak. Pertentangan ini mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965 pada saat gerakan komunis secara terorganisir melansir usaha-usaha untuk menggulingkan pemerintahan dan sekaligus merobohkan Negara Pancasila. Namun demikian sumber pertentangan itu telah ada sebelumnya dan terlihat dari dualisme bahkan pluralisme nasional di segala bidang kehidupan, ideologi, politik, sosial-budaya dan militer. Pertentangan nasional antara dua aspirasi ini diwakili oleh dua kelompok dalam masyarakat yang kemudian dikenal sebagai orde lama dan orde baru. Adapun kekuatan Orde Lama

⁸¹ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1974.

itu berpusat sekitar orang-orang yang berideologi komu-nis dengan tulang punggung PKI beserta ormas-ormasnya, bersama dengan orang-orang yang mengkultuskan individu Presiden Sukarno dan konsep-konsep politik Nasakom, Nefo, Dekon, dan sebangsanya. Dalam kelompok ini juga termasuk orang-orang oportunistis yang hanya berpikiran untuk menggunakan kesempatan-kesempatan guna memperoleh secara politis ataupun ekonomis. Sebaliknya kekuatan-kekuatan Orde Baru adalah golongan-golongan serta perorangan yang anti-komunis atau non-komunis beserta organisasi-organisasinya, termasuk pula golongan-golongan ekstrim dan orang-orang yang anti konsepsi politik Bung Karno.

Dualisme yang ada itu berjalan terus hingga pada saat pengukuhan Jendral Soeharto menjadi Presiden RI dalam bulan Maret 1968. Tahap berakhirnya Dualisme ini merupakan bagian-bagian yang kritis bagi Orde Baru, sebab pada saat tersebut dihadapkan pada ujian mental dan fisik untuk dapat keluar sebagai pemenang dari konflik nasional yang sangat prinsipil dan esensial bagi bangsa dan negara. Apalagi bila diingat bahwa kekuatan administratif dan propaganda Orde Baru jauh lebih kecil dari pada yang dimiliki oleh Orde Lama. Priode itu prinsipil karena menyangkut hakikat dasar dan tujuan Negara Pancasila, dan esensial karena menentukan kelanjutan serta hari depan bangsa dan Negara, dan secara praktis hanya dengan mengakhiri dualisme itu bangsa dapat memantapkan kembali dan mengisi cita-cita perjuangannya. Strategi politik dalam prosesnya secara garis besar dapat dilihat dalam berbagai tahapannya masing-masing dengan tuntutan dan tantangannya sendiri, tetapi satu dan lainnya merupakan urutan berantai yang merupakan kosekwensi logis dari hasil dan usaha yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Tahap I, yaitu penghancuran PKI. Usaha ini berhasil berkat adanya persatuan rakyat serta kepeloporan ABRI bersama generasi muda. Tuntutan-tuntutan masyarakat diikuti oleh berbagai tindakan yang merupakan luapan tekanan hati rakyat secara spontan yang kemudian secara bertahap dapat ditertibkan dengan dibekuknya organisasi-organisasi PKI oleh Pepelrada-pepelrada dan akhirnya melalui Surat Perintah 11 Maret, pada tanggal 12 Maret 1966 secara formil PKI dibubarkan, Pembubaran ini mempunyai *rationale* strategis-nya, yakni untuk mematahkan peralatan strategi musuh, yang tidak hanya mempunyai arti dalam jangka pendek, tetapi dengan dilarangnya PKI mulai saat itu berarti untuk jangka panjang tidak lagi diberikan tempat kepadanya untuk mengambil bagian dalam mekanisme Politik Negara Pancasila.

Tahap II, yaitu konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila dan UUD '45. Sebagai konsekuensi pembubaran PKI, maka dimulailah konsolidasi pemerintah dengan penangkapan 18 Menteri Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan.

Dalam sidang umum ke-IV MPRS, Letjen TNI Soeharto diangkat sebagai Pengemban Ketetapan No. IX/MPRS/1966 dan sekaligus ditugaskan untuk membentuk Kabinet Ampera dengan tugas pokok Dwi Dharma, yakni (a) menciptakan kestabilan ekonomi; dan dengan program Catur Karya, yakni (1) memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, (2) melaksanakan pemilihan Umum (3) melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan No. XII/MPRS/1966, dan (4) melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

B. Respons Internasional

Pada awalnya dunia Barat tidak menganggap bahwa Indonesia dikuasai militer. Tetapi faktor militer di Indonesia mempunyai peranan penting untuk stabilisasi situasi setelah goncang oleh kup PKI. Kemudian muncul suara-suara yang menyatakan Indonesia dikuasai oleh kaum militer reaksioner kanan di luar negeri.⁸² Awal Juli 1966 sejumlah besar wartawan dalam dan luar negeri yang mengira akan dapat memancing "berita besar" datang ke Istana Bogor. Pada saat itu mereka mengharapkan akan mendapat suatu pernyataan penting dari Presiden Pemimpin Besar Revolusi Soekarno tentang "Gerakan 30 September".⁸³

Kemudian Presiden Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Pejabat Presiden mulai mengambil alih tugas-tugas Presiden Soekarno. Misalnya hal-hal yang menyangkut urusan hubungan diplomatik dengan negara-negara asing. Salah satunya adalah mengeluarkan Keputusan no. 158 th 1967 dan 160 th 1967 yang ditetapkan tgl 2 Oktober 1967, yang isinya memberhentikan dengan tidak hormat dua orang Duta Besar Republik Indonesia di luar negeri, karena indisipliner / terlibat G30S PKI. Mereka itu adalah Muhamad Ali Chanafiah dan Sukrisno.⁸⁴ Sebelumnya pada 7 Oktober 1965, Direktorat Penerangan Departemen Luar Negeri R.I. juga menyatakan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan tetap melindungi keamanan dan keselamatan dari semua Perwakilan Negara-negara Asing beserta pejabat-pejabatnya. Pernyataan tersebut dikeluarkan sehubungan dengan terja-dinya demonstrasi-demonstrasi anti-komunis yang sedang marak khususnya di ibukota di-

⁸² *Kompas*, 7 Juli 1966.

⁸³ *Kompas*, 7 Oktober 1965.

⁸⁴ *Kompas*, 9 Oktober 1967.

mana terdapat banyak kedutaan negara sahabat..⁸⁵

1. Reaksi RRC

Sebulan sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 1965 delegasi PKI dibawah pimpinan Ketua CC PKI, D.N. Aidit tiba di Indonesia setelah sebelumnya delegasi tersebut meng-adakan perundingan-perundingan dengan CC Partai Komunis Uni Sovyet dan CC Partai Komunis Tiongkok. Di luar negeri.⁸⁶

Hal ini memunculkan adanya teori bahwa negara-negara ko-munis ikut merencanakan pemberontakan yang dilakukan PKI. Setelah itu, paska peristiwa G-30-S, harian "Angkatan Bersendjata" memuat sebuah berita yang secara panjang lebar menyatakan bahwa Mao Tse-Tung secara langsung mendalangi kup gerakan 30 September atau 1 Oktober dinihari. Hal ini sesuai dengan politik keras RRC untuk menguasai dunia.⁸⁷

Padahal pada saat itu terdapat suatu analisa tentang kegon-cangan-kegoncangan hebat yang sedang terjadi di RRC. Disana telah terjadi pertarungan antara pimpinan komunis yang keras dari garis Mao dengan pimpinan komunis yang lunak dari garis Liu Shao-Chi. Garis Mao didukung oleh tentara dibawah pimpinan Lin Piao.⁸⁸

Setelah gerakan 30 September dapat dibasmi, yang disertai pemberangusan massal dan pembersihan oknum-oknum PKI. Etnis Cina yang ada di Indonesia terkena im-

⁸⁵ *Kompas*, 5 Oktober 1967.

⁸⁶ *Kompas*, 10 Agustus 1965.

⁸⁷ *Kompas*, 2 Mei 1966.

⁸⁸ *Kompas*, 29 April 1967.

basnya. Selain kecurigaan pada etnis tersebut, juga terdapat pembatasan yang membatasi ruang gerak mereka. Di RRC sendiri terjadi kampanye anti Indo-nesia. Sehubungan hal tersebut, Departemen Luar Negeri RI memberikan dua buah nota protes kepada Kuasa Usaha RRC di Jakarta, Lu Tzu Po untuk disampaikan pada pemerintahnya. Dua buah nota protes tersebut berisi komplain akibat adanya kampanye anti Indo-nesia di RRC serta nota protes berhubung tindakan-tindakan yang tidak senonoh, melanggar prikemusiaan⁸⁹ Sementara itu paska Gerakan 30 September saat terjadi penumpasan sisa-sisa PKI, Radio Peking menyatakan bahwa Indonesia telah ditunggangi go-longan kanan yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan Bloknnya.

2. Reaksi Kuba

Kuba dan RRC sebagai negara komunis memberikan reaksi negatif paska G-30-S/PKI dan pemberantasannya. Kedua perwakilan negara tersebut menolak untuk mengibarkan bendera se-tengah tiang, di saat pemerintah/rakyat Indonesia sedang berka-bung, dengan gugurnya tujuh pahlawan revolusi akibat peristiwa G-30-S/PKI.⁹⁰ Hal ini dapat dimaklumi karena secara tidak langsung pemerintah Indonesia menentang doktrin negara mereka yaitu ko-munisme. Tapi kejadian itu cukup disesalkan mengingat sebagai perwakilan negara asing mereka seharusnya menghormati urusan bangsa dan negara yang mereka datangi. Mengingat reaksi kedua perwakilan negara tersebut, maka dapat diperkirakan reaksi yang jauh lebih keras pada Indonesia terjadi di negara mereka masing-masing.

⁸⁹ *Kompas*, 6 Mei 1967.

⁹⁰ *Kompas*, 20 Oktober 1965.

3. Reaksi Soviet-Rusia

Beberapa bulan sebelum peristiwa G-30 S/PKI, D. Sytenko, dutabesar URSS di Indonesia datang kekantor CC PKI ditemui oleh Sudisman, anggota Politbiro CC PKI. Maksud kedatangan Sytenko untuk membicarakan undangan yang disampaikan oleh CC PKUS (partai komunis Uni Sovyet) kepada CC PKI.⁹¹

Ini juga menjadi indikasi adanya kerja sama antara PKI di Indonesia dengan PK Rusia. Peristiwa G-30-S/PKI bisa jadi adalah hasil dari perencanaan yang didukung oleh negara-negara pemimpin Komunis dunia yaitu Uni Sovyet dan RRC. Selain kenyataan bahwa pengikut PKI di Indonesia cukup banyak, bahkan mencapai jutaan, ditambah dukungan Presiden Soekarno akan eksistensi partai ini dan juga keberhasilan PKI masuk empat besar partai pemenang dalam PEMILU 1955. Oleh karena itu RRC dan Uni Sovyet menganggap peluang bagi PKI cukup besar untuk menguasai Negara Indonesia melalui kup yang mereka rencanakan. Dan jika PKI berhasil menjadikan Indonesia menjadi negara komunis maka kekuasaan blok timur akan bertambah. Hal ini dimaklumi karena pada masa perang dingin itu, blok barat dan blok timur saling bersaing untuk menanamkan pengaruhnya di seluruh dunia.

Meski demikian tidak menutup kemungkinan pula blok barat yang diwakili Amerika dengan CIA-nya bisa mencium adanya rencana pemberontakan tersebut dan ikut terlibat dalam "*conspiracy theory*" tanpa diketahui pihak lawan. Jadi bisa dibilang peristiwa G-30-S/PKI adalah bagian dari skenario internasional yang bukan hanya merupakan "perang" antara ideologi komunis dan Pancasila, tetapi juga merupakan pertarungan antara blok timur dan blok barat.

⁹¹ *Kompas*, 6 Juli 1965.

4. Reaksi Pakistan

Pakistan sebagai negara Islam yang bersahabat dengan Indonesia menyambut positif keberhasilan Indonesia dalam memberantas komunisme yang dalam hal ini adalah PKI dan antek-anteknya. Selain itu Presiden Sukarno yang banyak diidolakan masyarakat Indonesia dan Pakistan mendapat perhatian yang cukup besar. Bahkan di Karachi saat itu diadakan suatu pertemuan oleh masyarakat Pakistan – Indonesia untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terhindarnya Presiden Soekarno dari marabahaya yang ditimbulkan oleh "gestapu". Salah satu yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri dan Urusan Kehakiman Pakistan Achmad Akbar⁹² turut berpartisipasi dalam acara itu dan menyatakan kegembiraannya.

Hal tersebut menggambarkan persahabatan yang erat antara rakyat Indonesia dan Pakistan. Duta besar RI untuk Pakistan saat itu, Mayor Jenderal Rukminto Hendraningrat dalam harian berbahasa Inggris "*Pakistan Times*" yang terbit di Lahore dan Rawalpindi menyatakan hal-hal yang mengenai gerakan kontrarevolusi 30 September. Jendral berbintang dua ini adalah salah seorang yang berhasil memupuk persahabatan militan antara rakyat Indonesia dan Pakistan.⁹³ Selain itu bukti betapa eratnya hubungan Indo-nesia-Pakistan dan betapa populernya tokoh ini di sana ditunjukkan yaitu pada tanggal 19 Nopember 1965 di Multan (Pakistan Barat) diadakan "Hari Sukarno" untuk merayakan terhindarnya Presiden Sukarno dari malapetaka maut akibat timbulnya petualangan "Gestapu". Lembaga Persahabatan Pakistan - Indonesia di Multan mengatakan bahwa seluruh rakyat Pakistan akan merayakannya sebagai

⁹² *Kompas*, 12 Oktober 1965.

⁹³ *Kompas*, 14 Oktober 1965.

hari Soekarno.⁹⁴

5. Reaksi AS

Potret peristiwa yang terjadi paska revolusi gerakan 30 September tidak hanya penegasan sikap anti-PKI. Seperti yang didok-trinkan Soekarno yang anti kapitalis, maka terjadi aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun ormas-ormas. Di antaranya adalah aksi ribuan jemaah Nahdlatul Ulama dan ormas-ormasnya di jalan Suropati Jakarta yang bertujuan untuk menyam-paikan orasi gan-yang imperialis Inggris dan Amerika Serikat serta pembubaran PKI pada akhir Oktober 1965.⁹⁵

Puncak aksi dan demonstrasi tersebut adalah aksi mahasiswa UI bersama rekan-rekan mereka dari KAMI dan KAPPI pada tanggal 12 Januari 1966 dan menyampaikan tiga tuntutan rakyat (TRI-TURA), yang isi salah satu di antaranya adalah pembubaran PKI.

Selain itu demonstrasi juga dilakukan di depan kedutaan RRC dan Amerika. Kedua negara tersebut dianggap terlibat dalam reka-yasa peristiwa G-30-S/PKI. Pemerintah menanggapi bahwa terlepas dari cara demonstrasi, aksi-aksi pa-triotik dan revolusioner para mahasiswa tersebut merupakan suatu manifestasi kesadaran berpolitik yang demokratis.⁹⁶

Pengusaha Amerika yang telah lama menetap di Indonesia, William Palmer menyangkal mengetahui tentang apa yang disebut "*Dokumen Gilchrist*" seperti apa yang dikatakan Dr. Subandrio. Dokumen tersebut menurut Subandrio ditemukan di bungalow Palmer yang terletak di

⁹⁴ *Kompas*, 10 November 1965.

⁹⁵ *Kompas*, 21 Oktober 1965.

⁹⁶ *Kompas*, 10 Februari 1966.

daerah perkebunan miliknya yang juga disangkal merupakan kepunyaannya di Puncak Jawa Barat.⁹⁷ Dokumen ini dianggap berhubungan dengan rekayasa Amerika dan CIA dalam peristiwa G-30-S di Indonesia.

Meski begitu banyak terjadi aksi anti-Amerika di Indonesia saat itu, tapi ini tidak membuat Amerika memutuskan hubungannya dengan Indonesia. Hal ini disebabkan jika mereka meninggalkan Indonesia, maka akan lebih riskan lagi bagi Indonesia dalam menghadapi kekuatan PKI. Bekas Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Jones dalam *interview* di Washington menyatakan bahwa, pengurangan jumlah orang-orang Amerika yang menetap di Indonesia, berarti menolong kembali kaum komunis untuk berkuasa. Menurut Jones, kaum komunis Indonesia selalu berusaha memaksa dengan kekerasan agar bisa menguasai Indonesia.⁹⁸

Paper Cornell yang mengulas mengenai peristiwa G-30-S/PKI membuat heboh kalangan resmi di Indonesia dan Amerika Serikat. Paper yang pernah diulas oleh Rosihan Anwar berasal dari Universitas Cornell itu mengajukan dalil bahwa PKI tidak tersangkut dalam Peristiwa G-30-S.⁹⁹ Meski tidak semua asumsi di dalam paper ini benar, tapi hal tersebut menjadi sesuatu bahan yang dikaji dalam perkembangan penelusuran sejarah peristiwa G-30-S/PKI di masa berikutnya.

Saat itu oleh beberapa mahaguru di Amerika Serikat bahkan sampai saat ini masih dinanti sebuah "Buku putih" dari Pemerintah Indonesia yang akan mengungkapkan mengenai kejadian-kejadian se-benarnya sekitar peristiwa

⁹⁷ *Kompas*, 6 Oktober 1966.

⁹⁸ *Kompas*, 11 Oktober 1966.

⁹⁹ *Kompas*, 17 Desember 1966.

Gestapu/-PKI.¹⁰⁰ Meski begitu banyak aksi anti-Amerika tetapi pada tanggal 7 Januari 1967 ditanda tangani lah suatu perjanjian jaminan modal asing Amerika untuk Indonesia antara Indonesia dan Amerika serikat di Jakarta. Menlu Adam Malik bertindak sebagai wakil Indonesia dan kuasa Usaha Amerika di Jakarta.¹⁰¹

Aksi anti-Amerika yang dipelopori Presiden Soekarno menyebabkan penghancuran produk-produk negara Imperialisme termasuk di antaranya musik dan film barat, yang kebanyakan berasal dari Amerika dan Inggris. Lagu-lagu penyanyi barat yang populer di seluruh dunia juga dilarang diperdengarkan di Indonesia begitu pula penyanyi Indonesia dilarang untuk menyanyikan lagu barat. Pengganyangan terhadap film Amerika mencapai klimaknya, ketika Pemerintah Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, dan Pemerintah Amerika menyokong politik Malaysia. Bukan hanya "*The Bird*" saja yang akhirnya diganyang, sampai AMPAI dengan Bill Palmernya kena ganyang.¹⁰² Yang mengherankan, pada umumnya dapat dikatakan, bahwa "*image*" atau gambaran tentang Indonesia di Amerika Serikat adalah cukup baik. Bahkan dari percakapan dengan orang-orang yang bergerak dibidang mass-media, dikalangan Universitas dan lembaga-lembaga *research*, dikemukakan kekaguman mereka terhadap Indonesia.¹⁰³

C. Naiknya Soeharto sebagai Penguasa Orde Baru

¹⁰⁰ *Kompas*, 15 Juni 1967

¹⁰¹ *Kompas*, 16 Januari 1967.

¹⁰² *Kompas*, 14 Agustus 1967.

¹⁰³ *Kompas*, 6 September 1967..

Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri se-perti yang dilakukan di dalam negeri segera membersihkan diri dari unsur serta oknum-oknum "gestapu". Di Indonesia telah tercapai suatu kebulatan tekad di antara *ci-vitas acade-mica* untuk mengga-lang persatuan dengan tujuan untuk membasmi komunisme.¹⁰⁴ Ber-samaan dengan hal tersebut, mahasiswa mulai bersimpati pada ABRI/AD Khususnya yang berjasa menumpas gerakan 30 September. Selama ini ABRI selalu dijadikan sasaran fitnah baik oleh nekolim (Barat dan Timur) luar negeri, maupun kaum kontra revolusioner dan plin-plan dalam negeri, yang tujuannya tidak lain untuk memisahkan ABRI dari Rakyat dan Pemimpin Besar Revolusi yaitu Soekarno¹⁰⁵.

Pada tanggal 14 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengumumkan untuk mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Men/ Pangad. Setelah menjabat Men/pangad Soeharto mengeluarkan instruksi untuk memencilkan terus anggota organisasi GESTAPU dan didukung oleh instruksi Menteri PTIP untul membersihkan Per-guruan tinggi dari kaum Kontra revolusi pendukung Gestapu.¹⁰⁶

Men/Pangad Mayjen. Soeharto menegaskan akan menghan-curkan G30S secara simultan mengerahkan kekuatan fisik disertai dengan usaha-usaha mental dan spirituil. Hal ini disebabkan peris-tiwa kontrev "G-30-S" mencekam perasaan perikemanusiaan sege-nap bangsa Indo-nesia yang progresif-revolusioner dan merupakan peringatan yang harus dibayar sangat mahal. Meski demikian dapat diketahui dengan jelas siapa kawan siapa lawan yang dihadapi.¹⁰⁷ Oleh karena itu tugas ABRI dengan bantuan rakyat

¹⁰⁴ *Kompas*, 29 Oktober 1965.

¹⁰⁵ *Kompas*, 18 Februari 1966.

¹⁰⁶ *Kompas*, 19 Oktober 1965.

¹⁰⁷ *Kompas*, 12 November 1965.

yaitu menum-pas "G-30-S" sampai ke-akar-akarnya. Tujuan daripada tugas itu yaitu mengamankan jalannya Revolusi diatas rel Pancasila.¹⁰⁸ Bagi prajurit dikenakan tindakan tegas bagi yang bermuka dua, yaitu menganut ideologi selain pancasila. Karena itu terus dilakukan pembersihan dan penertiban di tubuh ABRI khususnya AD. Pada waktu itu para pelaku G-30-S di Jawa Tengah seperti Usman - Suherman - Marjono yang disinyalir berada disekitar daerah Merapi terus dikejar bahkan beberapa waktu sebelumnya sudah nyaris di-tangkap kesatuan ABRI, tetapi bisa lolos karena kabut.¹⁰⁹ Semen-tara itu eks Kol. Suherman, eks Kol. Marjono dan eks Major Sukirno tertembak mati pada tanggal 14 Desember 1965. Ketiga anggota ABRI yang terlibat peristiwa kontra revolusi G30S itu berhasil ditembak oleh pasukan Angkatan darat yang mengejanya.¹¹⁰ Kemudian Letjen Soeharto ditunjuk sebagai penyerah perkara oknum-oknum yang akan diajukan ke Mahmilub. Sidang-sidang Mahmilub tersebut tetap bersifat terbuka, tetapi diselenggarakan dalam ruangan de-ngan undangan terbatas.¹¹¹

Meski Peristiwa G-30-S membawa petaka bagi anak bangsa, tapi Men/Pangad/Kas Koti Mayjen Soeharto menyatakan bahwa di samping akibat-akibat negatip yang ditimbulkan oleh "Gestapu" ada juga beberapa hal yang positif bagi revolusi, yakni antara lain menimbulkan kesempatan untuk membersihkan revolusi kaum gadungan, dari orang-orag yang tdiak bertanggung jawab.¹¹² Pemecahan dan pemberantasan gerakan kontra revolusioner 30 September yang direncanakan dan dilaksanakan oleh PKI harus

¹⁰⁸ *Kompas*, 23 November 1965.

¹⁰⁹ *Kompas*, 4 Desember 1965.

¹¹⁰ *Kompas*, 16 Desember 1965.

¹¹¹ *Kompas*, 12 Februari 1966.

¹¹² *Kompas*, 9 Desember 1965.

menjamin bahwa peristiwa terkutuk seperti itu takkan terulang lagi dinegara kita untuk generasi-generasi yang akan datang.¹¹³

Berkat kepemimpinan Soeharto, kekuatan Gestapu tak berarti lagi. Bahkan situasi ditanah air pada umumnya mencapai kemajuan-kemajuan pesat.¹¹⁴ Pada tanggal 20 Januari 1966 ia menerima 12 anggota KAMI di DEPAD. Dalam kesempatan itu Soeharto sebagai Men/Pangad menyatakan bahwa ia sepenuhnya memahami tiga pokok tuntutan para mahasiswa KAMI tentang Pembubaran PKI, Penurunan Harga dan perombakan Kabinet Dwikora.¹¹⁵

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa Mayjen Soeharto telah berhasil mengemban tugasnya dan mendapat sambutan positif dari rakyat, juga mahasiswa. Sambutan ini berkembang menjadi rasa simpati pada kepemimpinannya. Lama-kelamaan banyak rakyat yang mendukungnya untuk menjadi pemimpin negara Indonesia menggantikan Soekarno yang popularitasnya turun di mata rakyat dan mahasiswa karena dianggap sebagai pendukung PKI.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa Jendral Suharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965 ditengah-tengah kerusuhan Indonesia dan menjadi Presiden Indonesia kedua pada tahun 1967. Kemudian pada masa jabatan beliau, Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, membatalkan hubungan diplomatik dengan Cina, dan mendirikan lagi ikatannya dengan organisasi internasional. Indonesia juga mengambil peran aktif dalam pembentukan ASEAN (1967) untuk mengembangkan kerja sama ekonomi dan budaya di antara negara-negara

¹¹³ *Kompas*, 3 Januari 1966.

¹¹⁴ *Kompas*, 13 Januari 1966.

¹¹⁵ *Kompas*, 22 Januari 1966.

anti-komunis di daerah sekitarnya, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Suharto mendirikan regime “Pemerintahan Baru” (berlawanan dengan Permerintahan Lama oleh Sukarno). Antara tahun 1965 dan 1975, Suharto berhasil menstabilkan ekonomi Indonesia dan mendukung serta mengikuti polis-polis daerah Barat. Setelah tahun 1975, regime Suharto menempatkan restriksi-restriksi tertentu terhadap penanam-an dana dari luar negeri dan mendukung perkembangan yang didasarkan dari industri dalam negeri. Walaupun ada beberapa kemajuan yang nyata di bidang kesejahteraan masyarakat dalam masa regime beliau, banyak dari kemajuan ini menjadi terbalik pada waktu krisis ekonomi di Indonesia yang bermulai pada tahun 1997. Regime Suharto sangat menyandarkan pada kekuasaan sentralisasi terhadap Presiden. Dalam proses ini, beliau memperkaya keluarga dan kolega-koleganya, menekan perbedaan politik, mengadakan represi terhadap orang Indonesia keturunan Cina, dan secara teratur menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan terhadap daerah-daerah di Indonesia yang tidak sepakat dengan beliau.

D. Teori Konspirasi

Seorang mantan pejabat CIA Ralph McGeHee yang berdinis dari 1952 sampai 1977, menulis antara lain bahwa fokus utama perhatian mereka mendiskriditkan kelompok-kelompok lawan politik dengan dokumen-dokumen palsu seolah-olah berasal dari mereka. Di samping itu juga dilakukan menipulasi terhadap publikasi lawan tersebut. Hal-hal itu dilakukan secara kasar maupun halus. Pada awal tahun 1960-an Indonesia menjadi perhatian khusus CIA dengan operasi paling terpadu. Propaganda yang kasar menyatakan bahwa PKI alat Cina komunis. Untuk mem-perkuat

pernyataan ini maka telah ditemukan peti-peti berisi senjata berlabel bahan bangunan dari Cina untuk PKI.

Berita yang jauh lebih membakar menyatakan bahwa sebelum Oktober 1965 terdapat daftar rahasia para pemimpin sipil dan militer untuk dipenggal kepalanya. Sudah lama sebenarnya orang tidak dapat dibodohi dengan berita yang tidak masuk akal, penuh fitnah keji itu, akan tetapi tak satu pun yang memberi mencoba membantahnya, karena histeris dan ketakutan yang dibangkitkan rejim militer AD Jendral Soeharto ketika itu luar biasa dahsyatnya. Kini terbukti bahwa rekayasa yang keji itu paling tidak sebagian merupakan hasik godokan laboratorium CIA dan dinas dinas rahasia Inggris M16. Jendral Suharto dan Jendral Nasution pun secara pribadi ikut memamah biaknya, pendeknya keduanya bagian dari orkestra fitnah dan rekayasa. Para pemimpin militer mulai melakukan kompaanye pembasmian berdarah. Kelompok sipil seperti Soksi yang disponsori AD dan CIA serta organisasi mahasiswa yang menjadi sekutu mereka. *“Rekayasa media telah memainkan peran terpenting dalam membentuk pendapat umum dan memobilisasi kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan pembunuhan besar-besaran”* [kursif-hs]. Dalam telegram No. 868 kepada kemlu AS pada tanggal 5 Oktober 1965, sore hari setelah menghadiri pemakaman para jendral di Kalibata, Dubes AS Marshall Green memaparkan tentang petunjuk dasar dalam membantu rejim militer di Indonesia agar benar-benar dijaga kerahasiaannya. Pentingnya disebarkan dongeng kesalahan dan pengkhianatan PKI serta kebiadabannya, sesuatu yang bersifat amat mendesak.

“4. Following guidelines may supply party of the answer to what our posture to be: (A) Avalid overt involvement as power struggle unfolds. (B) Convertly, how ever, indicate

clearly to key people in army such as Nasution and Suharto our desire to be assistance where we can, while at same time conveying to them our assumption that we should avoid our appearance of involvement or interference in any way (C) Maintain and if possible extend our contact with military. (D) Avoid move that might be interpreted as note of non confidence in army (such as precipitely moving out our dependents or cutting staff). (E) Spread the story of PKI's guilt, treachery and brutality (this priority effort is perhaps most needed immediate assistance we can give army if we can find to do it without identifying it as solely or largely US effort.

Seperti telah tersebut terlebih dahulu, pihak dinas rahasia Inggris saling isi mengisi dengan dinas rahasia AS. Kedubes Inggris di Jakarta menghubungi kantor besar dinas rahasia AS. Kedubes Inggris di Jakarta menghubungi kantor besar dinas mereka di Singapura tentang langkah-langkah yang perlu segera diambil menghadapi perkembangan situasi di Indonesia. Perang urat syaraf untuk mendorong dan melemahkan PKI. Tema propaganda berupa kisah kebiadaban PKI dalam pembunuhan para jenderal dan puteri Jenderal Nasution, bahwa PKI agen asing. Hal-hal itu harus dilaksanakan dengan halus, seolah sama sekali tidak melibatkan Inggris, bahan semacam itu sebaiknya dikirim dari Pakistan atau Filipina sebagai tercamtum dalam telegram rahasia kedubes Inggris No. 1835 6 Oktober 1965.

"... We certainly do not exclude any unattributable propaganda or psywar activities which would contribute to weakening the PKI permanently, Suitable propaganda theme might be: PKI brutality in murdering Generas and Nasution's daughter... PKI suverting Indonesia as agents of foreign Communists.... But treatment will need to be subtle, e.g. (a) all activities should be strictly unattributable, (b)

British participation or co-operation should be carefully concealed.... (d) material should preferably appear to originate from Pakistan or Philippines.

Pemerintahan Inggris menunjuk Norman Reddaway dalam menangani perang urat syaraf alias perang penyesatan ter-hadap lawan. Sebagai spesialis propaganda ia dipilih oleh Dubes Inggris Gilchirt sebagian orang terbalik untuk pekerjaan kotor itu. Selanjutnya sang spesialis memanfaatkan jalur koresponden BBC Asia Tenggara, Ronald Challis, ia meminta sang korespoden untuk melakukan apa saja untuk merusak dan menghancurkan Sukarno, di samping PKI serta mendukung Jendral Suharto dengan menyiapkan dokumen-dokumen untuk memanfaatkan olehnya. Karena sang korespoden tak bisa masuk ke Indonesia sampai pertengahan 1966, maka ia menggunakan sumber-sumber M16 yang agen-agennya mondar-mandir keluar-masuk Indonesia. Berita-berita yang ditulisnya tak pernah menyinggung pembantaian ribuan orang di Indonesia, yang adalah perang saudara dan gerombolan komunis bersenjata. Berita itulah yang muncul dalam koran-koran Inggris *The Times*, *Daily Telegraph*, *Observer*, dan *Daily Mail*. Demikian pengakuan Ronald Challis dalam bukunya *Shadow of a Revolution; Indonesia and the Generals* yang terbit baru-baru ini (2001). Sayang pembukaan dokumen rahasia Inggris konon sampai 50 tahun. Inggris amat piawai dalam menggunakan momentum untuk mempro-vokasikan Indonesia seperti diuraikan Greg Paulgrain, jebakan konfrontasi terhadap Malaysia sampai menuju pecahnya G-30-S.¹¹⁶

¹¹⁶Pramoedy Ananta Toer dalam pengantar buku tesis dokter dari Greng Poulgrain, pengajar di University of New England, Australia, *The Genesis of Malaysia Konfrontasi Brunei and Indonesia, 1945-1965*, disebutkan sebagai metamorfosis anti konfrontasi menjadi G30S. Kelihaihan Inggris dikupas sangat menarik sejak provokasi serangan Inggris terhadap kota Surabaya pada

“Seorang wanita anggota Gerwani yang telah mendapat latihan di Lubang Buaya, oleh massa rakyat telah ditangkap dalam suatu penggerebegan di rumahnya di Pematang Siantar.... Menurut Komandan CPM, G30S merencanakan akan memengal 15.000 kepala di Sumatra Utara jika gerakan mereka berhasil di Jakarta. Tetapi sebelum rencana mereka dapat dilaksanakan, dokumen-dokumen mengenai rencana tersebut telah diketemukan”.

Itulah nukilan Jendral Nasution setelah 5 Oktober 1965 yang bersama Jendral Suharto, CIA dan M16 berada dalam orkestra sumbang fitnah terhadap Gerwani, PKI dan gerakan kiri serta hasutan terhadap rakyat Indonesia, fitnah dan hasutan berdarah.

E. Daftar Maut CIA

Tentu saja pembunuhan dalam skala besar-besaran itu memiliki tujuannya. Setelah pembunuhan sejumlah Jendral yang didalangi oleh tangan-tangan jahat dengan kambing hitam Gerwani dan Pemuda Rakyat yang komunis, momentum pun tiba untuk menghancurkan PKI dan sekutunya dengan cara membasmi secara fisik seluruh pimpinan dan kadernya. Cara-cara yang digunakan merupakan demonstrasi peringatan yang tiada bandingnya kepada mereka yang hendak menentang elite penguasa Orde Baru. Selanjutnya diciptakan pemusutan sejarah secara dramatik dengan apa yang mereka sebut Orde Lama dengan menciptakan apa yang mereka sebut dengan Hari Kes-

1945, Provokasi terhadap para pemuda di Sumatra Timur yang berhasil menglikuidasi para bangsawan setempat. Apa yang kemudian dinamai dengan “revolusi Sosial”, salah satu kornannya adalah penyair Amir Hamsah, bertujuan menghapus pengaruh Indonesia melalui para bangsawan tersebut terhadap koloni Inggris ketika itu, yakni malaya, Singapura dan kalimantan Utara; www.agbardsley.h.l1-5

aktian Pancasila 1 Oktober. Pembunuhan massal yang kejam dalam jangka amat singkat menimbulkan trauma sosial secara luas, hal ini justru dijadikan alat penting dan pokok bagi hegemoni penguasa Orba.¹¹⁷ Penghancuran terhadap PKI dan seluruh gerakan kiri pertama-tama adalah membasmi secara fisik para anggota dan pendukungnya. Basmi sampai Suharto maupun Jendral Nasution serta para pengikutnya. Kekuasaan, dan segalanya ada di bawah laras senapan. Sebagaimana pengakuan mantan pejabat CIA Ralph McGehee, sudah sejak tahun 1963, CIA melatih aktivis buruh tertentu Indonesia (yang dimaksud antara lain Soski bentukan militer) guna mengumpulkan nama-nama dan simpatisan penting SOBSI yang berafiliasi pada PKI. Hal yang sama dilakukan tenaga kepolisian terhadap PKI. Hal-hal itu dilakukan berdasarkan pengalaman Amerika di Vietnam Selatan. Daftar demikian disusun berlanjut sampai pada tahun 1965, saat dipergunakan secara praktis bagi keperluan sekutunya di Indonesia yang sejalan dengan kepentingan AS. Sebelum tahun 1965, pihak CIA di Jakarta mempunyai jalur akses ke markas G-2 AD dibawah Mayjen S Parman. Mantan pejabat AS yang diwawancarai Kathy Kadane menyebutkan bahwa catatan-catatan tentang PKI yang ada dimarkas tersebut jauh dari memadai. Mereka tidak mampu mengidentifikasi ribuan orang yang menggerakkan partai komunis di tingkat daerah, atau yang melakukan kegiatan terselubung, termasuk penyandang dana.¹¹⁸ Dengan demikian daftar maut yang disusun oleh pihak CIA sungguh-sungguh bermanfaat bagi rezim militer. Daftar nama ini merupakan bahan intelijen strategi dalam pem-

¹¹⁷ Michael van Langenberg dkk, *Gestapu: Matinya Para Jenderal dan Peran CIA*, editor Sutoro, Cermin, Yogyakarta, 1999. hlm. 16, 18.

¹¹⁸ Kathy Kadane, Ex-agents Say CIA Compiled Death Lists for Indonesians, *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990, termuat dalam situs internet pir.org/kadane.html). hlm. 6.

basmian berdarah rubuan aktivis kiri, komunis dan non komunis.

Robert J Martens, seorang agen CIA dengan jabatan perwira politik pada kadubes Amerika Serikat telah berhasil menyusun daftar terpilih terdiri atas 5.000 orang kader PKI dari tingkat pusat sampai pendesaan beserta organisasi massanya dengan rincian jabatannya. Daftar itu di buat selama dua tahun (1963-1965) dengan bantuan para pegawai CIA sebagaimana yang dibenarkan oleh Joseph Lazarsky, Deputy kepala CIA di Jakarta. Bob Martens merupakan bawaan dari Edward Masters, yang jabatan resminya Kepala Bagian Politik. Kelompok inti di Kedubes Amerika di Jakarta terdiri dari Dubes Mashall Green, Deputy kepala misi Jack Lydman, Kepala CIA di Jakarta HB Tovar, Atase Pertenahan Willis Ethel dan Edward Masters. Seperti yang dikatakan Lazarsky, secara berkala daftar itu diberikan kepada Tirta Kencana (Kim) Adhyatman, Ajudan Adam Malik. Dari Adam Malik daftar tersebut disampaikan ke Markas Jendral suharto. Tentu saja kegiatan ini telah direstui oleh Duta Besar AS di Indonesia Mashall Green. Bob Martens adalah seorang analis masalah-masalah gerakan komunis yang berpengalaman, mengetuai suatu kelompok yang terdiri dari Pejabat Departemen Luar Negeri dan CIA. Antara lain Berdasarkan daftar tersebut AD telah melakukan penangkapan-penangkapan dan pembunuhan.¹¹⁹ Berdasarkan keterangan Martens, Green kelak menyatakan bahwa informasi yang diberikan kepada AD sangat berharga dibandingkan apa yang mereka miliki.¹²⁰

Selanjutnya menurut penuturan Joseph Lazarsky, Deputy CIA di Jakarta, telah diadakan kesepakatan dengan perwira Intelijen Kostrad Ali Murtopo, secara berkala yang

¹¹⁹ Kadane, *ibid.* hlm. 6.

¹²⁰ Kadane, *ibid.* hlm. 3.

bersang-kutan melaporkan siapa-siapa dari daftar itu telah ditangkap dan siapa-siapa yang telah dibunuh, meski kemudian disangkal. Kontrad menjadi pusat pemantauan terhadap pihak militer dari seluruh penjuru tentang penangkapan dan pembunuhan terhadap kaum komunis dan golongan kiri lain.¹²¹ Dengan pembunuhan itu seperti disebut oleh Jendral Soeharto dan pembantunya mereka tidak usah lagi memberi makan. Kemudian dibuatlah oleh pihak CIA tanda-tanda dalam daftar tersebut.¹²² Lazarsky melanjutkan kisahnya :

“Kami mempunyai catatan yang baik di Jakarta mengenai siapa saja yang telah dididuk.... Pusat-pusat penahanan didirikan untuk menampung mereka yang tidak segera akan dibunuh. Mereka tidak mempunyai cukup regu tembak untuk menghabiskan tahanan itu semua, dan beberapa orang sangat berharga untuk diinterogasi. Infrastruktur PKI hampir dengan segera dapat dibasmi habis. Kami tahu apa saja yang mereka kerjakan. Kami tahu bahwa mereka akan menyinggalkan hidup beberapa orang untuk bahan pengadilan sandiwara....”.¹²³

*“We knew they would keep a few and save them for the kangaroo courts, but Suharto and his advisers said, if you keep them alive, you have to feed them”.*¹²⁴

Tentu saja Jendral Suharto dan kawan-kawannya membantah adanya daftar semacam itu, mereka menyatakan mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan sendiri. Dimana sumber-sumber CIA tersebut menurut Edward Masters hal merupakan suatu yang akan tetap dirahasiakan.¹²⁵

¹²¹ Kadane, *ibid.* hlm. 115.

¹²² Kadane, *ibid.* hlm. 117.

¹²³ Kadane, *ibid.* hlm. 122.

¹²⁴ Kadane, *ibid.* hlm. 4.

Dalam wawancaranya pada tahun 1990, Bob Martens yang sedang menjabat konsultan di Kementerian Luar Negeri AS mengakui bahwa tangannya berlumuran darah, tetapi tidak semuanya buruk, katanya *"It really was a big help to the army. They Probably killed a lot of people, and I probably have a lot blood an my hands, but that's not all bad..."*.¹²⁶ Mantan Direktur CIA William Colby mengakui memerintahkan CIA untuk memusatkan perintah guna membuat daftar nama anggota PKI dan kelompok kiri lain. Perintah ini tahun 1963 dilaksanakan dengan melatih sejumlah kader serikat buruh [SOKSI yang dibentuk militer di bawah kolonel Suhardiman dan unsur-unsur PSI]. Para spion buruh ini merupakan peletak dasar pembunuhan massal pada 1965/1966.

Bagi mantan Dubes Marshall Green, Bob Martens dengan keahliannya merupakan gurui tentang masalah PKI.¹²⁷ Ketika itu tentu saja Mashall Green sama sekali tidak pernah menyinggung soal-soal di atas, mereka harus hati-hati benar karena Sukarno akan segera Mencap CIA dan Green sebagai bandit yang hendak merongrongnya.

Ketika masalah daftar kematian CIA tersebut dimuat di *Washington Post* pada 21 Mei 1990 berdasarkan wawancara dengan Robert Martens, maka ia buru-buru menyangkal beberapa hal. Dikatakan olehnya bahwa penyampaian daftar itu semata-mata kehendak diri pribadinya, tidak ada hubungannya dengan kelompok Kadubes AS di Jakarta yang memang tidak ada. Bahwa daftar itu diambil dari penerbitan resmi PKI sendiri, bukan dari

126

127

pengumpulan selama dua tahun dari kelompok di kedubes tersebut. Penyangkalan khas seorang agen rahasia yang “baik” guna menutupi dosa-dosanya maupun dosa orang lain.***



Bab VII

PEMBERSIHAN “ANTEK-ANTEK” PKI DI ACEH

A. Reaksi Rakyat Aceh terhadap G-30-S/PKI

Dengan adanya dualisme pergerakan yang terjadi di ibukota ne-gara RI, telah menimbulkan kebingungan masyarakat yang se-makin meluas, baik di sekitar ibukota maupun masyarakat di da-erah-daerah. Di satu pihak, versi Letkol Untung telah menyampaikan pengumuman melalui Dekrit-I tanggal 1 Oktober 1965 tentang pem-bentukan dewan Revolusi Indonesia hingga ke desa-desa di da-erah, sementara pihak lain di bawah pimpinan Pangkostrad Mayjen Soeharto juga telah menyampaikan pengumuman pada hari yang sama, yang isinya sangat berlawanan dengan apa yang disampai-kan oleh yang pertama. Tegasnya Pangkostrad selaku Pimpinan sementara ABRI mengecam “G-30-S” yang dikendalikan oleh Letkol Untung sebagai gerakan yang ingin mengambil alih Negara RI dengan cara-cara yang tidak benar dan memulainya dengan gerakan penculikan jendral-jendral TNI/AD.

Akibatnya, sejalan dengan keadaan posisi gerakan 30 Septem-ber yang semakin mendesak oleh tekanan kekuatan gabungan yang dimobilisir oleh Soeharto, maka dewan revolusi di daerah juga tidak sempat terbentuk

sebagaimana yang diinginkan oleh pimpinan pusat Dewan Revolusi Indonesia. Bahkan jika ada daerah-daerah yang sudah terlanjur menyun komposisi calon pimpinan Dewan revolusi daerah, segera mendapatkan khabar ababab peringatan dari orang-orang yang setia dengan jaringan Pangkostrad Soeharto. Begitulah situasi yang sedang panik ketika itu, dan kendali pemerintahan Negara betul-betul dalam keadaan yang tidak menentu. Daerah-daerah masih kebingungan. Di Banda Aceh hanya sekali saja sempat beredar berita dan selebaran yang dilakukan oleh PKI, terutama tentang pembentukan dewan jenderal dan isu akan dibakarnya Kampung Keudah Banda Aceh oleh PKI. Selebaran dan berita ini dimunculkan setelah Letnan Kolonel Untung mengumumkan peristiwa G-30-S dan pembentukan dewan revolusi Indonesia melalui siaran berita RRI pusat pada pukul 07.00 sampai pukul 14.00 siang hari. Dengan itu, sebagian masyarakat Aceh yang sempat mendengar RRI terlanjur mengira bahwa Presiden RI telah diselamatkan dari bahaya oleh Letkol Untung.¹²⁸ Sebaliknya, sejak siang hari beredar desas-desus bahwa di Jakarta sedang terjadi perlawanan terhadap PKI. Perlawanan ini dikendalikan dalam skenario bersama yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto selaku Pangkostrad, dibantu oleh Pangdam Jaya Umar Wira-hadikusumah dan A.H Nasution yang didukung oleh RPKAD dan Yon 328 Kujang bersama kelompok angkatan bersenjata lain, kecuali kesatuan angkatan udara. Apa yang dirasakan dalam perubahan situasi di Jakarta sepertinya sudah dapat dirasakan oleh or-

¹²⁸ Said Umar Al, Habsyi, "Hanya sekali PKI lancarkan Aksinya di Banda Aceh", dalam harian *Waspada* Medan, tanggal 22 September 1986. Al Habsyi adalah Wakil komandan Kompi Legiun Veteran di Banda Aceh. Dialah yang menenangkan masyarakat kampung Keudah ketika PKI menghembus kabar bahwa kampung itu akan dibakar, dan mengkoordinir "jam malam 24 jam".

ang-orang PKI yang berada di Aceh.

Masing-masing mereka, satu-persatu mencoba merubah peri-laku, mendekati tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan meminta perlindungan diri pada Kantor Distrik Kepolisian setempat, pada Markas Kodim daerah dan Kodam Iskandar Muda. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh Pangdam-I Iskandar Muda yang waktu itu dijabat oleh Brigjen Ishak Juarsa yang sangat terkenal anti komunis. Dialah yang memerintahkan agar mengumpulkan semua orang PKI di satu tempat.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, front nasional daerah Aceh mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nyak Adam Kamil. Dalam rapat itu diputuskan bahwa daerah Aceh menyatakan sikap "mengutuk gerakan yang mengambil alih kekuasaan Negara, atas nama dewan revolusi Indonesia." Dan menurut Ishak Juarsa selaku Panglima Daerah dengan tegas menyampaikan bahwa masalah G-30-S ini "diserahkan saja kepada rakyat" apakah ia mau mempertahankan Pancasila atau memihak pada PKI.¹²⁹

Sejak saat itu, massa rakyat di kota-kota seluruh Aceh mulai bergerak melakukan demonstrasi dengan mengumandangkan tak-bir *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ...* mereka menuntut pembubaran PKI dan seluruh antek-anteknya. Setelah itu pada tanggal 16 Desember 1965 diadakan musyawarah alim ulama di Banda Aceh yang melahirkan fatwa bahwa komunisme dalah *kufur* dan *haram* hukumnya bagi kaum muslimin. Selanjutnya Pangdam-I Iskandar Muda memerintahkan satuan aparat di ja-

¹²⁹ Sikap panglima yang menyerahkan kepada rakyat, diterjemahkan oleh para tokoh dan pemimpin masyarakat, bahwa panglima betul-betul marah terhadap aksi-aksi PKI. Sehingga biarlah rakyat yang menghukumnya sampai batas mana rakyat merasa puas dan adil. Di antaranya seperti yang didengar dan dijelaskan oleh Said Abubakar, *Wawancara, Op, Cit.*

jaran dan lingkungannya untuk segera membentuk *screening team* untuk meneliti dan memastikan seseorang terlibat atau tidak dalam PKI serta se-luruh ormas-ormasnya. Ketua *screening team* dipegang oleh Dan-dim, Kapten M. Syah Asyek, dibantu oleh beberapa orang anggota.

Gambaran di atas menunjukkan hampir seluruh elemen sosial dan perangkat pimpinan daerah yang menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dan semakin terorganisir. Sumber kekuatan yang paling utama adalah fatwa ulama yang me-netapkan haram hukumnya menganut ajaran komunis bagi kaum muslimin. Berikutnya sikap Panglima Kodam-I Iskandar Muda, Gubernur dan Kepala kepolisian yang tegas tanpa kompromi terhadap PKI, dukungan gerakan pemuda, pelajar dan kampus serta santri yang meminta agar PKI beserta *Oenderbow*-nya harus dibubarkan. Semua ini adalah kekuatan yang dahsyat, yang bukan hanya PKI yang patah nyalinya, tetapi juga siapa pun tak sanggup melawan kekuatan ini. Inilah yang disebut kekuatan mahakuasanya kehen-dak rakyat yang di bawah kekuatan Maha Kuasa-nya Tuhan, seba-gaimana yang disebut dalam tesis teori demokrasi. Seluruh sumber kekuatan yang disebutkan tadi, dan berbagai kekuatan lainnya ketika secara serentak diminta kembalikepada yang punya yaitu rakyat. Selanjutnya rakyat dengan kekuatan yang dahsyat itu bergerak melawan dan menghancurkan musuhnya, yaitu PKI dan antek-anteknya.

Reaksi dan gerakan rakyat untuk mengejar dan membunuh PKI serta antek-anteknya di seluruh Aceh terus berjalan hingga tahun 1966. Tak terhitung dengan jumlah angka berapa jumlah anggota dan antek-antek PKI yang terbunuh diseluruh Aceh. Di Banda Aceh diketahui dengan pasti, bahwa pimpinan/sekertaris dan wakil sekre-taris Komite PKI Daerah Aceh, Muhammad Samidikin dan Thaib

Adamy telah terbunuh. Thaib Adamy sebelum dipancung di pe-nga-dilan rakyat masih sempat meminta pada yang hadir agar me-nyampaikan salamnya pada Bung Karno dan sempat pula mene-riakkan "Hidup Bung karno". Ini menunjukkan betapa teguhnya ka-der tersebut, Thaib Adamy menghadapi resiko perjuangan. Setelah dua tahun dipen-jara karena pidatonya yang dianggap menghina dan menghasut, berikutnya ia menghadapi hukuman pancung di pe-ngadilan rakyat.

Hal yang sama, berupa hukuman pancung atau pembunuhan juga dialami oleh ketua Gerwani, Ketua Pemuda rakyat, anggota CGMI, Ketua Baperki dan antek-antek PKI yang lain. Mereka se-mua mati di tiang eksekusi yang dilakukan oleh para pemuda ber-sama rakyat yang tersulut emosi. Emosi ini bermula dari tingkah polah anggota PKI yang sering menyiksa dan menyakiti hati rakyat, menyebar fitnah dan propaganda ketika PKI masih jaya dan ber-kuasa. Pimpinan Biro khusus PKI, bernama Nyak Amat juga diajukan ke pengadilan. Keluarga anak dan istri Samadikin kebetulan di-kawal oleh Kosekhan (tim secreening) keluar dari Aceh diantar sam-pai Tanjung Pura-Medan selamat dari pembunuhan. Kasan Siregar meskipun mantan ketua PKI, tapi rajin sholat di mesjid Baiturrah-man juga menemui ajal dieksekusi. Ada sebagian tokoh PKI yang sempat lari yaitu Cut Husen, K. Ampu, dan Lim Ka Kee.

Bersamaan dengan gerakan eksekusi dan pembunuhan terhadap PKI dan entek-anteknya, di Banda Aceh dan Aceh besar mun-cul pula nama-nama eksekutor yang dianggap cukup premanisme seperti Rani plang dan Tuan Saleh. Kedua eksekutor handal ini akhirnya juga hilang tak tentu rim-banya. Khabarnya dihilangkan oleh OTK (orang tak dikenal) tanpa diketahui sebab musababnya.

Peristiwa eksekusi terhadap angota PKI dan seluruh

antek-anteknya sebagaimana di Banda Aceh juga terjadi diberbagai da-erah lain. Hal ini dipahami dengan adanya beberapa tempat pelak-sanaan eksekusi di masing-masing daerah yang dimaksud. Di Ban-da Aceh tempat eksekusi adalah di Pantee Cermin Ulee lheu. Di Aceh besar tempat eksekusinya di Mon Benggali Indrapuri dan di kawasan le seuum Krueng Raya. Di Meulaboh tempat eksekusinya di Kuala Trang dan Rantau Kepala Gajah. DI aceh tengah, Keba-nyakan. Di Pidie terkenal dengan nama Guha Tujoh di kawasan Laweung. Dan sebagainya.

B. Berakhirnya Riwayat PKI di Aceh.

Perkembangan situasi politik tingkat nasional, juga ikut ber-pengaruh ke daerah-daerah seluruh tanah air, tidak ter-kecuali Aceh. Khususnya di Aceh ada dua kebijakan nasio-nal yang paling berpe-ngaruh, di samping kebijakan yang sangat besar artinya bagi rakyat Aceh dalam hal menyela-matkan bangsa dan tanah air dari komu-nisme yang di da-langi oleh PKI. Kebijakan nasional yang pertama adalah ke-berhasilan Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto dalam me-nguasai keadaan yang dibantu oleh Pangdam Jaya Umar Wiraha-dikusumah dan Jendral A.H. NAsution yang selamat dari penculikan Jendral 30 September 1965. Mereka bertiga dibantu pejabat lain berhasil memanfaatkan waktu pada hari 1 Oktober 1965 untuk me-rebut kembali RRI pusat se-kaligus menyampaikan pengumuman Panglima Angkatan No. 002/ Peng/pus/ 1965 untuk membantah pengumuman yang disampaikan oleh Letkol Untung pada pukul 07.00 ten-tang Dekrit-I Dewan Revolusi Indonesia, mengembalikan moral kesatuan TNI/Ad tentang kesetiaan RPKAD, mengatur ren-cana penyerangan PAU Halim, dan meyakinkan Pang-dam-Pang-dam di seluruh wilayah Propinsi hingga kabupa-ten dan kota, terma-suk di dalamnya wilayah Aceh.

Keberhasilan Pangkostrad Mayjen Soeharto, tercermin pada ketegaran Pangdam-I Iskandar Muda dalam memahami dan menguasai informasi dan mengendalikan situasi, yang pada saat itu banyak terjadi kepanikan.

Kebijakan yang kedua adalah Keputusan Menteri dalam negeri No. Des.2/8/45 tanggal 24 April 1966 tentang pemberhentian tidak hormat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD-GR atas nama Thaib Adamy dan Nyak Ismail karena kedua nama itu aktif dalam PKI. Kebijakan ini bukan hanya menambah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, tetapi juga merupakan penegasan yang cukup konkrit untuk menyatakan bahwa PKI merupakan partai terlarang dan sejalan pula dengan fatwa ulama Aceh yang menyatakan haram hukumnya bagi setiap pribadi kaum muslimin. Menyangkut dengan kebijakan daerah adalah seperti yang telah disebutkan diatas, terutama terkait dengan sikap gubernur, Pangdam-I Iskandar Muda, Kepala kepolisian dan fatwa ulama Aceh. Semua itu merupakan *faktor-faktor legitimasi moral bagi masyarakat* untuk mengakhiri riwayat PKI di seluruh Aceh.

Namun masih ada catatan pinggir yang harus diingat, betapa pun peristiwa penyingkiran PKI di Aceh telah diakhiri dengan tragis oleh kehendak rakyat, juga masih ada beberapa hal yang perlu dicari jalan untuk diluruskan kembali. Mungkin ada sisi pandang yang menggugah nurani dan akal sehat jika kita membaca kembali apa yang menjadi himbuan Tengku Darwis Djeunie (Ketika itu panglima GAM di Batee Iliek) yang intinya, "sejarah PKI di Aceh harus diluruskan" terutama soal pemberangusan tahun 1965, yang menurutnya cukup banyak rakyat Aceh yang tidak tahu apa-apa mengenai PKI menjadi korban pembunuhan dengan tuduhan sebagai anggota PKI dan simpatisannya. Sementara di pulau Jawa sebagai basis PKI hukumannya

hanya sekedar ditahan kemudian dilepaskan kembali. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Indo-nesia.¹³⁰

Apa yang disinyalir oleh Tgk. Darwis Djeunieb, adalah merupa-kan salah satu sudut pandang betapa masalah pemberangusan PKI di Aceh telah menjadi sedemikian rupa, sehingga seperti lepas ken-dali dan jatuh korban begitu banyak, dan termasuk mereka korban yang sia-sia tanpa ikut terlibat PKI. Dari sejumlah sumber yang di-dengar dari keterangan Panglima penguasa militerwaktu itu, pernah menyebutkan 3000 rakyat Aceh yang jadi korban, baik karena ke-terlibatannya maupun karena dianggap terkait atau terlibat dengan PKI. Ada juga yang salah tangkap, seperti yang dialami Ibrahim Kadir dari aceh tengah. Khususnya di daerah pedalaman Aceh yang umumnya petani miskin. Bukan tidak mungkin mereka tertuduh karena menerima cangkul dari BTI, yang diplesetkan menjadi Barisan Tani Islam padahal sebenarnya adalah BTI (barisan Tani Indonesia), yang jelas-jelas *oenderbouw* PKI yang sangat aktif. Begitu juga yang terjadi dengan semua bangunan, rumah, gedung atau kantor yang ada hubungannya dengan PKI. Semua itu juga rata dengan tanah karena diamuk massa pada saat itu.

C. Pembersihan Aparat Pemerintah Sipil

Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi/Panglima operasi Pe-mulihan Keamanan dan Ketertiban Major Jendral TNI Suharto¹³¹ atas nama Presiden Panglima Tertinggi Sukarno dalam instruksinya telah memutuskan kepada Kompartimen-kompartimen, Departemen, Badan/Lembaga Pe-

¹³⁰ "Sejarah G.30. S/PKI Di Aceh Perlu Diluruskan", *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, 4 Oktober 2000. Di dalamnya termuat komentar Tengku Darwis seperti disebutkan diatas.

¹³¹ *Kompas*, 17 November 1965.

merintah untuk melaksanakan penertiban.

Oleh karena itu di seluruh sektor baik pemerintahan maupun rakyat sipil diadakan pembersihan total dan besar-besaran. Di antara-ranya pada aparat-aparat sipil pemerintahan. Pembersihan LKBN atau kantor berita nasional dianggap mutlak perlu karena tempat adalah pusat pemberitaan nasional, dimana saat itu bahkan sampai saat ini, informasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Khususnya saat itu dimana situasi sangat genting.¹³² Di Departemen-departemen lain juga mulai mengadakan pembersihan ber-kenaan dengan adanya gerakan kontra revolusi Gesta-pu. Di berbagai Departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan diadakan pemeriksaan terhadap para pegawainya. Daftar-daftar absensi diper-keras dan diteliti.¹³³ Para pegawai yang sejak tanggal 1 Oktober 1965 tidak masuk kantor diharuskan memberi keterangan.

Selain itu sepasukan KKO serta dibantu oleh kesatuan-kesatuan dari Angkatan Bersenjata lainnya pada tanggal 11 Oktober 1965. juga mengadakan pembersihan terhadap oknum-oknum kon-trev Gestapu yang bercokol di daerah pelabuhan Tanjung Priok.¹³⁴ Hal ini dilakukan karena pelabuhan ini adalah akses bagi keluar masuknya orang dari dan keluar untuk pulau Jawa pada umumnya dan Jakarta pada khususnya.

Sementara itu dalam melaksanakan "pembersihan" tersebut Presiden Soekarno meminta agar dilakukan dengan tenang dan tertib. Ketenangan dan ketertiban yang dimaksud bukanlah kete-nangan yang beku melainkan ketenangan yang dinamis. Kete-nangan dan ketertiban yang bertu-

¹³² *Kompas*, 8 Oktober 1965.

¹³³ *Kompas*, 13 Oktober 1965.

¹³⁴ *Kompas*, 15 Oktober 1965.

juan membantu Presiden Soe-karno dan ABRI.¹³⁵ Membantu Presiden Soekarno dengan memberikan fakta-fakta sebanyak mungkin tentang gerakan PKI tersebut.

Departemen Iuran Negara sejak tanggal 12 Oktober 1965 telah mengadakan pembersihan didalam tubuh Departemen Iuran Negara dari oknum-oknum yang terlibat atau diduga telah terlibat apa yang dinamakan "gerakan 30 September".¹³⁶ Menteri Kehakiman, A. Astrawinata SH, mengadakan pembersihan di departemennya dengan memberhentikan untuk sementara para pegawai yang sejak tanggal 1 Oktober tidak masuk kerja tanpa alasan. Sedangkan bagi mereka yang terlibat telah diadakan tindakan yang tegas pula.

Pembersihan ini didukung oleh para menteri dan pejabat tinggi. Di antaranya yaitu Menko/Menteri Agama yang membenarkan dan menerima baik untuk dilaksanakannya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sebuah team khusus dalam rangka pembersihan Departemen Agama dari anasir/oknum yang diduga kuat mempunyai hubungan dengan.¹³⁷ "Gerakan 30 September" dan atau turut terlibat dengan PKI. Sementara itu MDN Dr. Sumarno melaporkan kepada Presiden Sukarno pada tanggal 3 november 1965 situasi keamanan dari daerah-daerah yang laporannya telah masuk ke tangan Menteri Dalam Negeri. Dikatakan oleh Dr. Sumarno, bahwa di daerah Boyolali dan Klaten kini sedang giat diadakan pembersihan-pembersihan terhadap gerombolan kontrarevolusi.¹³⁸ Pegawai Imigrasi Tuntut pembersihan Drs. B. Suwarno atas nama seluruh pegawai kantor imigrasi daerah Jakarta Raya dan sekitarnya meno-

¹³⁵ *Kompas*, 18 Oktober 1965.

¹³⁶ *Kompas*, 20 Oktober 1965.

¹³⁷ *Kompas*, 3 November 1965.

¹³⁸ *Kompas*, 6 November 1965.

lak untuk dipimpin oleh oknum-oknum yang terlibat dalam gerakan kontra revolusi "Gerakan 30 September". Peperda Jaya dalam telah menetapkan Direktorat Imigrasi untuk dibersihkan.¹³⁹

D. Pembersihan Aparat Militer

Berdasarkan instruksi Menko Hankam/Kasab, bahwa Hansip harus ikut aktif membantu ABRI dalam pelaksanaan operasi-operasi pembersihan terhadap gerombolan yang me-namakan dirinya "Gerakan 30 September" dalam rangka pemulihan keamanan adn ketertiban.¹⁴⁰

Pembersihan Di Kodam V Djaya Pangdam V Jaya selaku Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya dilakukan dengan cara memerintahkan kepada semua Komandan/Kepala/ Perwira dalam lingkungan Kodam V Jaya untuk melakukan pember-sihan di lingkungan instansinya masing-masing terhadap oknum-oknum tertentu baik militer maupun sipil serta pekerja¹⁴¹ Selain itu, sebagai kelanjutan tindakan-tindakan AURI dalam rangka pember-sihan dan pengusutan terhadap anggota-anggota yang diduga terlibat dalam gerakan kontra revolusi dengan apa yang dinamakan "Gerakan 30 September" maka Komando Pengusutan AURI¹⁴² me-laporkan hasil-hasil pemeriksaannya kepada Men/Pangau a.i. Lak-samana

Menko Hankam/Kasab Menteri Koordinator Kompartimen Per-tahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Dr A.H. Nasution menginstruksikan kepada departemen-departemen dalam lingkungan Kompartimen Pertahanan Keamanan/KASAB un-tuk melaksanakan

¹³⁹ *Kompas*, 6 November 1965.

¹⁴⁰ *Kompas*, 11 Oktober 1965.

¹⁴¹ *Kompas*, 16 Oktober 1965.

¹⁴² *Kompas*, 26 Oktober 1965.

pembersihan di dalam departemen masing-masing terhadap oknum-oknum dan organisasi PKI.¹⁴³

Menko Kompartimen Maritim Mayjen KKO Ali Sadikin dengan cekatan berhasil mengamankan kompartimennya, sehingga sejak terjadinya gerakan kontra revolusi G-30-S, tak sebuah kapalpun terhenti akibat sabotase. Sekalipun demikian Menko Ali Sadikin terus mengadakan pembersihan-pembersihan di lingkungan kompartimen Maritim.¹⁴⁴ Menko/Hankam/KASAB Djenderal A.H. Nasution kemudian mengeluarkan instruksi untuk mencapai keserasian dan keseimbangan antara upaya dan tujuan serta hasil guna yang se-maksimal mungkin dalam pelaksanaan penertiban dan pembersihan dalam tubuh Angkatan Bersenjata serta semua aparat di bidang keamanan.¹⁴⁵

E. Gerakan Pembersihan PKI di Masyarakat

Gerakan pembersihan PKI dan antek-anteknya di seluruh daerah Indonesia meliputi seluruh lapisan kehidupan dari pemerintahan, bidang pendidikan dan masyarakat. Di masyarakat, pembersihan ini masuk ke kampung-kampung dan desa-desa. Pengurus RK II Kelurahan Bukit Duri Jatinegara telah mengambil prakarsa membersihkan empat buah RT yang berada diwilayah RK II, dari oknum-oknum yang secara langsung dan terlibat dalam apa yang dinamakan "Gerakan 30 September".¹⁴⁶ Pada tgl. 21 Oktober 1965 pemeriksaan dari rumah kerumah. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pembersihan ibukota Jakarta-

¹⁴³ *Kompas*, 4 November 1965.

¹⁴⁴ *Kompas*, 4 November 1965.

¹⁴⁵ *Kompas*, 16 November 1965

¹⁴⁶ *Kompas*, 19 Oktober 1965.

Raya dari oknum-oknum kon-trev G-30-S.¹⁴⁷

Dalam waktu bersamaan di daerah Cipanas dilakukan operasi oleh ABRI untuk menyapu bersih kontrev Gestapu. Kemudian di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1965 suatu rapat raksasa yang dikoordinir oleh Kesatuan Aksi Pengganyangan, ratusan ribu massa rakyat yang tergabung dalam 50 parpol/orpol/ormas dan golkar telah membanjiri Taman Untung Suropati¹⁴⁸

Sejumlah anggota Front Nasional cabang Kotapraja Yogyakarta juga diberhentikan untuk sementara sesuai dengan surat keputusan Pangdam VII/Diponegoro selaku Pepelrada Jateng dan surat keputusan Dan Rem 72/Diponegoro sebagai pengawas dan pembantu Pepelrada Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁴⁹

F. Pembersihan dalam Lembaga-Lembaga Non-Negara

Pembersihan atau *screening* di berbagai lapisan dilakukan juga pada lembaga-lembaga di luar pemerintahan atau negara. Pengurus Daerah Front Nasional Jakarta Raya dalam sidangnya pada tanggal 23 Oktober 1965 memutuskan; memberhentikan sementara dari keanggotaan pengurus/pega-wai petugas PD Front Nasional Jakarta Raya, memberhentikan sementara organisasi politik dan organisasi-organisasi massa dari keanggotaan Front Nasional.¹⁵⁰ Alat Negara dari kesatuan Ki-B 328 selama beberapa hari telah mengadakan pembersihan disekitar kelurahan Petojo Binatu. Sebagai hasil pembersihan ini telah ditangkap 19

¹⁴⁷ *Kompas*, 23 Oktober 1965.

¹⁴⁸ *Kompas*, 27 Oktober 1965.

¹⁴⁹ *Kompas*, 8 November 1965.

¹⁵⁰ *Kompas*, 28 Oktober 1965.

orang yang dicurigai ter-sangkut dalam Gerakan Kontra Revolusi 30 September.

Pembersihan Diri Dari G30S MAGELANG PWI (persatuan War-tawan Indonesia) perwakilan Kedu/Malang dilakukan dengan me-mecat 2 anggotanya karena terlibat dalam "ges-tapu". PONTIANAK. Sedangkan Bambang Soemitro Wakil Kepala cabang kantor berita "Antara" Pontianak oleh Pengu-asa/Pimpinan "Antara" Pusat di Jakarta dinon-aktifkan dari tugas dan jabatannya.¹⁵¹

Di lingkungan perguruan tinggi, Drs. A. Koesdarminta, Rektor Parahyangan menginstruksikan dalam rangka pembersihan dari oknum2 "G-30-S", semua dosen dan mahasiswa diwajibkan menyatakan diri Orpol/Ormas apa yang pernah dimasukinya. Pernyataan itu harus disampaikan selambat-lambatnya pada tgl. 5 Nopember 1965 pada pimpinan Fakultas.¹⁵²

G. Reaksi Etnis Cina

Etnis Cina sebagai salah satu etnis yang dicurigai terlibat dalam PKI karena negara RRC asal etnis tersebut adalah negara yang notabene komunis. Namun demikian etnis tersebut meyakinkan kepada masyarakat bahwa secara etnisitas mereka tidak terlibat. Dan jika ada yang terlibat maka hal itu hanyalah oknum dan tidak ada hubungannya dengan etnis itu. Dari Sukabumi pada tanggal 26 Oktober 1965 WNI keturunan Tionghoa telah menyatakan tekadnya mengutuk gerakan kontra revolusi 30 September. Mereka juga mengatakan tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia.¹⁵³

¹⁵¹ *Kompas*, 6 November 1965.

¹⁵² *Kompas*, 13 November 1965.

¹⁵³ *Kompas*, 30 Oktober 1965.

Tanggapan juga diberikan oleh Menlu RRC Chi Peng-fei yang memberikan jaminan pada Menlu Adam Malik, bahwa Peking tidak lagi mempunyai atau menjalankan biro khusus pembinaan bagi orang-orang Cina perantauan. Dan Pemerintah RRC menegaskan pada orang-orang Cina perantauan, bahwa mereka harus loyal pada negara dan pemerintah tempat mereka tinggal.¹⁵⁴

Menurut menpen B.M Diah, W.N.I. Keturunan Asing. khususnya keturunan Cina pun adalah bagian dari pada tubuh bangsa Indonesia, oleh karena itu penyelesaian masalahnya dewasa ini tak boleh tegang dengan semangat bermusuhan tetapi harus dengan semangat persaudaraan memberi dan menerima serta didik mendidik melalui proses asimilasi.¹⁵⁵

H. Tahanan Pulau Buru

Pulau Buru dulu memang bukan sebuah pulau terkenal. Kecuali dalam pelajaran Ilmu Bumi ada sedikit keterangan bahwa pulau itu menghasilkan minyak kayu putih yang asli. Sampai pada tahun 1969. Empat tahun sesudah peristiwa G30S. Dan mulailah pulau yang terpencil itu mendapat perhatian.¹⁵⁶ Awal tahun 1972 pemerintah memasyarakatkan tapol Buru. Pemasyarakatan disini berarti memberi kesempatan untuk mendatangkan keluarga mereka.¹⁵⁷ dengan tiga syarat yaitu, mental pancasila, berproduksi cukup dan kesiediaan keluarga yang bersangkutan.

Bulan Juli ini, rombongan pertama para keluarga

¹⁵⁴ *Kompas*, 30 Maret 1973.

¹⁵⁵ *Kompas*, 19 Oktober 1966.

¹⁵⁶ *Kompas*, 16 Desember 1971.

¹⁵⁷ *Kompas*, 31 Agustus 1971.

tahanan politik mulai dikirim ke Pulau Buru. Pemerintah, dengan kapal-kapal trans-port serta keuangan yang diperlukan.¹⁵⁸ Sekitar 700 isteri dan anak-anak para tahanan politik yang ditahan dipulau Buru dikirimkan kepulau itu untuk tinggal disana. Mereka adalah keluarga sekitar 90 orang Tapol yang telah memenuhi syarat-syarat boleh menerima keluarga masing.¹⁵⁹

Sebanyak 2500 tahanan G-30-S/PKI dari golongan B yang termasuk klasifikasi "berbahaya" kalau dikembalikan ketengah-tengah masyarakat diberangkatkan ke pulau Buru untuk mulai penghidupannya yang baru disana.¹⁶⁰ Jaksa Agung Mayjen Sugih Arto dalam rangka 'resettlement' ('pene-tapan kembali') tahanan G30S/PKI, mengatakan bahwa Pemerintah secara bergelombang telah selesai memindahkan sebanyak 2500 tahanan politik yang dikategorikan dalam golongan B kepulau Buru.¹⁶¹

Dalam laporannya mengenai hasil peninjauan Komisi II ke Pulau Buru akhir Nopember 1969, ketua Komisi II Imron Rosyidi menyatakan bahwa keadaan para tahanan politik disana adalah jauh lebih baik dari pada keadaan para transmigran.¹⁶² Para tahanan politik di pulau Buru yang berjumlah 2500 orang itu berhasil memasarkan hasil pertaniannya diluar pulau tempat tahanannya. Hasil-hasil yang dipasarkan di Ambon antara lain berupa kacang hijau, sayur mayur dan beberapa hasil pertanian lainnya.¹⁶³

Maksud dari Penempatan tapol G30S/PKI golongan B dipulau Buru bukan bertujuan untuk memencilkan mereka

¹⁵⁸ *Kompas*, 9 Mei 1972.

¹⁵⁹ *Kompas*, 22 Juni 1972.

¹⁶⁰ *Kompas*, 2 Agustus 1969.

¹⁶¹ *Kompas*, 3 Oktober 1969.

¹⁶² *Kompas*, 14 Februari 1970.

¹⁶³ *Kompas*, 22 Juli 1970.

dari masyarakat, tetapi guna memberi kesempatan baru bagi tapol untuk hidup ber-sama keluarga mereka nantinya. Karena jika kembali ke lingkungan masyarakatnya semula, mereka hanya akan mempertaruhkan keselamatan mereka. Adapun tujuan akhir pemerintah dalam membina para tahanan politik dipulau Buru adalah menjadikan mereka Pan-casila sejati. Kalau mereka sudah jadi Pancasila, maka dengan sendirinya selesailah tugas Bap-reru dan para Tapol akan menjadi orang merdeka kembali seperti warganegara lainnya.¹⁶⁴

Sembilan puluh sembilan persen tahanan politik yang tinggal di pulau Buru pada akhirnya memeluk agama dan mempelajarinya. Namun tidak diteliti secara seksama apakah Tapol tersebut melaku-kanya dengan kesadaran sendiri atau sebaliknya

Mengenai Tapol Buru membuat tidaklah beralasan kalau masih ada yang mengatakan, bahwa perlakuan terhadap ta-hanan politik saat itu tidak berkemanusiaan. Palang Merah Internasional ketika meninjau Pulau Buru menyatakan kepuasannya. Ini suatu bukti bahwa pemerin-tah memperlakukan para tapol dengan baik. Se-dangkan bagi yang lain mungkin Pulau Buru cuma berarti tempat di-mana sekian ribu tapol sedang menunggu proses resosiali-sasi.^{165***}



¹⁶⁴ *Kompas*, 7 Oktober 1972.

¹⁶⁵ *Kompas*, 12 November 1973.

138 *Pembantaian PKI: Analisis Sosial-Politik Konflik Horizontal di Aceh, 1965-1967*

Bab VIII

PKI SEBAGAI “BAHAYA LATEN”

Kendatipun anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya sudah di-larang, diburu, ditangkap dan banyak yang berakhir dengan kema-tian, namun bahayanya dianggap masih saja mengintai Indonesia. Beberapa pejabat Orde Baru, khususnya pejabat di lembaga-lembaga sipil yang berasal dari militer, membuat terminologi-terminologi baru tentang “musuh”. Jaksa Agung Mayjen Sugih Arto, misalnya, menyebutkan bahwa Komunis merupakan bahaya laten sehingga untuk memberantasnya perlu diadakan “Operasi Otak-Hati-Perut”. Otak ada-lah lambang indoktrinasi Pancasila, Hati adalah masalah moralitas politik dan perut adalah lambang ekonomi. Meskipun PKI yang tadinya legal di bawah Orde Lama telah dibubarkan, mereka akan tetap bergerak di bawah tanah. Gerakan PKI bawah tanah ini sangat merisaukan para manajer politik Orde Baru ketika itu. Karena itu komunis merupakan bahaya yang *laten*,¹⁶⁶ sebab dalam gerakannya tidaklah lepas dari gerakan komunis internasional. Mungkin saja bahwa para mantan anggota PKI atau ormas-ormas *onderbouw*-nya itu melarik-

¹⁶⁶ *Latent*, (Bhs. Inggris) artinya tak terlihat.

an diri ke hutan-hutan karena ingin menghindari pembantaian. Sangat mungkin sekali bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi selain lari menghindari dan menyelamatkan diri saja, tanpa ada kekuatan untuk mengadakan serangan balas yang memang mereka tak pernah terlatih untuk itu. Namun keberadaan mereka kemudian menjadi preseden bu-ruk bagi politik sehingga dirumuskanlah konsep “bahaya laten” ini. Jaksa Agung Mayjen Sugih Arto¹⁶⁷ adalah tokoh Orde Baru pertama yang melontarkan istilah ini.

Tetap waspada dan sekaligus memberantas sisa-sisa ke-kuatan laten PKI, inilah salah satu dari tiga masalah besar nasional yang dihadapi oleh penguasa Orde Baru pada saat-saat pertama naiknya kalangan militer sebagai pemegang kekuasaan politik Indonesia. Kemudian, sebagaimana disimpulkan oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan di depan DPR-GR¹⁶⁸ tanggal 16 Agustus 1967 bahwa betapa perlu-nya memelihara terus kewaspadaan itu dibuktikan oleh masih banyaknya anggota PKI yang belum tertangkap di Kalimantan Barat.¹⁶⁹ Di Aceh sendiri, PKI tidak ada yang melarikan diri ke hutan atau ke mana pun. Hampir semua mereka habis diganyang sejak 1 Oktober 1965. Pembantaian terhadap mereka di Aceh adalah pembantaian pertama dari semua rentetan pembantaian PKI di seluruh Indonesia.

A. Regimentasi Politik Orde Baru Terhadap Paham-Paham Kiri

Politik regimentasi Orde Baru tentang PKI diarsiteki oleh

¹⁶⁷ *Kompas*, 1 Maret 1967.

¹⁶⁸ DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

¹⁶⁹ Rosihan Anwar, “Peta Bumi Politik Sekarang”, *Kompas*, 27 Agustus 1968.

Ali Murtopo. Ia menulis tentang studi-studi strategis dalam memperkuat Orde Baru.¹⁷⁰ Tentang Golongan Ekstrim, Asisten Pribadi Presiden dan Ketua Urusan Perbekalan Pemilu, Brig-jen Ali Murtopo dalam *briefing*nya kepada pejabat-pejabat tingkat propinsi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, membagi golongan ekstrim dinegeri ini kedalam golongan yang ingin mengubah Pancasila dan UUD 45.¹⁷¹ Menjadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan adalah kelompok aga-ma yang menganggap ideologi Pancasila sebagai ancaman. Adapun ekstrim kiri jauh lebih canggih dalam menjalankan misi dan aksi politiknya, namun secara ideologis, ekstrim kiri berkeinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme atau sosialisme atau ideologi-ideologi kiri lainnya.

Regimentasi politik Orde Baru dalam menghadapi kelompok ekstrim kiri ini kemudian berubah pasca G-30-S/PKI. Ketika terdapat sedikitnya 8225 anggota sisa-sisa PKI yang masih “berkeliaran” di Kalimantan Barat dalam berbagai organisasi dan pergerakan. Jumlah sisa-sisa eks-PKI di daerah Kalimantan Barat tercatat sebanyak 8225 orang. Berhubung mereka belum tertangkap, maka kegiatan-nya masih merupakan bahaya *laten*.¹⁷² Kapendam XII/Tanjungpura Major Drs. Soewardi Poespojo menyebutkan bahwa sampai saat ini jumlah tapol PKI yang cukup besar ini menjadi “ancaman” baru bagi Negara Orde Baru yang belum lama tegak ini. Istilah “bahaya laten” kemudian menjadi strategi politik yang sangat penting dalam meng-halau dan memberantas kecambah-kecambah komunisme yang senantiasa mengintai Indonesia.

¹⁷⁰ Lihat salah satunya, Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1969).

¹⁷¹ *Kompas*, 6 Mei 1970.

¹⁷² *Kompas*, 6 Agustus 1970.

Pengejaran terhadap orang-orang yang dicap atau dituduh PKI atau sekedar antek-anteknya atau anggota-anggota organisasi-organisasi *onderbouw*-nya menjadi fokus perhatian yang sangat luar-biasa dalam periode awal kekuasaan Orde Baru. Operasi Intel Kodam V ciduk aktivis-aktivis PKI di Jakarta. Ka Pendam V/Jaya Letkol. Wirjadi SH menegaskan bahwa mengingat Komunisme merupakan bahaya laten bagi terselenggaranya masyarakat Pancasila, maka operasi-operasi terhadap G30S/PKI oleh ABRI ditingkatkan terus dan mendapatkan *support* dari masyarakat.¹⁷³ Masyarakat pun ketika itu telah kehilangan kesadaran humanismenya sehingga manusia hanya dikategorikan dua saja, baik dan tidak baik, musuh atau kawan, yang Pancasilais dan yang PKI. Periode pengajaran ini, meskipun sudah diambil alih sepenuhnya oleh jajaran-jajaran militer, masih membekaskan pada masyarakat akan *dikhotomi simplistis* ini. Pengejaran anggota-anggota sisa-sisa PKI ini menjadi kisah yang dinikmati masyarakat, bagaikan sebuah perang melawan kejahatan dan musuh yang sulit terkalahkan dan di akhir cerita biasanya selalu saja pihak militer yang keluar sebagai pemenangnya setelah berhasil menciduk aktivis-aktivis PKI di tempat-tempat persembunyiannya.

Soeharto, sebagai pengendali kekuasaan Orde Baru pun memulai episode bahaya laten PKI ini dalam setiap kesempatan yang ada. Dari Sidang Lengkap Kabinet Pembangunan yang dipimpinnya, Soeharto masih menyebutkan bahwa sisa-sisa G30S/PKI gunakan pertentangan antar kita sebagai peluang untuk mengadakan “*come back*”-nya. Dari sini ia mencoba merekatkan kembali persatuan Indonesia dalam format baru; sama-sama memburu dan mengejar sisa-sisa PKI sehingga seluruh rakyat akan bahu-membahu

¹⁷³ *Kompas*, 17 Februari 1968.

bersatu di ba-wah panji-panji Pancasila dan Orde Baru. Soeharto dalam Sidang Lengkap Kabinet Pembangunan telah memper-ingatkan agar kita tetap waspada terhadap sisa-sisa G-30-S/PKI, tin-dakan-tindakan subversi serta tindakan-tindakan ekstrim lainnya yang sampai sekarang masih laten.¹⁷⁴ Dari sini pulalah dipancarkan sebuah pilar politik bahwa siapa saja yang akan melwan Orde Baru adalah melawan Pancasila, adalah musuh negara. Dikatakan oleh Presiden bahwa sisa-sisa G-30-S/PKI akan menggunakan cara-cara pertentangan (kelas, kepentingan, ideologi, dan sebagainya) sebagai metode.

Bahaya laten PKI pada akhirnya telah juga menjadi konsep untuk menghancurkan kelompok-kelompok ideologis lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan politik Orde Baru. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa kekuatan-kekuatan politik agama (Islam) menjadi redup, juga ideologi-ideologi separatis di daerah-daerah menjadikan *signal* yang menakut-kan jika berencana untuk bergerak melawan kedaulatan negara.

B. Bersih Lingkungan: Surat Bebas Organisasi Terlarang PKI

Presiden Soeharto menegaskan, bahaya laten bagi Indo-nesia saat ini bukan hanya berasal dari sisa-sisa G-30-S/PKI. Tapi juga dari kekuatan-kekuatan sosial-politik lainnya, yang dalam usaha mengembangkan dan mencapai keinginan-ke-inginannya, ternyata menempuh cara-cara inkonstitusionil.¹⁷⁵

Setelah penumpasan PKI dan antek-anteknya paska gerakan 30 September 1965 tindak lanjut yang dilakukan

¹⁷⁴ *Kompas*, 13 Agustus 1968.

¹⁷⁵ *Kompas*, 20 Februari 1974.

oleh pemerintah bersama aparat-aparatnya adalah “pembersihan”. Pembersihan orang-orang yang terlibat PKI ini dilakukan dengan cara terang-terangan maupun diam-diam. Istilah “pencidukan” menjadi populer sekaligus menakutkan bagi masyarakat Indonesia di seluruh lapisan.

Pada saat itu diterbitkan apa yang disebut dengan “surat bersih diri” atau “surat bebas G-30-S/ PKI” untuk menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki keterlibatan dengan PKI. Segelintir orang memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntungan. Beberapa oknum bahkan membuat sendiri blanko surat bebas G-30-S untuk diperdagangkan. Sebagai contoh, pada bulan Mei 1974 ditemukan blanko-blanko Surat Bebas G30 S yang sudah dicap di rumah Freddy Supit, seorang penodong/pencuri mobil yang selama ini menjadi buronan polisi Jakarta yang tertangkap dipasar Mayestic, Kebayoran Baru.¹⁷⁶ Meski saat itu blanko tersebut sudah tak diperlukan lagi, tetapi hal ini membuktikan bahwa blanko tersebut pernah diproduksi secara *illegal* untuk memenuhi kebutuhan orang yang memerlukannya. Pada waktu itu surat bebas G-30-S ini wajib dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia yang tidak terlibat dalam Gerakan G-30-S/PKI..

Beberapa tahun kemudian, kewajiban untuk memiliki surat bebas G-30-S/PKI telah dihapuskan. Misalnya di Jawa Timur Penghapusan ini dimulai sejak tanggal 22 Desember 1969. Penghapusan itu dilakukan oleh Pelaksana khusus Pangkopkamtib daerah Jawa Timur, Mayjen. M. Yasin dalam surat keputusannya no. 13/12/ 1969.¹⁷⁷

Sementara itu di Jakarta masih diberlakukan kepemilikan surat tersebut. Pendatang baru harus membawa surat bebas G-30-S/PKI. Surat keterangan bebas G-30-S/PKI saat

¹⁷⁶ *Kompas*, 20 Mei 1969.

¹⁷⁷ *Kompas*, 27 Desember 1969

itu diperlukan untuk masalah-masalah yang menyangkut kepen-dudukan di wilayah DKI Jakarta Raya. Setiap penda-tang/penduduk baru yang bermaksud menetap di Jakarta masih diwajibkan memiliki surat keterangan tersebut dari tempat asalnya.¹⁷⁸

Deputy KSAD yang baru, Mayjen M. Yasin, dalam suatu pertemuan dengan wartawan-wartawan di Surabaya mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak pemimpin Indonesia jang lemah namun ditutupi dengan utjapan "*hij is een goode vader*" (ia seorang bapak jang baik).¹⁷⁹ Ia mengatakan hal tesebut sehubungan tidak beraninya pe-mimpin-pemimpin Indonesia untuk meninjau kembali pent-ing-tidaknya surat bersih diri dari Gerakan 30 September. Na-mun demikian dalam keputusan no. 020-KOPKAM-4-1970 KOP-KAMTIB (Ko-mando Pemulihan Keamanan Ketert-iban) Pusat dije-laskan mengenai Tatacara Pemberian Surat Keterangan Bebas Gestapu, penggunaannya dan jangka waktu berlakunya.¹⁸⁰

Setelah terbitnya keputusan tersebut, 1969 Surat kete-rangan "bersih diri" (tak terlibat G30S/PKI) yang sudah Di-hapuskan di Jawa Timur Desember 1969 dinyatakan berlaku kembali. Dengan instruksinya no. Ins/01/Komda/70 tanggal 27 Juli 1970 pelaksana khusus Pangkopkamtib Jatim menu-gaskan Danrem-danrem 018 sampai dengan 084 mem-bantu kepolisian¹⁸¹ dalam rangka penerbitan surat bersih diri tersebut.

Dalam keputusan no 020 Kopkam-4-1970, Komando Pe-mu-lihan Keamanan Ketertiban Pusat memutuskan, bahwa su-rat be-bas G-30-S dapat diperoleh di Kepolisian. Surat itu

¹⁷⁸ *Kompas*, 23 Januari 1970.

¹⁷⁹ *Kompas*, 3 Februari 1970.

¹⁸⁰ *Kompas*, 22 Mei 1970.

¹⁸¹ *Kompas*, 18 Agustus 1970.

dapat diperoleh dengan menunjukkan surat berkelakuan baik dari lurah setempat.¹⁸² Surat bersih diri itu berlaku untuk satu kali jalan. Tetapi atas kebi-jaksanaan Kepala Polisi Hugeng, Surat Bebas G-30 S yang jangka waktu berlakunya surat keterangan bebas G.30 S yang tadinya hanya berlaku untuk satu kali jalan atau *exit* menjadi berlaku 3 bulan.¹⁸³ Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pro-ses untuk mendapatkan Surat-Bebas G-30-S/PKI yang sebelumnya bertele-tele, dan memuat hal-hal yang kurang tepat akan diseder-hanakan.¹⁸⁴

Sidang paripurna khusus DPRD Kotamadya Bandung Kamis 19 Nopember menerima dengan bulat usul inisiatif Bagir Manan S.H. dan kawan-kawan agar Pemda Kotamadya Bandung mengusulkan kepada gubernur Jawa Barat, Laksus Pangkopkamtibda Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat,¹⁸⁵ agar surat bebas G-30 tidak diwajibkan bagi pelajar.

Sejak urusan surat bebas G-30-S/PKI dialihkan dari Kodim ke pihak Kepolisian, kini Komresko 961 Kota Jogja sibuk luar biasa. Lebih-lebih menjelang tahun ajaran baru. yang menjadi problem sekarang adalah murid-murid yang baru saja lulus SMP ikut berdesak-desakan mencari surat bebas G-30-S tersebut.¹⁸⁶

Oleh sebab itu kemudian surat Bebas G30S/PKI Bagi Anak2 Sekolah ditinjau kembali. Kriteria bagi pelajar yang ditinjau untuk tidak perlu memiliki surat tersebut adalah, anak-anak sekolah yang dewasa ini masih dibawah umur 16 tahun, pada waktu meletusnya Berhubung masih ban-

¹⁸² *Kompas*, 1 September 1970.

¹⁸³ *Kompas*, 5 Oktober 1970.

¹⁸⁴ *Kompas*, 16 Oktober 1970.

¹⁸⁵ *Kompas*, 23 November 1970.

¹⁸⁶ *Kompas*, 10 Desember 1970.

yaknya orang yang belum mengetahui untuk apa dan siapa surat keterangan bebas G30S/PKI, maka AKBP Pra-mono Kamis kemarin memberikan perincian-perinciannya.¹⁸⁷ Kepala Dinas Humas Komdak Metro Jaya itu menerangkan bahwa surat keterangan itu diberikan hanya diperlukan untuk pindah tempat tinggal antar-propinsi atau bertugas keluar wilayah Kabupaten lebih dari satu bulan.¹⁸⁸ Surat itu juga harus dimiliki oleh mereka yang ingin mendaftarkan diri sekolah atau melamar pekerjaan, baik di pemerintahan, ketentaraan maupun swasta.

C. Periode I (PKI 1926)

Seorang Belanda bernama Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet datang ke Jawa pada tahun 1913, dan bekerja sebagai pemimpin redaksi harian *Soerabajasch Handelsblad*, Sura-baya, selama dua bulan. Kemudian dia menjabat sebagai sekretaris pada Kamar Dagang Semarang (*Semarangse Handelsvereniging*) ternyata dia adalah seorang aktivis politik dan propagandis paham sosialis di Hindia Belanda.

Pada bulan Mei 1914, bersama Ir. Adolf Baars, dan beberapa orang Belanda peranakan mendirikan perkumpulan baru di kalangan orang-orang Indo, bernama *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV), pada masa awal pergerakan nasional, mengikuti berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912, dan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912.

Siasat yang ditempuh Sneevliet dan ISDV, karena tidak

¹⁸⁷ *Kompas*, 26 Mei 1972.

¹⁸⁸ *Kompas*, 14 November 1973.

berhasil menarik anggota yang banyak, adalah mengusahaan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam (SI) yang pada waktu itu berkembang pesat sebagai pergerakan kebangsaan bersifat kerak-yatan. Berkat hubungan itu, Sneevliet dan Baars berhasil dengan leluasa berbicara dalam forum Kongres SI, bahkan mendapat kesempatan untuk menyajikan prasaran dalam sidang-sidangnya ten-tang soal-soal perburuhan dan pemerintahan. Kontaknya yang erat dengan Ketua SI Semarang, Semaoen, memberikan kesempatan baginya untuk berceramah dalam kursus-kursus kader, sehingga ISDV akhirnya banyak memperoleh pengikut di dalam SI yang menciptakan keanggotaan ganda. Banyak anggota ISDV menyelundup ke dalam tubuh SI, sebaliknya, aktivis-aktivis SI merangkap menjadi anggota ISDV. Bahkan orang-orang seperti Semaoen, Darsono, Alimin Prawirodirdjo dan Tan Malaka adalah sekaligus tokoh dan pimpinan kedua organisasi yang sebenarnya berlainan pahamnya itu. Ini terbukti dengan berdirinya SI Merah yang berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri kemudian pada tanggal 23 Mei 1920, dengan Semaoen sebagai Ketuanya.¹⁸⁹

Atas pengaruh paham sosialis dan kemudian berkembang lebih tegas menjadi komunisme, setelah Revolusi Oktober di Rusia tahun 1917, tokoh-tokoh SI yang kemudian digolongkan sebagai Merah, seperti Semaoen dan Darsono, dengan gencar melancarkan kritik dan bahkan fitnah kepada Tjokro, Salim dan Moeis, yang berhasil mengguncangkan suasana partai serta menimbulkan perpecahan

¹⁸⁹ Beberapa buku menerangkan asal-usul berdirinya ISDV, misalnya A.K. Pringgodigdo SH, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967, hal. 21-22. Sartono Kartodirdjo et al. *Sejarah Nasional Indonesia* jilid V. Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hal. 203-212. Memberi sedikit informasi tentang berdirinya ISDV dan hubungannya dengan SI.

dan pengelompokan antara pengikut Semaoen-Darsono-Alimin dengan pengikut Salim-Moeis-Soerjopranoto, sehingga mendorong yang terakhir untuk melancarkan tindakan disiplin partai kepada yang pertama. Tapi Tjokro yang sangat gandrung terhadap persatuan, dan barangkali juga melihat dirinya sebagai pemimpin utama yang harus berdiri di atas semua golongan, tidak setuju terhadap maksud menyingkirkan elemen komunis dalam SI. Baru ketika Tjokro masih berada dalam tahanan karena Peristiwa Garut, duet Salim-Moeis yang menguasai persidangan Kongres Nasional VI SI di Surabaya, berhasil melaksanakan tindakan disiplin partai kepada golongan komunis yang ternyata telah mendapatkan dukungan kuat dari cabang-cabang Semarang, Solo, Salatiga, Sukabumi dan Bandung. Salim-Moeis mendapat dukungan dalam Kongres dengan perbandingan suara 23 lawan 7.¹⁹⁰ Pada kongres itu pula, Salim-Moeis terlibat dalam perdebatan sengit di bidang ideologi dengan Soemaoen-Tan Malaka. Yang pertama mempertahankan ajaran-ajaran sosial Islam dan melawan ajaran-ajaran sosial Karl Marx yang dibawa oleh yang kedua

Pada tanggal 23 Mei 1920, *Indische Sociaal-Democratische Veereniging* (ISDV) yang didirikan di Semarang sepuluh tahun sebelumnya, berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di India (PKI). PKI merupakan organisasi pertama di Asia di luar kekaisaran Rusia, menggunakan kualifikasi "Komunis." Partai Komunis Cina sendiri baru didirikan setahun kemudian, yakni pada bulan Juli 1921. Orang yang ditugaskan oleh *Internationale Communiste* untuk membantu Partai baru tersebut adalah Henk Sneevliet, seorang organisator ISDV Belanda, yang pada tahun 1918 diburu-buru oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kar-

¹⁹⁰ *Ibid*, hal. 140.

ena kegiatan-kegiatan revolusionernya.

Kata "perserikatan" dalam bahasa Melayu merupakan terjemahan dari kata Belanda "Partij." Sedang nama PKI itu sendiri, me-nurut dokumen awal dari organisasi tersebut, merupakan kepen-dekan dari bahasa Melayu "Perserikatan Komunis di India," yang bila di Belandakan menjadi "*Partij der Kommunisten in Indie*." Pada tahun 1927, kata "perserikatan" digunakan oleh PNI, sebelum mene-tapkan namanya menjadi Partai Nasional Indonesia.

Dalam kongres bulan Juni 1924 di Weltevreden (sekarang Jakarta Pusat), Perserikatan Komunis di India diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia, ini merupakan perta-ma kalinya di Hindia Belanda, sebuah organisasi memakai kata "Indonesia". Sebetulnya sejak tahun 1922 sudah terdapat sebuah organisasi politik yang bernama *Indonesiche Vereen-iging*, yang kemudian di-terjemahkan menjadi Perhimpunan Indonesia. Tapi organisasi ter-sebut berada di Nederland, bukan di negeri jajahan.

PKI juga merupakan organisasi politik Indonesia pertama yang menggunakan konsepsi "Partai" dalam nama resminya, dalam ba-hasa Melayu. Pergantian kata "perserikatan" menjadi "Partai," me-rupakan bagian dari konflik terbuka sejak tahun 1922 di dalam tubuh Sarekat Islam, antara militan pro komunis dan yang menentangnya. Sarekat Islam, sejak awal tahun 1910 dan di sepanjang awal tahun 1920, merupakan suatu gerakan sosial politik yang berpengaruh, suatu gerakan yang pertama kali mengambil corak sosial-politik di Indonesia, di mana organisasinya tidak lagi membatasi dalam lingkaran tertentu, baik secara sosiologis maupun geografis, dan ber-kembang tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di Su-matera dan kawasan lain. Anggota-anggota ISDV (kemu-dian PKI) seringkali mer-angkap anggota Sarekat Islam. Pada awalnya keang-gotaan

rangkap tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak bertentangan dalam hal agama; lagipula Sarekat Islam tidaklah menjadi lebih atau kurang sekuler pada saat telah menjadi gerakan massa, Tapi pembengkakan pengaruh ide-ide komunis di tengah gerakan dan munculnya persaingan guna merebut kepemimpinan, telah mendorong para pimpinan yang ada, yang khawatir akan kedudukannya, mencoba menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara Islam dengan Komunisme, Sambil menekankan ciri keislaman dari Sarekat Islam, dan menganggap hal yang mustahil anggota suatu organisasi Islam merangkap menjadi anggota organisasi Ko-munis. Untuk menegaskan perbedaan tersebut, para pemimpin Sarekat Islam kemudian mengusulkan agar gerakan SI dianggap sebagai sebuah Partai—dalam pengertian Belanda "Partij"—dan melarang anggotanya menjadi anggota partai yang lain pada saat yang bersamaan. Dari sini nampak bahwa kata "partij" mengandung arti khusus yang tidak dipunyai oleh kata "sarekat", yang tidak cukup jelas dalam mencerminkan pengertian "perserikatan": Organisasi dengan kata Partai memiliki kelainan, yakni kekhususan bahwa seseorang tidak dapat menjadi anggota banyak partai pada saat yang sama, padahal ia boleh menjadi anggota banyak "sarekat" atau anggota suatu "sarekat" dan suatu "Partai." Jadi ketika PKI memilih kata "Partai," ini merupakan pernyataan adanya sifat eksklusif dari kelompok tersebut, dimana berlaku berbagai peraturan ketat organisasi serta disiplin tertentu. Sedangkan SI sendiri, baru pada tahun 1927 menyepakati nama Partai Sarekat Islam; namun pada saat itu, organisasi tersebut sudah tidak lagi menampilkan gambaran sebagai sebuah organisasi yang kuat seperti sepuluh tahun sebelumnya.

Setelah terjadi perdebatan tentang konsepsi "partai" dalam SI, di kalangan PKI kemudian timbul pemikiran

tentang peranan Partai itu sendiri dan bentuk macam apa yang harus diambil supaya peranan tersebut dijalankan dengan baik. Jadi bukan hanya terbatas berbicara dengan rakyat, mengucapkan pidato persiapan kong-gres Juni 1924, atau bukan lagi hanya meyakinkan mereka, tapi juga menyatukan keyakinan tersebut dalam perbuatan serta memper-satukan segenap kekuatan perubahan dalam suatu organisasi yang mendasarkan keku-atannya pada disiplin, yang berbicara hanya dalam satu bahasa dan bertindak seperti seorang manusia¹⁹¹ Tidak lagi hanya menyemaikan ide-ide tapi harus dijaga agar ide-ide tersebut bisa menjadi buah, lalu berkembang menjadi tekad, untuk itu diperlukan sebuah organisasi yang mampu melaksanakan tekad tersebut, menjadi suatu perubahan politik, yang membangkitkan dan dapat menjadi pemimpin dari gerakan yang dilahirkan oleh te-kad tersebut. Kebutuhan adanya suatu organisasi yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih disiplin untuk menjamin keberhasilan peranan-nya sebagai organisasi pelopor, menyebabkan ditanggalkannya kata "perserikatan" yang melekat pada awal kelahiran PKI, pada masa kegagapan dan belajar, menjadi sebuah "Partai." Partai besar yang bersatu juga diperlukan agar Partai bisa bertahan dari tekanan pemerintah Hindia Belanda yang semakin lama, semakin sewenang-wenang. Ruth McVey menulis bahwa seorang pemimpin partai dijamin akan dipenjarakan selama beberapa bulan dalam setiap tahunnya.¹⁹²

Suatu peristiwa genting pernah terjadi pada tahun 1923, setelah kegagalan aksi pemogokan yang cukup besar di jawatan kereta api dan diusirnya Semaun--Sekjen PKI sejak

¹⁹¹ Ruth McVey, *The Rise of Indonesian Communism*, Ithaca, Cornell University Press, 1966. hal. 192.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 258.

1920 dan sekjen Sindikat Buruh Kereta Api--keluar negeri. Di Solo dan Semarang terjadi serangkaian sabotase dengan "bom". Orang-orang Komunis segera dituduh sebagai

Penanggung jawab. Tempat pertemuan mereka digeledah dan sejumlah pimpinannya ditangkap. Tapi tidak ditemukan bukti-bukti bahwa partai terlibat dalam peristiwa pem-bom-an tersebut. Namun dua dari pimpinan yang dipenjarakan itu diusir dan sejumlah lainnya di penjarakan selama empat bulan.¹⁹³ Dengan demikian, di samping terdapat hal-hal yang dilakukan guna memajukan nasib kaum bu-ruh, juga terjadi aksi-aksi yang membuat partai mundur, ada tin-dakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan ada pula tindakan yang hanya melayani kepentingan polisi. Oleh karena itu harus dapat dibedakan antara aksi-aksi yang berguna dengan tin-dakan yang memperkeruh suasana. Bagi pimpinan partai, perkembangan tersebut berarti harus dibenahinya pendidikan politik ang-gota, mereka harus mampu membedakan antara aksi yang benar dengan aksi yang keliru, terutama kemam-puan mereka untuk menghindari jebakan polisi, yakni yang berupa "provokasi." Massa juga harus diperingatkan tentang hal ini. Polisi sangat berkepentingan untuk meyakinkan bahwa "revolusi" itu sama dengan "pele-dakan bom," karena hal tersebut akan membuat golongan revolu-sioner terkucil dari massa 'rakyat', polisi juga sangat berkepentingan untuk membuat "provokasi" sabotase dengan "bom," untuk ke-mudian menuduh PKI sebagai dalangnya, agar ada alasan yang baik untuk menindasnya. Partai, militansi dan kawan-kawan separtai harus senantiasa waspada, dan tidak ada kewaspadaan tanpa disiplin; sekali lagi, masalah disiplin ini menjadi tuntutan utama. Dengan demikian tanggung jawab partai makin besar dan peranan partai dalam

¹⁹³) *Ibid.*, hlm. 187.

perjuangan anti kolonial semakin meningkat. Akibatnya tekanan dari musuh pun semakin keras.

Di depan konggres partai, Juni 1924, Darsono, yang pernah menjadi tangan kanan Semaun, menyatakan bahwa, "Partai tanpa disiplin adalah ibarat tembok tanpa semen, mesin tanpa baut"¹⁹⁴ dan ia juga memperingatkan tentang bahaya konsepsi "avonturistis" dalam sebuah perubahan politik atau "revolusi." Juga harus dipahami adanya hukum perkembangan sejarah, untuk membantu kemajuannya (par-tai - penj). Tapi sejarah itu tak bisa dimajukan lebih cepat dengan memperkosanya. Suatu dokumen berjudul "Manifes Komunis Indonesia" yang bertanggal di bulan pertama pen-dirian PKI telah menyatakan:

"Kaum komunis dan partainya tidak bisa *bikin* pembedakan. Komunisme tergantung dari keadaan pergaulan hidup dan ia hanya bisa bekerja menurut keadaannya. Kewajiban kaum komunis dan partainya yaitu memimpin pergerakan kaum buruh supaya dalam pertentangannya tidak demikian banyak ada jiwa manusia yang dikorbankan percuma. Kewajiban kaum komunis yaitu membawa pergerakan kaum buruh di jalan-jalan yang baik dan mudah. Fihak sana mendakwa kita hendak *membikin* revolusi. Kita menjawab bahwa kita tidak *membikin* revolusi, tetapi kita yakin-yakin benar, bahwa revolusi dunia itu akan pecah sendiri (...). Kaum komunis dan partainya hanya bisa memudahkan lahirnya dunia baru, lain tidak. Partai komunis yaitu dukun beranak bagi dunia baru yang akan lahir itu"¹⁹⁵⁾

Dengan dipindahkannya kedudukan partai dari basis awalnya di Semarang ke Jakarta, kongres telah melengkapkan pengertian PKI, dalam nama dan per-

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 194.

¹⁹⁵ *Manifes Komunis India*, Bab 8: Usaha untuk mencapai maksud kita.

anannya sebagai suatu organisme yang ma-tang, mampu menantang kekuasaan, bahkan dipusatnya sendiri, di mana kekuasaan itu bercokol dan menindas, mengawasi dan menghukum.

Peristiwa-peristiwa dari bulan November 1926-Januari 1927 serta serangkaian demonstrasi yang tak terkendali, yang dapat menimbulkan perlawanan umum terhadap diktaktor kolonial, menunjukkan, bahwa rencana partai tentang tang-gung jawab dan disiplin yang dibahas dalam kongres Juni 1924, tetap menjadi cita-cita yang belum bisa dicapai. Pimpin-an partai yang berantakan akibat tekanan yang terus menerus, tak mampu lagi menanggulangi berbagai usul dari kader-kader regional yang cenderung menilai kekuatan mereka secara berlebihan.

Banten, sebuah daerah yang dikenal dengan daerah pengikut Islam yang ortodoks, juga turut memberontak atas nama PKI. Malah, di daerah ini pemberontakan komunis jauh lebih besar ketimbang tiga daerah lainnya, yakni Priangan, Batavia, dan Sumatera Barat. Khusus di Banten, pemberon-takan komunis terjadi akibat para pemimpin tradisional, kyai dan jawara, merasa tidak puas dengan SI. Faktor lainnya ialah kesamaan sifat radikalisme yang dikandung, baik oleh PKI, maupun oleh rakyat Banten. Betapa pun hebatnya pemberontakan kaum kiri ini, akhirnya dapat ditumpas pada tanggal 14 November 1926. sekitar 13.000 orang ditangkap, beberapa orang ditembak dan sebagian lain dijebloskan ke kamp di Boven Digul, Tan Malaka salah satu di antaranya. Sedangkan Semaoen sudah lebih dulu dibuang karena terlibat kerusuhan tahun 1923.

Setelah berbagai kejadian, yang menyebabkan dilarangnya PKI dan ditangkapnya 13.000 orang, dengan 5.000 di anta-ranya diadili dan dihukum (16 orang di antaranya di-

hukum mati dan akan digantung), serta sekitar 1.000 orang didepor-tasikan tanpa diadili ke Irian Barat. Dalam suatu kamp konsentrasi yang khusus dibuat untuk itu, telah mengungkap sampai di mana *raison d'etre* PKI dan *raison d'etre* Partai Komunis di Indonesia, spesifikasi suatu Partai yang menggunakan kata "komunis" untuk membedakan diri, tidak begitu mudah dipahami oleh golongan komunis itu sendiri. Para pendiri PKI itu sendiri—yaitu pimpinan tingkat pertama, yang beberapa di antaranya ada di luar negeri dan berhubungan dengan gerakan komunis Internasional—yang paling cepat menguburkan PKI sebagai suatu organisasi.

Mula-mula adalah Semaun. Sejak ia diburu-buru di Indonesia, ia lalu sering berada di Nederland, berhubungan erat dengan para mahasiswa pendiri Perhimpunan Indonesia (PI), dan tentu saja dengan orang-orang Komunis Belanda. Semaun menjadi perantara antara kedua grup tersebut, bersamaan dengan kedudukannya sebagai wakil PKI di Eropa dan dalam organisasi Internationale Communiste. Bulan Desember 1926, segera setelah kegagalan gelombang pemberontakan pertama di Jawa, atas nama PKI, Semaun yang masih dianggap sebagai pemimpin PKI, menandatangani suatu persetujuan rahasia dengan ketua PI Moh. Hatta. Dalam persetujuan itu disebutkan bahwa, kaum komunis Indonesia menyerahkan kepemimpinan gerakan pembebasan Indonesia kepada PI, yang tadinya dipimpin oleh PKI. Hatta mengatakan:

"Dalam konvensi itu antara lain disebutkan pengakuan PKI atas kepemimpinan Perhimpunan Indonesia terhadap gerakan rakyat Indonesia seluruhnya, dan PKI tidak akan mengadakan oposisi dalam gerakan itu konsekuensi

menuju Indonesia merdeka"¹⁹⁶

Karena persetujuan itu bersifat rahasia, maka ia hanya menjadi tanggung jawab Semaun pribadi dan tidak ada kelanjutannya yang lebih kongkrit. Tapi persetujuan itu kemudian diumumkan oleh pengadilan Belanda, setelah penangkapan Hatta dan 3 pimpinan PI lainnya pada bulan September 1927. Pemerintah Belanda hendak menggunakan dokumen tersebut untuk menunjukkan bahwa Perhimpunan adalah suatu organisasi komunis dan subversif, tapi keempat ter-dakwa yang diadili dalam bulan maret 1928 itu kemudian dibebaskan. Dan Semaun harus memberi pertanggung jawaban terhadap kawan-kawan Komunisnya akibat terbongkarnya dokumen tersebut. Pada tanggal 19 Desember 1927, Harian Partai Komunis Belanda memuat suatu komuni-ke yang ditandatangani Semaun:

"Pers Belanda telah mempublisir suatu persetujuan yang saya tanda tangani atas nama PKI dan yang ditandatangani M. Hatta atas nama Perhimpunan Indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah menandatangani persetujuan itu tapi (...) setelah saya pelajari dengan lebih seksama menurut prinsip-prinsip komunis di satu pihak dan berbagai peristiwa di Indonesia di lain pihak, saya menyadari bahwa tandatangan saya itu telah dapat diartikan sebagai pertanda hilangnya independensi Partai Komunis dan hilangnya kepemimpinan Partai. Berbagai peristiwa telah menunjukkan bahwa kaum komunis di Indonesia, walaupun dikejar-kejar dan ditindas, tetap melanjutkan perlawanan (...) Juga telah diketahui bahwa perlawanan nasional yang terjadi, dipimpin oleh Partai Komunis. Sekarang partai kami telah membayar dengan harga yang mahal (...) tapi kaum buruh (...) tetap bersimpati terhadap perjuangan

¹⁹⁶ M Hatta, *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan nasional Indonesia*, Idayu, Jakarta, 1980, h. 13.

besar kami. Kesalahan yang telah saya lakukan dalam penandatanganan persetujuan itu bukanlah karena saya berpikir bahwa partai kita harus siap berjuang sepenuhnya dengan golongan nasionalis revolusioner yang jujur tapi karena saya telah menerima mereka sebagai pemimpin seluruh gerakan revolusioner nasional (...) Garis kaum komunis Indonesia, sebagaimana di negara lain, sangat jelas: dalam keadaan yang bagaimanapun, harus tetap dijaga inde-pendensi partai. Ini adalah prinsip yang mutlak (...) Saya bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas penanda-tanganan persetujuan tersebut. Ketika saya menandatangani persetujuan itu, keadaan telah menyebabkan saya tidak dapat menghubungi kamarad-kamarad saya di PKI dan di Internationale Com-muniste"

Dalam peristiwa di atas, pentingnya suatu organisasi yang oto-nom bagi golongan komunislah yang dipertanyakan oleh Semaun, ketika ia bergabung dengan posisi Hatta. Dalam pikirannya, suatu partai memiliki nilai yang lain pada saat ia berjuang bagi kemerdekaan nasional. Harus ada suatu partai yang memimpin perjuangan itu, dan bila Partai Komunis tak dapat melakukannya, maka kaum komunis menerima kepe-mimpinan partai lain.

Tentu saja jalan pikiran Semaun tersebut tak bisa diterima oleh anggota-anggota militan partai yang berjuang bagi kelangsungan hidup PKI. Walaupun secara praktis persetujuan Semaun-Hatta itu tidaklah penting, namun secara teoritis itu sudah cukup untuk me-runtuhkan pengaruh dan kewibawaan Semaun, sebagai pemimpin partai, kendati ia telah melakukan otokritik.

Seorang pimpinan PKI yang lain, pembantu dekat Semaun di Indonesia, dan menjadi wakil Internationale Communiste di Asia Tenggara, yaitu Tan Malaka, yang sebagaimana Semaun, telah menganggap PKI tidak ada lagi se-

bagai suatu organisasi. Bersama beberapa pelarian yang mampu pergi keluar negeri, pada bulan Juni 1927 di Bangkok, Tan Malaka mendirikan suatu partai baru, PARI (Partai Republik Indonesia), sebagai pengganti PKI.

Nama Partai itu diambil dari sebuah buku Tan Malaka yang diterbitkan dua tahun sebelumnya "Naar de Republiek-Indonesia", dan menanggalkan seluruh hubungannya dengan komunisme. Do-kumen-dokumen yang diumumkan PARI menyatakan bahwa partai itu indepenueasana yang carut marut, akibat ketatnya pengawasan penguasa dan konflik internal yang mulai merapuhkan gerakan kiri, sebuah pemberontakan disiapkan pada bulan Desember 1924. Sesungguhnya, aksi ini tidak mendapatkan restu dari Komintern di Uni Soviet, mengingat pemimpin PKI, Semaoen, dibuang karena kasus pemogokan besar-besaran buruh VSTP pada tahun 1923. Namun, beberapa pimpinan PKI yang tersisa, tetap bermaksud untuk "unjuk gigi" di hadapan penguasa kolonial.

Pemberontakan tahun 1926-1927 ini sekaligus menandakan kehancuran gerakan kiri pada masa kolonial, untuk lalu kembali bergerak di masa selanjutnya.

E. Periode II (1926-1948)

Penumpasan pemberontakan PKI di Banten tahun 1926 me-nandakan berakhirnya fase pertama dari aktivitas gerakan komunis di Indonesia. Pada saat itu Indonesia sendiri belum merdeka dan memiliki kekusaan sendiri. Sampai tahun 1935 tidak ada aktivitas penting PKI di Indonesia. Kemudian Muso, seorang pemimpin PKI yang berada dalam pengasingan dan tinggal di kota Moskow, Uni Sovyet, kembali ke Indonesia untuk menyusun kembali "Partai terlarang"....Hal yang jauh lebih penting dari aktivitas komunis pada masa itu adalah bahwa di Netherland

(Belanda) banyak pemimpin masa depan dari Negara Republik Indonesia tinggal di negeri itu sebagai mahasiswa, salah satunya berasal dari partai komunis.

Depresi ekonomi dunia internasional tahun 1929 mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Petani dipaksa untuk menggadaikan tanah mereka untuk membayar pajak yang meningkat sebanyak 44 % untuk mengatasi krisis antara tahun 1926 sampai 1932. Pengarang sayap kanan JM Van Der Kroef mengatakan “ Proses proletarisasi dalam jangka panjang hanya akan memberi kekuatan bagi munculnya Partai Komunis. Pada tahun 1930-an memang tidak ada peristiwa hebat yang berarti bagi partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1933 para kelasi dari kapal angkatan laut Belanda “Zeven Prvincien” melakukan pemberontakan, kemudian merampas kapal tersebut dan bermaksud membawanya ke pelabuhan Rusia. Rencana pemberontakan itu dapat digagalkan setelah pesawat tempur angkatan laut Belanda menyerang dengan sebuah bom. Pemberontakan ini, meski jelas-jelas hasutan dari sebuah persatuan Negara-negara Sosialis, tapi menimbulkan efek bagi perubahan opini politik di Indonesia.

PNI, prototype partai yang dikehendaki Sukarno didirikan pada tahun 1933, untuk mengisi kekosongan, akibat larangan *de jure* dan keruntuhan *de facto* PKI. Ada pula PARI yang dari luar negeri dan dalam klandestin ingin memainkan peranan serupa. Kegagalan PKI agaknya telah memberikan semangat bagi tumbuhnya partai-partai, dan dalam perkembangan tersebut, kata “kiri” kemudian dipakai secara lebih luas lagi, sebagai unsur klasifikasi yang menjadi suatu kebutuhan.

Kata “kiri” dalam perbendaharaan kata politik internasional, agaknya merupakan konsekuensi dari Revolusi Perancis; kata “kiri” seringkali digunakan dalam perempat

abad XIX, dan "kiri" menunjuk pada ide-ide wakil rakyat yang duduk sebelah kiri Ketua di ruang Parlemen Perancis. Kata "kiri" juga digunakan, pada masa yang sama, di Inggris, tanpa dihubungkan dengan letak duduk anggota parlemen di ruang sidang¹⁹⁷⁾

"Kiri" di Prancis mula-mula didukung dengan tuntutan "kedaulatan bangsa" melawan "kedaulatan raja," kedaulatan yang datang dari bawah dan bukan dari atas; ia mendukung demokrasi melawan otoriterisme, yakni majelis pilihan rakyat melawan anggota yang diangkat, ia memperjuangkan pemilihan umum melawan pemilihan censitaire (dimana yang memilih dan yang dipilih harus membayar pajak tertentu - penj.) dan menentang hak pilih yang hanya diberikan kepada orang-orang kaya.

Pada saat pengertian "kiri" mulai meluas di Eropa, munculah "sosialisme" dan "komunisme". Lalu ketiga pengertian tersebut saling kait-mengkait. Di samping golongan kiri "liberal" terdapat kelompok "ekstrim kiri," sosialis atau komunis. Namun ketiga-tiganya memiliki ide bersama yang berasal dari Revolusi Perancis. Konstitusi dan pengadaan lembaga-lembaga negara, kedaulatan rakyat harus dijamin, dan rakyat berhak untuk berontak terhadap pemerintahan despotis yang tidak mengakui kedaulatannya: "bila pemerintah melanggar hak-hak rakyat, maka pemberontakan adalah bagi rakyat dan merupakan bagian dari rakyat. Kedaulatan merupakan hak rakyat yang paling suci dan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan"¹⁹⁸

Dasar utama dari doktrin sosialis adalah pemikiran bahwa, kedaulatan rakyat telah dilanggar apabila hubungan

¹⁹⁷ Jean Dubois, *Le Vocabulaire Politique et Social en France 1869-1872*, Paris, Larousae, 1962

¹⁹⁸ Konstitusi Republik Prancis 24 Juni 1793, "Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warganegara", pasal 35.

sosial mengakibatkan timbulnya inegalite (ketimpangan) dan terpecahnya masyarakat menjadi pemilik dan proletar, serta menempatkan kaum proletar di bawah dominasi pemilik; sedang Revolusi Perancis 1789 yang memproklamkan "ke-merdekaan, persamaan, persaudaraan" tidak menghendaki digantinya dominasi aristokrasi menjadi dominasi para pemilik besar, golongan sosialis ingin membebaskan rakyat seluruhnya.

Perubahan yang tampil di Eropa pada awal abad XIX dan berbagai tuntutan yang ditimbulkannya, merupakan akibat gelombang besar gerakan revolusioner 1848, yang melanda seluruh Eropa, serta menimbulkan gerakan pembebasan nasional di beberapa negara. (Hongaria misalnya), gerakan republiken (di Perancis, Februari 1848), pemberontakan kaum buruh (di Paris, Juni 1848). Tepat seratus tahun kemudian, gerakan revolusioner yang cukup kompleks dan berbeda-beda berkembang di Asia, gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di negara-negara yang masih dijajah atau gerakan demokratis anti feodalisme atau anti kapitalisme di negeri-negeri yang sudah merdeka. Beberapa penulis mencoba meyakinkan bahwa berbagai revolusi di Asia tersebut "dipimpin" oleh komandan yang sama, Uni Soviet; tapi tak seorangpun yang menyebut "komandan" dari revolusi Eropa 1848.

Di Indonesia, sekitar tahun 1930, terdapat dua aliran besar dalam gerakan nasional. Di satu pihak di sekitar Sutomo (pendiri BU) di Surabaya dan M.H Thamrin di Jakarta, aliran yang menerima lembaga-lembaga yang didirikan Belanda, sambil mencoba menambah jumlah orang Indonesia di Lembaga tersebut dan mencoba mengarahkan sistem administratif dari dalam sistem itu sendiri. Di lain pihak, PNI dan Serekat Islam yang mengikuti Partai Kongres India, menolak segala kerjasama dengan pemerintahan ko-

lonial; aliran inilah, yang terutama terdiri dari orang-orang laiique—bukan dari kalangan agama—yang akan menyebut dirinya sebagai "gerakan nasional kiri." Tentu saja, berbagai organisasi bawah tanah yang ilegal, termasuk dalam aliran ini.

Golongan kiri legal tidak hanya berbeda dalam sikapnya terhadap pemerintah; PNI—setelah bubarnya—dua partai yang saling mengaku sebagai pewarisnya, Partindo (Sukarno, Sartono, Amir Sjarifudin) dan Pendidikan Nasional Indonesia (Hatta, Sjahrir), mengembangkan program yang diilhami golongan sosialis; "Marhaen", sebagai pengganti "buruh" dalam teks komunis, harus mampu mengatasi masalah hubungan klas/massa seperti yang dihadapi PKI, paling tidak dalam tingkat konsepnya; "marhaen" adalah nama yang diberikan kepada seluruh orang Indonesia yang tidak punya kekuatan, buruh atau bukan. "Marhaenisme" digunakan sebagai definisi dari "Sosialisme ala Indonesia

Selama beberapa tahun, organisasi nasional yang disebut sebagai Perhimpunan Indonesia cukup eksis di negeri Belanda dimana organisasi ini adalah tempat bersatunya para ekspatriat mahasiswa dari Indonesia. Sepanjang periode tese-but calon-calon dari pembangun organisasi nasional Indonesia berada dalam perhimpunan tersebut termasuk dari PNI, Partindo dan Gerindo.

Menghadapi tiga serangan golongan kanan dan ekstrim kanan, Jepang, Belanda, Indonesia, golongan kiri akhirnya merubah sama sekali taktiknya dan menanggalkan politik non-koperasi yang semula merupakan ciri mereka. Golongan kiri akhirnya bergabung dalam organisasi baru Gerindo, yang dibentuk bulan Mei 1937, dengan diilhami oleh "Front Populer", aliansi golongan kiri yang sebelumnya mencapai kekuasaan di Spanyol dan Prancis. Berbeda dengan Front Populer, Gerindo bukanlah aliansi partai-par-

tai independen, melainkan penge-lompokan kembali anggota partai-partai kiri seperti Partindo, yang memutuskan bubar atau kelompok yang mewakili partai bawah tanah PKI dan PARI. Para pemimpin utamanya adalah Amir Sjarifudin dan A.K Gani.

Tujuan dari Gerindo adalah mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang asal daerahnya, guna menuntut demokratisasi lembaga-lembaga dan dibentuknya Dewan Perwakilan yang sesungguhnya dari pemerintahan Belanda. Dalam rangka tuntutan Demokratisasi tersebut Ge-rindo mengakui lembaga-lembaga kolonial. Tapi hal itu dituntut juga oleh Parindra. Yang membedakan Gerindo dari Parindra adalah, konsepsinya yang anti rasis dalam kebangsaan dan nasion, orang Indonesia mana pun, dari rakyat Indonesia, yang memilih menjadi orang Indonesia, tindakan ini merupakan suatu keputusan politik, bukan hak dari kela-hiran atau lamanya nenek-moyang tinggal di Indonesia. Perbedaan yang lain dengan Parindra adalah tekanannya pada kerakyatan sebagai kedaulatan dan pada "hak-hak kaum susah." Terakhir adalah tawarannya kepada seluruh kekuatan politik di Indonesia, termasuk Belanda, untuk membentuk Front Bersama menghadapi imperialisme Jepang. Fasis dan militeristis; yang terakhir ini tidak akan bisa dipahami secara baik, sebagaimana nampak pada lemahnya perlawanan ketika Jepang menduduki Indonesia.

Tapi di samping golongan "kiri legal" tersebut, adakah, dalam ilegalitas, kelanjutan dari PKI? Bila ia tidak ada di penjara atau di dalam kamp-kamp di Nusakambangan dan Irian, di Digul, di manakah golongan Komunis Indonesia? Masih adakah mereka? Masihkah mereka melakukan sesuatu? Polisi politik Belanda secara periodik berhasil membongkar jaringan PKI, tapi ini tidak berarti bahwa jaringan-

jaringan itu betul-betul ada. Sebuah dokumen PKI menyatakan:

"Sesudah kejadian pemberontakan tahun 1926-1927 ini, kaum Komunis Indonesia boleh dikatakan putus sama sekali hubungannya yang teratur dengan luar negeri. Partai tidak mendapat didikan yang teratur mengenai pekerjaannya dan tidak mendapat teori tentang perjuangan revolusioner. Keda-tangan kawan Musso secara illegal dari luar negri dalam tahun 1935 membantu kaum komunis Indonesia menyusun organisasi illegal dan menentukan politik partai dalam per-juangan melawan fasisme (...) Walaupun tidak lama sesudah kawan Musso kembali keluar negri diadakan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikut PKI. PKI masih terus bisa menjalankan aktivitasnya di bawah tanah hingga jatuhnya kekuasaan fasis Jepang"¹⁹⁹

Analisa tersebut agaknya menyimpulkan bahwa, pada saat Komunis Indonesia tidak dapat mempertahankan hubungannya dengan dunia luar, sebelum tahun 1935, dan sangat terpecah dalam menentukan sikapnya di masa datang: ini terlihat bahkan dalam tingkatan militan yang dideportasi ke Irian, yang terpecah menjadi berbagai kelompok yang bermusuhan. Beberapa di antaranya barangkali mencoba mengikuti PARI, saat partai tersebut mulai dikenal, secara gelap tentu saja, di dalam negeri; bagi mereka, agaknya, PARI tidak lain dari PKI itu sendiri. Yang lainnya masuk ke dalam PNI, yang telah menyatakan bahwa partai itu akan melanjutkan kerja yang telah dimulai PKI; bagi mereka, rintangan ideologis pada saat mereka masuk ke dalam partai non komunis, tidak terlalu besar dibanding halangan nyata dalam mengorganisasi PKI sebagai aparat klandestin; air akan menyeret lumpur yang

¹⁹⁹⁾ G.H Bousquet, *Le Politique (?) et Coloniale des Paya-Bas*, CEPE, Paris, 1939

dilaluinya, air akan memenuhi jambangan yang ditemuinya. Bagaimanapun, antara PKI, PARI, PNI, berada pada landasan yang sama; para ahli teori boleh mengarahkannya pada "nasionalisme" atau "internasionalisme" atau "dwitunggal", tapi landasan tersebut, yang menimbulkan pemberontakan pada berbagai lapisan rakyat melawan dominasi kolonial, menciptakan terutama suatu aspirasi yang berciri khas, yang diungkapkan serentak oleh seluruh partai rakyat Indonesia, oleh seluruh golongan kiri Indonesia, betapa pun konflik teori memisahkannya.

Tapi untuk kelompok Komunis Indonesia di eropa, yang baru mengetahui bahwa PARI-nya Tan Malaka telah menyatakan independensinya dari Internationale Communiste, PARI tidak boleh di anggap sebagai PKI bentuk baru; jadi harus dicegah jangan sampai golongan Komunis Indonesia bergabung di sekitar Tan Malaka, dan untuk itu partai harus dibangun kembali sambil melakukan hubungan dengan Partai Komunis lain di seluruh dunia. Misi itulah yang pada tahun 1935 dipercayakan kepada Musso, anggota pimpinan PKI yang berada di Eropa pada saat meletusnya peristiwa 1926-1927, dan yang menggantikan Semaun di Belanda; misi tersebut kemudian mendapat perlawanan dari para pendukung Tan Malaka, di luar negeri dan juga di Indonesia, yang menyatakan bahwa PKI sudah mati dan bahwa mereka adalah ahli warisnya.

Bagi Musso, PKI tetap ada dan PARI hanyalah merampas. Kejaksaan Belanda tidak ambil pusing terhadap perbedaan itu, baginya semua itu adalah "Komunis," "ekstrimis yang berbahaya" dan ia membuang mereka ke Irian tanpa diadili, siapa saja yang berhasil ditangkap. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyusun sel-sel PKI yang dibentuk Musso di Surabaya awal tahun 1936, di lingkungan sindikalis Djo-kosudjono. Dalam kamp tahanan

di Irian, anggota-anggota PARI menjulukinya "PKI muda" atau "baru." Ketika para tahanan itu dipindah ke Australia dan anggota-anggota PKI berkat bantuan kaum Komunis Australia, menerbitkan suatu buletin gelap, mereka menulis:

"Lawan selalu mencoba memecah pergerakan kita. Cara memecahnya dengan bermacam-macam jalan. Antara lain adalah sebutan PKI Lama dan PKI baru (...) Bagi kita kawan sefaham, PKI hanya satu. Kita hanya mengenal satu partai komunis yaitu PKI. Tidak ada lama tidak baru..."²⁰⁰

Itulah tujuan Musso yaitu menjamin kontinuitas PKI, mempertahankan namanya, kehidupan organisasinya, men-jamin kedudukan PKI dalam sejarah Indonesia, dan membuat PKI sebagai pionir dalam sejarah Indonesia. Dengan cara yang sama Aidit tahun 1950 mencoba menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Komunis memainkan peranan penting di Jakarta dalam periode Mei-September 1945, tanpa perlu membuktikan dan menyatakan di mana-mana bahwa mereka itu adalah Komunis.²⁰¹

Bila Musso pada tahun 1948, tiga tahun setelah 17 Agustus 1948, dan Aidit tahun 1950 (Musso telah terbunuh dalam peristiwa Madiun) mencoba menunjukkan bahwa sejarah Komunis adalah sejarah yang gilang-gemilang, adalah karena PKI dalam tiga tahun pertama kemerdekaan itu hampir tidak pernah terang-terangan membiarkan golongan kiri mengi-dentifikasikan dirinya kepada Partai Sosialis, partai yang pen-dirinya adalah Amir Sjarifudin, dia lagi, sekelu-

²⁰⁰ "Lahirnya PKI Dan Perkembangannya", *Bintang Merah*, No 7, 15 November 1950, hlm. 199.

²⁰¹ Sebutan Yang Berbahaya," *Red Front*, Suara official PKI seksi luar negeri, No 3, Desember, 1944.

arnya dari pen-jara dimana Jepang telah menjebloskannya ke sana sejak Februari 1943. Ketika para aktivis PKI yang “dibuang” kembali dari negeri Belanda, George Kahin menulis, “Sangat jelas bahwa saat mereka tiba di Indonesia akhir 1945 dan awal 1946, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan jalur Moskow Orientasi pertama mereka adalah, menseja-jarkan bahwa Partai komunis Belanda, anti republik. Mereka menganggap bahwa Republik adalah buatan Jepang dan fasistik, ini bertujuan untuk menyatukan lagi Belanda dengan Indonesia. Karena itulah pemerintah Belanda sangat senang dan mau melepaskan mereka tanpa syarat ke Indonesia. Tapi kemudian, sepanjang perjuangan untuk kemerdekaan, atas petunjuk Moskow PKI menemukan mereka secara obyektif menuju ke sisi kanan, bukan hanya PNI, tapi juga sayap kanan partai Islam, masyumi.

Tapi kemudian para tokoh PKI dari pembuangan ini menyadari bahwa posisi mereka sungguh menggelikan. Menurut Kahin, “Mereka melihat RI dari dalam. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa RI bukanlah produk Jepang atau diktator fasis. Sangat jelas bahwa berdirinya Negara RI adalah dukungan dari seluruh populasi rakyat.”

Bulan September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun. Tentara-tentara yang pro-PKI merebut kendali kota Madiun di Jawa timur. Muso, pemimpin PKI, menyatakan dirinya sebagai pemimpin alternative dan mencoba untuk mengambil alih kekuasaan. Meski terlihat bahwa Partai komunis Indonesia tidak merencanakan pemberontakan tersebut dan dianggap hanya pemberontaka lokal saja, tapi seperti kejadian tahun 1926, anggota-anggota PKI ditumpas dan dihancurkan. Namun bisa dianggap bahwa peristiwa pemberontakan PKI Madiun ini merupakan mata rantai gerakan komunis di Indonesia. Per-

istiwa itu bukanlah hanya sekedar pertarungan antara kekuatan-kekuatan politik yang berbeda, namun telah menjadi suatu tujuan dari gerakan organisasi komunis yang berada di Indonesia. Jika pada pemberontakan PKI 1926, para pemberontak diberangus oleh pemerintah kolonial Belanda, maka pemberontakan PKI 1948 ini berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia.

PKI tetap merupakan bahaya laten, walaupun basis-basisnya di Blitar Selatan telah dihancurkan, namun kader-kadernya masih bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali.²⁰² Usaha-usaha dari sisa-sisa G30S/PKI sampai saat itu masih terus ada. Dari tokoh-tokoh yang berhasil ditangkap diketahui, bahwa mereka masih terus melakukan kegiatan dengan sistem kerja OTB (organisasi tanpa bentuk).²⁰³ Organisasi sisa-sisa PKI yang masih bergerak di beberapa tempat di Indonesia dan masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan konspiratif dan *illegal*.

Agustus 1948, ketika Sjahrir (perdana menteri Indonesia) dan bekas anggota pendidikan ke luar dari Partai Sosialis untuk membentuk Partai Sosialis Indonesia dan mendukung pemerintahan Hatta yang menggantikan Amir, Musso berhasil kembali dari Eropa untuk meyakinkan Partai Sosialis agar bergabung dengan PKI. Dengan maksud mengarahkan politik partai agar tidak lagi berdasar pada kompromi, tapi pada perjuangan melawan penyerbuan Belanda, guna menjamin kemerdekaan negara dan untuk memberikan dukungan kepada kaum buruh dan tani, khususnya untuk merealisasi reformasi agraria. Tahun 1951, D.N. Aidit yang baru berusia 30 tahun lebih menjadi pemimpin PKI. Ini menjadi awal babak baru kebangkitan

²⁰² Rosihan Anwar, "Peta bumi politik sekarang", *Kompas*, 18 September 1968.

²⁰³ *Kompas*, 11 Juni 1973.

partai ini kembali.

F. Periode III (Pemberontakan PKI 1965)

Meski sudah berkali-kali ditumpas dan diberangus, bahkan dikejar sampai ke akar-akarnya, tetapi organisasi komunis ini masih terus berkembang secara diam-diam. Arnold C. Brackman dalam bukunya *"Indonesia Communism"* menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun saja (tahun 1952 – 1962) jumlah anggota-anggota PKI meningkat dari 7.910 orang sampai 2.000.000, yang berarti bahwa PKI adalah partai Komunis yang terbesar di negara-negara non-Komunis di seluruh dunia. PKI pada tahun 1962 telah mempunyai 262 cabang, di tiap pulau mempunyai sarang "sel-sel" yang mempropagandakan tujuan dan *mythos* Komunisme. PKI juga berhasil membentuk front-front, yang mempunyai anggota sejumlah 10.000.000 orang, termasuk 4.000.000 BTI (Barisan Tani Indonesia). Di tiap-tiap jawatan dan instansi pemerintah diinfiltrir oleh kader PKI yang sudah dilatih baik dalam negeri, di Uni Sovyet, maupun di Cina Komunis. Dari Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta, disebarkan kader-kader inti ke seluruh pelosok. Aidit lebih beruntung dari Muso, karena gerakannya dilegalisir oleh Ir. Soekarno, dengan penempatan orang-orangnya di berbagai instansi pemerintah berdasarkan konsepsi Nasakom. Dengan menggembarkan *"revolusi gemilang di Cuba"* yang dikatakan memberi pelajaran dan pengalaman yang patut ditiru oleh bangsa Indonesia, indoktrinasi dipaksakan kepada pejabat-pejabat dan rakyat. Tetapi Aidit menyadari bahwa musuhnya yang paling kuat ialah Angkatan Perang Indonesia, terutama Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1959, dalam kongres ke VI Partai Komunis, ia menyerang Jenderal Nasution secara tidak terang-terangan dengan mengatakan

antara lain, bahwa untuk membentuk apa yang dinamakannya “*Pemerintah nasional, demokratis dan merdeka*” maka perlu digulingkan kekuasaan militer yang “reaksioner dan kejam” yang hanya “berbakti pada imperialisisme Amerika Serikat.” Suatu fitnah yang sangat keji dan kotor ! Jadi mula-mula Aidit mengikuti taktik-taktik yang telah digunakan oleh Mao Tse Tung dengan kombinasi taktik “koeksistensi secara damai” Uni Sovyet. Bukankah Mao sebelum menggulingkan pemerintah nasionalis Chiang Kai Shek menggunakan petani-petani di desa-desa yang masih sebahagian besar buta huruf dengan janji “tanah bagi petani kecil?!” Janji ini menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa dan lekas sekali merangsang petani-petani kecil terutama di pulau Jawa yang padat penduduknya. Tetapi di dalam, Aidit menggunakan taktik “Koeksistensi secara damai” dengan partai-partai yang ada dan Soekarno, yang hendak memaksakan kabinet berkaki empat dan Nasakomisasi semua instansi pemerintah sipil dan militer. Angkatan Darat menentang Nasakomisasi Angkatan Perang. Untuk mencapai strateginya yaitu mendirikan kekuasaan mutlak di bawah pimpinan PKI yang sejak tahun 1950 diko-mandokan dari Moskow sesuai dengan pola komunitas-internasional. Untuk merebut kekuasaan di negara-negara baru merdeka sesudah Perang Dunia II dengan mengom-bar-ngombarkan *chauvinisme* yang berlebih-lebihan dan ke dalam mengadu-dombakan golongan rakyat dan partai-partai politik. Aidit sangat beruntung karena Indonesia satu-satunya negara non-komunis di dunia ini yang mempunyai Presiden yang melindungai Partai Komunis. Dalam waktu yang singkat jumlah anggota-anggota PKI termasuk yang terbesar di seluruh dunia, bahkan nomor tiga sesudah Uni Sovyet dan RRC. Infiltrasi dipergiat di mana-mana. Pembentukan Universitas-universitas Swasta, Akademi-akademi tempat penempatan marxist-marxist-atheis dipergiat. In-

doktrinasi paksaan diadakan sampai ke pelosok-pelosok dimana kader-kader revolusi (yang mungkin tidak menyadari bahaya komunisme) dan yang telah tamat dipandang paling “ revolusioner “. Pada tahun 1960 dalam wawancaranya, Aidit terus-terang memuji titik Krus-chev “ koeksistensi secara damai “ yang katanya dipraktekkan oleh Cuba di Indonesia. Pada tahun itu, Aidit mengetahui, bahwa sebenarnya Ir. Soekarno tidak menghendaki PKI merebut kekuasaan. Soekarno tak mau kalau ada orang yang lebih berkuasa dari padanya, karena itu ia pelihara keseimbangan kekuatan antara dua kekuatan besar yang tak dapat diper-temukan, yaitu Tentara dan PKI. Aidit menggunakan krisis ekonomi yang timbul karena konfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Barat. Pada tahun 1962 inflasi melonjak naik bukan terutama karena konfrontasi, tetapi karena Cina-cina Komunis yang digerakkan untuk menambah kebobrokan ekonomi yang mendorong merajalelanya korupsi dan kebo-brokan moral. Cina-cina komunis yang menguasai perekonomian Indonesia yang berpusat di Pintu Kecil, Jakarta memper-hebat penyeludupan dan manipulasi dengan bantuan petua-lang-petualang ekonomi bangsa Indonesia, terutama yang berketurunan asing. Aidit sejak semula membela Cina-cina, terbukti pada saat PP 10 dijalankan, ia katakan bahwa peraturan itu tidak sesuai dengan Manipol dan dalam suatu wawancara pada tahun 1960, ia antara lain menyatakan bahwa PKI selalu memperjuangkan supaya ekonomi Indonesia harus berada di tangan bangsa Indonesia, tetapi dimajukannya alasan bahwa pengusiran cina-cina dari desa-desa merugikan perekonomian kita (PKI). Pernyataan ini serba kontradiksi, yang sesuai dengan pemikiran dialektika marx. “Saya seorang desa – saya mempunyai dua butir telur – kepada siapa saya menjualnya? Orang Tionghoa! Dan jika tidak ada orang Tionghoa saya tak dapat menjual telur saya..... Orang-orang Tiong-

hoa membantu kita, demikian Aidit. Kalkulasi Aidit tepat. Cina-cina harus dilindungi, karena merekalah yang membiayai subversi PKI dan sebagai alat ampuh untuk mengko-car kacirkan perekonomian Indonesia, membobrokan moral petugas-petugas negara.

Sebagaimana umumnya pemimpin-pemimpin Komunis menderita penyakit dikejar-kejar bayangan sendiri yang selalu merasa ketakutan, Aidit menyatakan pada Kongres VI PKI, bahwa “walaupun PRRI-Permesta sudah digagalkan,” pertualang-pertualang politikus reaksioner “masih cukup banyak di negara kita, dan Hatta masih tetap ada yang dapat “menenggelmkan “bangsa Indonesia dengan jalan mem-bentuk kabinet “reaksioner atau menyusun “kediktatoran militer” atau kediktatoran seorang”. Dalam kata-kata Aidit ini, turut diserang secara tidak terang-terangan perwira-perwira Angkatan Darat. (Jenderal Nasution, Jendral Ahmad Yani almarhum, dan lain-lain).

Brackman berkesimpulan, bahwa membubarkan PKI pada waktu itu (tahun 1962) sudah kasip, seharusnya PKI dibu-barkan antara tahun-tahun 1948 sampai 1952. Membu-barkannya akan justeru berbahaya sekali, karena mereka akan bergerak di bawah tanah. Anggota-anggotanya sudah cukup banyak jumlah dan jaringan sel-selnya sudah teratur rapi. Tambahan lagi Cina-cina Komunis yang memegang pun-cak kekuasaan ekonomi membantu pula mereka dan aparaturnya yang sudah korup dan telah didemoralisir karena kekurangan jaminan akibat politik “pemiskinan “ yang dija-lankan oleh PKI mudah diperalat.

Kemudian Gerakan organisasi PKI mencapai puncaknya hari Pada hari kamis malam tanggal 30 September 1965, sekelompok pasukan yang terdiri dari berbagai kesatuan Angkatan Darat bergerak menuju kediaman 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Hanya satu tujuan mereka, mem-

bawa ke-tujuh orang jenderal tersebut hidup atau mati ke hadapan Presiden Soekarno. Pada kenyataannya, mereka yang diculik tak pernah dihadapkan kepada Soekarno. Dalam aksinya, gerakan itu hanya berhasil menculik 6 jenderal saja. Keenam jenderal tersebut ialah Letjen. Ahmad Yani, Mayjen. Suprpto, Mayjen. S.Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. D.I Pan-djaitan, Brigjen. Sutoyo Siswomihardjo dan Lettu. Piere Tendean ajudan Jenderal Nasution. Nasution sendiri berhasil meloloskan diri dengan melompat ke rumah Duta Besar Irak yang terletak persis disebelahnya.

Gerakan ini dianggap sebagai *coup d'etat* yang bertujuan mengganti falsafah Negara dengan doktrin Negara komunis. Untungnya kejadian ini dapat ditanggulangi oleh TNI dan unsur-unsurnya yang loyal terhadap bangsa dan Negara Indonesia.

Setelah berhasil diantisipasi, gerakan PKI mendapat serangan dari berbagai pihak. Baik di ibukota maupun daerah-daerah, kampanye pengganyangan PKI diwujudkan dengan tindakan penculikan dan pembunuhan secara massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Semua anggota organisasi massa yang disinyalir memiliki hubungan dengan PKI pun tak luput mengalami hal serupa. Diperkirakan hampir setengah juta jiwa yang terlibat dalam PKI maupun ormas-ormasnya diberangus, *discreening*, atau dicituk.

Kini, pemberontakan PKI atau organisasi komunis tak lebih dari sebuah *lulabye* pengantar tidur yang merdu bagi anak-cucu kita. Tapi bagaimanapun, peristiwa-peristiwa tidak bisa dienyahkan begitu saja dari catatan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sejarah berulang. Ini terbukti dengan hidup dan matinya organisasi ini yang bagai jamur di musim hujan. Setelah dihabisi pada zaman pemerinta-

han Kolonial Belanda 1926, gerakan ini muncul lagi tahun 1948 dan kembali ditumpas habis. Terakhir 1965 organisasi ini melambung hingga anggotanya mencapai jutaan orang di Indonesia. Oleh sebab itu, meski saat ini gerakan ini terlihat sedang “tidur”, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa partai atau organisasi komunis Indonesia suatu saat akan muncul kembali.***



174 *Pembantaian PKI: Analisis Sosial-Politik Konflik Horizontal di Aceh, 1965-1967*

Bab IX

PENUTUP

Peristiwa gerakan 30 September lebih dari empat dekade lalu masih meninggalkan setumpuk tanda tanya dan “pe-er” bagi pemerintah Indonesia. Pemberontakan yang dianggap didalangi oleh PKI itu terjadi di Jakarta, tetapi dampaknya merata di seluruh Indonesia. Setelah G-30-S/PKI ditumpas, sama halnya dengan apa yang terjadi di Jakarta, sentimen anti-PKI juga tampak secara jelas di daerah-daerah, seperti Aceh, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahkan, berbeda dengan apa yang terjadi di ibu kota, sentimen anti-PKI di daerah-daerah tidak hanya ditandai oleh adanya aksi-aksi demonstrasi, tetapi lebih dari itu diwarnai pula oleh banyaknya aksi pembantaian terhadap mereka yang diindikasikan menjadi anggota atau simpatisan PKI. Begitu mengerikannya aksi-aksi pembantaian tersebut. Tidaklah mengherankan kalau Kolonel Sarwo Edhi Wibowo ketika berada di Solo merasa perlu untuk mengingatkan rakyat dengan mengatakan, "Kita tidak boleh menjawab teror dengan teror karena Alquran sendiri memperingatkan kita untuk tidak melampaui batas. Kita semua adalah manusia yang percaya kepada Tuhan, perikemanusiaan, dan kelima sila (Pancasila). Oleh sebab itu, tidaklah baik jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan."

Diperkirakan 500.000 sampai 2 juta jiwa menjadi korban dalam genosida penumpasan gerakan 30 September PKI. Sekitar 175.000 jiwa rakyat melayang dalam peristiwa Pembantaian PKI di Aceh. "Sepanjang sejarahnya manusia telah membuktikan diri sebagai produser penderitaan yang ulung dan konsumennya atau objeknya adalah manusia juga ... ", begitu Profesor Teuku Jacob menyimpulkan kekejaman yang telah diciptakan oleh manusia terhadap sesamanya. Peristiwa pembantaian PKI di Aceh adalah sebuah bagian kecil dari kisah pembantaian kemanusiaan yang berantai di seluruh Indo-nesia dari tahun 1965 hingga 1967, untuk menaikkan sebuah rezim penguasa baru. Sebuah rezim naik ke tahta kekuasaannya dengan melewati tangga kekejaman dan kekerasan yang luar biasa (*holocaust*) untuk mencapai ke puncak 'kestabilan politik' dan anak tanganya adalah mayat-mayat perempuan, tengkorak-tengkorak laki-laki dan tulang-belulang anak-anak kecil yang nyawanya hilang dalam pembantaian mengerikan sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini.

Profesor Teuku Jacob, seorang antropolog ragawi dari Universitas Gadjah Mada, mendaftar ulah kekejaman tersebut dengan kata-kata yang cukup mencengangkan. "Penyiksaan dan pengani-ayaan tahanan dan tawanan menunjukkan kebengisan yang tak ter-bayangkan, mulai dari mencambuk, mencabut kuku, menjepit ibu jari, melilit tubuh, membakar bagian badan, menyiram cairan panas, menjepit daging dengan jepitan membara, memotong urat, mengebiri, membuang ke hutan, gurun dan pulau, memperbudak, me-menggal kepala, menggantung, melempar dari tempat tinggi, men-cekik, membenamkan, melontari dengan batu sampai mati, me-nyalip, mengubur hidup-hidup, mencincang, mencurahkan cairan ke dalam mulut, sampai membunuh atau memperkosa anggota kelu-arganya di depan mata, menjemur, tidak memberi makan,

menye-ret dengan kuda, membakar dalam unggun api, dan sebagainya ... sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah terhadap rakyatnya sendiri”¹

Begitu sulit untuk dipercaya bahwa ulah kekejaman semacam itu hampir seluruhnya dilakukan oleh rejim Orde Baru terhadap mu-suh politik mereka atas nama suatu gagasan yang begitu tinggi dan mulia, yakni Pancasila! Malahan rejim ini masih menggenapi khasa-nah penyiksaan dan pembunuhan dengan penemuan baru mereka: memasukkan tahanan hidup-hidup ke dalam leweng atau sumur alam yang amat dalam, memasukkan kedalam kapal bobrok dan menenggelamkannya, menenggelamkan hidup-hidup tahanan de-ngan beban besi atau batu, menyiram gua dan ruba tempat per-semunyian dengan bensin dan membakarnya serta melemparkan alat peledak, menyetrom kemaluan laki perempuan ketika mereka dipaksa ber-setubuh, menancapkan bambu runcing ke dalam vagina, suatu tindakan keji yang sulit diterima akal sehat. Tidak ada akal normal masyarakat beradap yang mampu menerima kenyataan ini dengan tanggapan biasa-biasa saja. Dan hebatnya rejim ini berusaha keras untuk menghapusnya dari memori orang banyak dengan segala macam cara, termasuk pemalsuan sejarah dan menggantinya dengan memori rekayasa, Pancasila sakti dengan mengutal sekian juta nyawa.

Pembantaian PKI di Aceh adalah sebuah catatan sejarah yang paling suram, merinding bulu roma mendengar jeritan dan tangisan mereka, meski lewat sumber penutur sekunder sekalipun. Kita ha-nya berpikir, jika mendengarnya saja kita sudah mengindik kengeri-an, bagaimanakah para pelaku pembantaian itu bisa dengan te-nang dan dingin memenggal kepala mereka dan menusukkan bam-bu runcing ke dalam kemaluan perempuan-perempuan tak ber-

dosa dan menjadi tertuduh? Sanggupkah mereka mendengarkan jerit pe-dih kesakitan mereka? Sudah ke manakah rasa kemanusiaan kita yang luhur dan selalu kita bangga-banggakan itu? Bagi orang Aceh, sederhana saja menjawabnya, *kemanusiaan awak nyan ka asee hue* (rasa kemanusiaan mereka sudah tidak ada, sudah dibawa lari oleh anjing).

Beberapa tahun terakhir ini, pentas politik Indonesia diwarnai oleh terjadinya berbagai perubahan besar, yang sebagian di antara-nya bisa dikatakan merupakan perubahan yang sangat tidak ter-duga. Jiwa zaman (*zeit geist*) yang sebelumnya ditandai oleh kuat-nya budaya politik parokial dan kaula diganti oleh zaman baru yang diwarnai oleh semakin berkembangnya budaya politik partisipan. Dalam kaitan itu, seiring dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto, muncul tuntutan-tuntutan untuk merevisi sejarah Indonesia, khusus-nya yang berkaitan dengan sepak terjang Orba, termasuk sepak terjang para tokoh Orba. Ada pun satu di antara kisah perjalanan sejarah Orba yang kini banyak digugat kembali adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).

Pada dasarnya ada empat alasan yang membuat suatu peristiwa sejarah perlu ditelusuri kembali. *Pertama*, adanya ketidakpuasan terhadap sejarah yang ada. *Kedua*, adanya penemuan sumber baru. *Ketiga*, adanya reinterpretasi sumber lama. Keempat, adanya perubahan sikap dan pandangan terhadap masa lalu.

Berpijak pada keempat alasan tersebut, jelaslah bahwa peng-kajian kembali suatu peristiwa sejarah akan selalu terbuka dan bisa dilakukan setiap saat bila kondisi-kondisi sebagaimana dikemuka-kan di atas muncul ke permukaan. Bila penelusuran kembali peristiwa sejarah dilakukan tidak hanya akan membuka peluang bagi lahirnya "versi" baru

tentang sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga bisa jadi akan membuka peran sesungguhnya dari para aktor se-jarah.

Berdasarkan deskripsi singkat perjalanan Gerakan 30 September 1965 sebagaimana yang telah dikenal luas selama ini, secara implisit terlihat adanya dua jenis fakta sejarah yang muncul ke permukaan. *Pertama*, fakta lunak (*soft fact*), yakni berupa fakta sejarah yang kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan. *Kedua*, fakta keras (*hard fact*), yakni fakta sejarah yang kebenarannya sudah tidak diragukan lagi karena telah menjadi pengetahuan umum serta didukung oleh sumber-sumber primer, baik lisan, tulisan, mau-pun benda.

Peristiwa di seputar Gerakan 30 September yang telah merupakan fakta keras di antaranya adalah, pertama, realita bahwa Gerakan 30 September 1965 memang benar adanya pernah terjadi dalam pentas sejarah Indonesia. Dengan demikian, Gerakan 30 September ini bukanlah merupakan sebuah imajinasi sejarah sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi menyangkut ada tidaknya peristiwa tersebut. *Kedua*, kenyataan bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah gerakan yang didominasi oleh unsur-unsur militer yang ditujukan pada kelompok kekuatan militer lainnya. *Ketiga*, Gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Kenyataan bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah upaya kudeta tampak jelas dalam pengumuman radio yang dikeluarkan oleh Komando Gerakan 30 September melalui RRI, termasuk dokumen tertulis berupa Dekrit No. 1 tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, Keputusan No. 1 tentang Susunan Dewan Revolusi Indonesia, dan Keputusan No. 2 tentang Penurunan dan Penarikan Pangkat.

Selanjutnya, bila dicermati lebih mendalam, jelas terdapat pula bagian-bagian dari peristiwa Gerakan 30 September ini yang masih terbuka untuk diperdebatkan. Yang paling mendasar adalah me-nyangkut dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965, sekaligus tentang benar tidaknya PKI sebagai dalang G30S. Permasalahan kedua, menyangkut jumlah korban aksi-aksi pembantaian di berbagai daerah.

Sejarah nasional versi Orba yang berkembang selama ini menempatkan PKI sebagai dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sementara di luar itu, telah lama berkembang versi-versi lain yang hampir kesemuanya kontradiktif dengan versi sejarah yang di-kembangkan Orba. B.R.O.G. Anderson dan Ruth McVey dari Cornell University, Amerika Serikat, dalam tulisannya yang berjudul, "*A Preliminary Analysis of The October 1, 1965: Coup in Indonesia*", serta Harold Crouch dalam bukunya, "*The Army and Politics In Indonesia*" (1978), secara tegas mengatakan bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan puncak dari konflik intern di dalam TNI-AD. Dengan kata lain, PKI hanyalah sekadar kambing hitam yang digunakan untuk mengaburkan dalang sebenarnya.

Pendapat lain yang lebih kontroversial dikembangkan Wertheim dalam bukunya, "*Whose Plot? New Light on The 1965 Events*" (1979). Menurut Wertheim, penempatan PKI sebagai dalang G30S sangat tidak beralasan. Kalaupun PKI terlibat di dalamnya, peran-nya bisa dipastikan sangatlah kecil dan hal itupun lebih merupakan sebuah rekayasa. Dengan demikian, menurut Wertheim, sulit untuk terbantahkan bahwa dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak lain adalah Mayjen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad. Untuk mendukung argumennya, Wertheim mengemu-kakan adanya dua buah kejanggalan

yang menyertai G30S.

Pertama, terbitnya koran "Harian Rakjat" edisi 2 Oktober 1965 yang memuat dukungan terhadap Gerakan 30 September 1965. Padahal menurut Wertheim pada tanggal tersebut secara jelas G30S telah gagal. Kedua, pada hari itu ada larangan untuk memuat berita tentang G30S.

Analisis Wertheim tentang keberadaan Soeharto sebagai dalang G30S ternyata mendapat dukungan dari beberapa cendekia-wan lainnya. Bahkan, di samping argumen yang dikembangkan Wertheim, setidaknya masih ada dua hal lainnya yang memperkuat "teori" bahwa Soeharto dalang peristiwa G30S. *Pertama*, tidak masuknya Soeharto dalam daftar jenderal yang harus diamankan G.30.S, padahal saat itu ia memegang posisi strategis sebagai Pangkostrad. *Kedua*, Soeharto mengenal secara baik dan dikenal juga secara baik oleh Letkol Untung dan Kolonel Latief karena ke-dua perwira tersebut merupakan mantan anak buah Soeharto di Divisi Dipenogoro. *Ketiga*, pertemuan Soeharto dengan Kolonel Latief pada malam hari tanggal 30 September 1965 di RSPAD. Menurut para analis, maksud Latief menemui Soeharto pada malam tersebut tidak lain untuk melaporkan Gerakan 30 September. Sementara itu, Soeharto sendiri berargumen bahwa pertemuan tersebut lebih merupakan upaya Latief untuk memastikan bahwa Soeharto ada di rumah sakit dan tengah diliputi duka besar atas musibah yang menimpa puteranya.

Versi lain seputar G30S menempatkan Presiden Soekarno sebagai dalang peristiwa G30S. Analisis yang berpendapat Soekarno sebagai dalangnya adalah John Hughes dalam bukunya, *The End of Sukarno* (1967). Menurut Hughes, tindakan Untung menggelar G30S telah mendapat restu Soekarno sehingga Soekarno tampak tidak memperli-

hatkan reaksi istimewa ketika Brigjen Soepardjo yang melaporkan terbunuhnya para jenderal TNI-AD. Pendapat yang sejalan dengan Hughes, dikemukakan pula oleh Anthonie CA Dake dalam bukunya, *The Spirit of Red Banteng* (1973). Menurut Dake, G30S terpaksa digelar Soekarno karena ia sudah tidak sabar dengan sikap oposan yang diperlihatkan dua perwira tinggi TNI-AD, yakni Jenderal A.H. Nasution dan Letjen Ahmad Yani. D.N. Aidit sendiri baru tahu perintah tersebut dalam rapat Politibiro tanggal 7 Agustus 1965. Mengingat ketergantungan PKI yang sangat besar terhadap Soekarno, PKI mau tidak mau kemudian melibatkan diri di dalamnya.

Begitu beragamnya versi yang berbicara tentang dalang G30S serta jumlah korban pembantaian jelas menjadikan peristiwa G30S menjadi demikian menarik untuk dikaji kembali. Terbukanya akses untuk menggali sumber dari aktor-aktor sejarah yang selama ini menjadi "terpidana" hendaknya mampu disikapi secara arif sebagai peluang berharga untuk mengungkap peristiwa G30S secara transparan sehingga setiap pelaku sejarah dapat ditempatkan sesuai dengan peran sejarah yang dimainkannya. Sikap emosional dan membabi buta dalam upaya pengkajian atau penelusuran kembali peristiwa G30S bukan saja hanya akan menjadikan peristiwa tersebut tetap tidak jelas dan penuh rekayasa, tetapi juga akan membuat karya sejarah yang dilahirkan nanti tidak ada bedanya dengan karya sejarah yang dilahirkan pemerintah Orba, yakni sejarah yang sarat dengan kepentingan sesaat atau kepentingan subjektif para tokoh atau penguasa. Bila demikian, apa gunanya membaca dan mempelajari karya sejarah. Dalam kaitan itu pula, penggunaan istilah pelurusan sejarah hendaklah dihindari dan akan terasa lebih tepat bila yang digunakan adalah istilah penelusuran kembali peristiwa sejarah atau pengkajian kembali peristiwa se-

jarah.

Berpijak pada konsep pemikiran itu pula, jelaslah bahwa sela-ma rekonstruksi sejarah didasarkan atas fakta-fakta sejarah tidak ada satupun karya sejarah yang bisa dikategorikan sebagai sebuah manipulasi sejarah atau kebohongan sejarah. Oleh karena itu, perkembangan bangsa ini ke depan yang perlu dikembangkan dalam melahirkan kajian-kajian terhadap peristiwa sejarah adalah melakukan penjarakan (distansiasi) terhadap peristiwa sejarah yang tengah diteliti. Terlebih lagi terhadap kepentingan penguasa atau kepentingan pihak-pihak yang tengah memegang kekuasaan. Hal lain yang tidak kalah penting, bahwa sejarah sebagai hasil rekonstruksi membuka peluang yang seluas-luasnya bagi terjadinya perbedaan pendapat selama perbedaan pendapat tersebut didasarkan atas fakta dan interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.***



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Sayed, *Wawancara*, Banda Aceh, tangga 8 Jui 2006
- Al Habsyi, Said Umar, "Hanya sekali PKI lancarkan Aksinya di Banda Aceh", dalam harian *Waspada* Medan, tanggal 22 September 1986.
- Al Habsyi, Said Umar, *Hanya Sekali PKI Lancarkan Aksinya di Banda Aceh*, Harian Waspada, Medan, tanggal 22 September 1986.
- Amelz, *Riwayat Singkat Atjeh Bangoen Sesoedah Tidoer Njenjak Beberapa Poeloeh Tahoen Laloe*, (Pidie, naskah ketikan, t.t.).
- Ardhana, I Ketut, *Dimensi-dimensi Konflik di Tingkat Lokal*, Lokakarya Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, 2005.
- Bowen, Craig, *From Ashes The Rise and Fall of the PKI, A Short History of The Indonesian Communist Party*, Militant International Publication.
- Ebesnstein, William, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia*, Narasi, Jakarta, 2006.

Hasjmy, A., *Peranan Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Hasjmy, Ali, *Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980).

Ibrahim, A.R, *Awal Kehancuran PKI di Aceh*, Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh, Tanggal 30 September 1993.

Jiuping, "9 Komentar Mengenai Partai Komunis", PT. Sinar Era Baru, Jakarta, 2005.

Kasdi, Aminuddin, *PKI/BTI Membakar Jawa dan Madura Dengan Aksi-aksi Sepihak (1963 – 1965) dan Selogan Revolusi Belum Selesai*, Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, Jakarta, 2005.

Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia no. 1/Miss8 1959)

KH, Ramadhan dan Hamid Djabbar, *Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

Langenberg, Michael van dkk, *Gestapu: Matinya Para Jenderal dan Peran CIA*, editor Sutoro, Cermin, Yogyakarta, 1999.

Liong, Liem Soei, It's the Military, Stupid! Dalam Freek Colombijn dan Thomas Lindblad (ed) et.al., *Roots of Violence In Indonesia* (Leiden: KITLV, 2002).

Lukman, M.H., *ABC Revolusi Indonesia*, 1957.

McDonald, Hamis, dalam *Suharto's Indonesia* (Blackburn, Victoria: Fontana Books, 1980), hal. 109.

Mediakrasi.com.

- Memorandum Intelejen CIA, "Indonesian Army Attitudes toward Communism" Directorate of Intelligence, *Office Current Intelligence*, 22 November 1965, case #88-119, Doc. 119, butir 1.
- Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1974.
- Ponomban, Fendry, Periset dari Off Stream Komunitas Media dan Dolumenter Jakarta.
- Rifky Pradana, *Syair Perang*, (typescript, t.t.).
- Sugiarso Suroyo, *Siapa Yang Menabur Angin, Akan Menuai Badai*, Jakarta, 1988..
- Sulaiman, M. Isa, (et.al), *Aceh dan Belanda: Kumpulan Bibliografis*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan, 2003).
- Sulistiyono, Singgih Tri, *Peran Angkatan Darat dalam G-30-S 1965*, Lokakarya Kerjasama LIPI, DIKNAS, MSI, Jakarta, 2005.
- Toer, Pramoedy Ananta, dalam pengantar buku tesis dokter dari Grend Poulgrain, pengajar di University of New England, Australia, *The Genesis of Malaysia Konfrontasi Brunei and Indonesia*, 1945-1965.
- Wahid, Salahudin, *Memecahkan Teka-Teki Sejarah G-30-S*, dalam buku Aminuddin Kasdi, *G. 30. S. PKI/ 1965 Bedah Cesar Dewan Revolusi Indonesia*, Java Pustaka, Jakarta, 2005.
- Wertheim, W.F., "Sejarah Tahun 1965 yang Tersembunyi", *Arah*, No.1/ tahun 1990.

B. Surat Kabar dan Majalah

DM 18-3-1959

DM 23-31959

DM 25-5-1959

DM 6-8-1959

DM 7-8-1959

DM 25-8-1959

DM 28-5-1959

DM 25-11-1959

DM 26-11-1959

DM 27-11-1959

DM 1-12-1959

DM 7-8-1959

Kompas, 6 Juli 1965

Kompas, 10 Agustus 1965

Kompas, 12 Oktober 1965

Kompas, 13 Oktober 1965

Kompas, 15 Oktober 1965

Kompas, 14 Oktober 1965

Kompas, 20 Oktober 1965

Kompas, 21 Oktober 1965

Kompas, 21 Oktober 1965

Kompas, 16 Oktober 1965

Kompas, 20 Oktober 1965

Kompas, 18 Oktober 1965

Kompas, 19 Oktober 1965

Kompas, 11 Oktober 1965

Kompas, 23 Oktober 1965

Kompas, 23 Oktober 1965

Kompas, 26 Oktober 1965

Kompas, 27 Oktober 1965
Kompas, 28 Oktober 1965
Kompas, 29 Oktober 1965
Kompas, 8 Oktober 1965
Kompas, 6 Oktober 1965
Kompas, 7 Oktober 1965
Kompas, 30 Oktober 1965
Kompas, 3 November 1965
Kompas, 4 November 1965
Kompas, 4 November 1965
Kompas, 4 November 1965
Kompas, 6 November 1965
Kompas, 6 November 1965
Kompas, 6 November 1965
Kompas, 8 November 1965
Kompas, 8 November 1965
Kompas, 8 November 1965
Kompas, 10 November 1965
Kompas, 12 November 1965
Kompas, 13 November 1965
Kompas, 16 November 1965
Kompas, 17 November 1965
Kompas, 23 November 1965
Kompas, 26 November 1965
Kompas, 29 November 1965
Kompas, 4 Desember 1965
Kompas, 9 Desember 1965
Kompas, 16 Desember 1965
Kompas, 3 Januari 1966

Kompas, 13 Januari 1966

Kompas, 22 Januari 1966

Kompas, 10 Februari 1966

Kompas, 12 Februari 1966

Kompas, 18 Februari 1966

Kompas, 19 Februari 1966

Kompas, 3 Februari 1966

Kompas, 9 Maret 1966

Kompas, 19 Maret 1966

Kompas, 12 April 1966

Kompas, 2 Mei 1966

Kompas, 9 Juni 1966

Kompas, 7 Juli 1966

Kompas, 17 Desember 1966

Kompas, 11 Oktober 1966

Kompas, 19 Oktober 1966

Kompas, 6 Oktober 1966

Kompas, 7 Oktober 1966

Kompas, 7 Oktober 1966

Kompas, 4 November 1966

Kompas, 16 Januari 1967

Kompas, 20 Maret 1967

Kompas, 14 April 1967

Kompas, 27 April 1967

Kompas, 29 April 1967

Kompas, 6 Mei 1967

Kompas, 15 Juni 1967

Kompas, 14 Agustus 1967

Kompas, 6 September 1967
Kompas, 9 Oktober 1967
Kompas, 5 Oktober 1967
Kompas, 2 Agustus 1969
Kompas, 3 Oktober 1969
Kompas, 14 Februari 1970
Kompas, 22 Juli 1970
Kompas, 11 Agustus 1970
Kompas, 31 Agustus 1971
Kompas, 16 Desember 1971
Kompas, 7 Oktober 1972
Kompas, 22 Juni 1972
Kompas, 9 Mei 1972
Kompas, 30 Maret 1973
Kompas, 12 November 1973
Mail Rapporten No. 829X/26
Mail Rapporten No. 872X/26
Mail Rapporten No. 899X/26
Mail Rapporten No. 938X/26
Mail Rapporten No. n687 Geh/1931
Pikiran Rakyat, 23 Juni 2005
Serambi Indonesia, 4 Oktober 2000
Serambi Indonesia, 4 Oktober 2000
Sinar Harapan, 27 November 1965
Sinar Harapan, 3 Maret 1969
Swadesi, No 1545/th XXX/Agustus 1998

C. Situs Internet

186 *Pembantaian PKI: Analisis Sosial-Politik Konflik Horizontal di Aceh, 1965-1967*

www.agbardsley.com

www.pir.org/kadane.com



INDEKS

- | | | | |
|-----------|------------|-----------|-------------|
| A. Has- | Abdurah- | dirdjo | Amir |
| jmy....4, | cman |146 | Syari- |
| 5, 37 | Suri- | Allen | fudin 73 |
| A. Karim | omi- | Pope.67 | Amster- |
| AS....41 | hardjo | Amelz.19, | dam....6 |
| A. Latief |95 | 20, 30, | Andi |
|52 | Adolf | 31, 32 | Rivai 61 |
| A.H. Nas- | Baars | Aminud- | Angkatan |
| ution |145 | din | Daratix, |
| ...50, 53 | AH Nasu- | Kasdi | x |
| A.K Gani | tion.....x |18 | Anthony |
|162 | Ahmad | Amir | Reid. ix |
| A.K. | Yani 50, | Husin | Atjeh |
| Pring- | 53, 56 | al Mud- | Tram |
| godigdo | Ah- | jahid35, | ...19, 24 |
|146 | madiya | 38 | Atjeh- |
| A.R | h Qadi- | Amir | Moorde |
| Ibrahim | an.....21 | Mah- | n.....20 |
|48 | Ali Has- | mud.61, | Baiturrah- |
| Abdul | jmy...28 | 63 | man. 25 |
| Gani | Ali Moer- | Amir | Banda |
| Usman | topo..99 | Sjari- | Aceh |
|38 | Ali Mur- | fudin | ..20, 25, |
| Abdul | topo.59, |161, | 26, 27, |
| Murat | 139 | 162, | 28 |
| Mat Jan | Alimin | 165 | Banua.....5 |
| ...37, 41 | Prawiro | | |

Barisan	..52, 54,	Das	Faqeh Ab-
Tani In-	56, 57	Kapital	dul Gh-
donesia	Central2	ani....24
(BTI)42	Sarekat	Dayah	Freddy
Basuki	Islam	Ummul	Supit
Rahmat	(CSI)..9	Ayman142
.....61	Chiang24	Front Anti
Batee	Kai Sek	De Vol-	Komuni
Iliek. 2166	harding	s.....x
Benedict	Chris6	G.H
R. An-	Hilton	Dekker...6	Bousqu
derson73	Dipone-	et....163
.....51	CIA...1, 3,	goro...9	G30S....1,
Besitang	x, 50,	Djahuruf	18
.....19	52, 55,53	GAM....34
Bireun.18,	75	Djuanda	Gatot
19, 24	Cina..2, 3,	..37, 39,	Subroto
Bob Has-	12	4039
an....64	CSIS....80	DN Aidit	Gatot
Bob	Cumbok96	Sukirno
Sunario	...41, 43	Domine53
.....58	D.I Pand-	Iz	Gayo...20,
Boedi	jaitan50	Thenu	21
Oetomo	D.M.G22	genocide
...5, 145	Koch. .6	DPRD-xi
Bolshevik	D.N. Aidit	GR.....x	Gerakan
.....2	.71, 167	Dul Arief	Revolu-
Bronbeek	Darsono 8,52	sioner
Arnhem	146,	E. Ridwan	Islam
.....22	15294	Indone-
Bungkus	Darurat	E. Van	sia....38
.....53	Militer	Caspel	Gerindo
Cakr-3478161,
abirawa		Engels...2	162

Gerwani ..90, 94, 98, 99	Hasjmy ..36, 37, 39, 41	bebas)10	Indische Partij..7
Gilchrist69	Hatta. 154, 155,	Hidayat Wiryas- anjaya58	Indische Sociaal Demo- crat- ische
H.J.C Princen ...78, 84	156, 161, 167,	Hindia Belanda6	Vereeni ging (ISDV)5
Haagsche Courant78	171 Hendricus Joseph- us	Hitler...73 Hoesin Gelar	Indische Sociaal- Demo- crat- ische
Hadji Mis- bach. 30	Francis- cus Marie	Manga- raja Tagor29	Vereeni ging (ISDV)147
Haji Has- anuddin38	Sneevli et...145	HOS Tjok- roamin oto...29, 30	Indonesia ..1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, x, 11, xii, 15, 16, 17
Haji Merah 9	Hendricus Joseph- us	I Ketut Ard- hana. 17	Indonesia Raya.84
Haji Mis- bach. .8, 9	Fransis- cus Marie	Imam Bardjo65	In- donesic he
Harjono MT..62, 64, 65	Sneevli et.....6	Imuem Gam. 29	Vereeni ging148
Haryono ...50, 53	Henk Kolb.78	Indie Werbaa r (per- tahanan Hindia)8	
Hasan Aly37	Henk Sneevli et....147		
Hasan Saleh ...37, 38	Het vrije woord (Kata yang		

Isa An-shary. .x	K.P.M.	Kuntoadji	M. Munir
Ishak Amin37	(Kon- ingkelij ke91	Azis. .iii
Ishak Juarsa	Pakkat Vaar	Kutaradja ..18, 20,	M. Yasin 47, 142,
.....50	Maata- schap- pij)...31	29	143
Iskandar Zulkarn aen...26	Kamalud- din...94	Kyai Maja...9	M.H
J.A. Branste der, H.W...6	Karl Marx2, xii, 147	Langsa 19, 26, 27	Tham- rin. .160
Jakarta 37, 38, 39, 40, 43, 49	kaum terpilih12	Latief...63	M.H.Luk- man. .15
Jawa Bar- at.....x	Kepu- tusan Pemer- intah (Kep- pres)	Lenin. 5, 9	Madiun. 1, 5, ix
Jaya.....5	Nomor 28	Lhok Sukon19	Madiun Affairs78
Jean Dubois159	Tahun 2003.34	Lhokseu- mawe ...18, 19	Magusig O.....95
Jepang...4, 8	komunisto phobiaxi	Liem Siu Liong64	Mail Rap- porten ...20, 21
Jerman Barat. .2	Kuala Sim- pang. 19	Liem Soei Liong83	Maludin Sim- bolon36
Jiuping...3, 13	Kuba.....2	Lingga...5	Manifesto Komuni s.....2
Julu Rayeu26		M Hatta155	Mao Zedong3, 14
		M. Hanafi- ah....21	Mare- chausse18
		M. Insja36	Marsose22
		M. Isa Su- laiman ...20, 21	

- | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| Mas | Noor | Pasopati | Poelo |
| Marco 8 | Majid | ...52, 53 | Pandjoe |
| Mashuri | ...48, 49 | Pedir.....5 | ...32, 33 |
|57 | Nyoto...71 | Pemilu | POLRI. 18 |
| massacre | Orde Baru | 1955...x | Pramono |
|xi | 1, 4, 12 | Penelitian |145 |
| Masyumix | Orde | Khusus | Pranoto |
| Medan.25, | Lama | (Litsus) | Rek- |
| 26 |137 |84 | sosam- |
| Min- | Organ- | Perhim- | odra..64 |
| angkab | isasi | punan | Pranoto |
| au....19, | Buruh | Indone- | Rek- |
| 20 | seluruh | sia (PI) | sosamu |
| Mojokerto | Indone- |154 | dro....60 |
|6 | sia | Perlak...4, | PRRI...33, |
| Muhamm | (SOB- | 19 | 34, 37 |
| ad Sa- | SI)...42 | Perserikat | PRRI/Per- |
| madikin | P. | an | mesta |
|47 | Bergsm | Komuni |35 |
| Mujahidin | a.....6 | s.....5 | Rahmad |
|19 | Paat.....53 | Piere Ten- | Ali....21 |
| Mukidjan | Palak | dean. 50 | Ratu Adil |
|53 | Bangka | Pikiran |9 |
| Musso | run....94 | Rakyat | Rifky Pra- |
|163, | Pancasila |25 | dana. 22 |
| 164, |x | PKI...1, 2, | RIS.....34 |
| 165, | Panton | 3, 4, 5, | Romo |
| 167 | Labu.19 | 6, 8, 9, | Wignyo |
| NAD....34 | Partai | x, 11, | sumarto |
| Nathar | Komuni | 12, 15, |78 |
| Zainud- | s In- | 16 | Rosihan |
| in.....43 | donesia | Pocut | Anwar |
| | (PKI)..5 | Meuli- |138, |
| | | goe...21 | 167 |

RRC.....x	Sartono	155,	Soedjono
Ruth	Kar-	156,	Hoe-
McVey	todirdjo	164	mardani
.....150146	Sentot...980
Ruth T.	Sarwo	Seulawah	Soeharto
Mc Vey	Edhie19	1, x, xi,
.....51	Wibow	Seulimeu	52, 57,
Ryacudu	o.....57	m18, 19	58, 59,
.....61	Satar....53	Si Gom-	60, 61,
S. Parman	Sayed	bar....25	62, 63,
..50, 62,	Abubak	Sigli....18,	64, 65,
64, 65	ar.....48	19, 26	66, 69,
Said	Semaoen	Sinar	74, 75,
Umar	..6, 8, 9,	Djawa 8	138,
Al	11, 146,	Singgih	140,
Habsyi	153,	Tri	141
.....49	157	Sulistiy	Soejono
Salahudin	Semarang	ono...1853
Wahid5, 6	Sjahrir	Soekarno
...50, 51	Semarang161,x, xi,
Salim-	Han-	167	49, 50,
Moeis	delsver	Sjamaun	52, 54,
.....147	eenigin	Gaharu	56, 59,
Samalang	g.....6	...35, 43	65, 66,
a 18, 19,	Se-	Sjammaun	68, 69,
21, 22,	marang	Gaharu	72, 74,
24, 30,	se Han-	..35, 36,	168,
31	delsver	37, 39,	172
Santoso57	eniging	41	Soe-
Sarekat145	Sneevliet	marson
Islam	Semaun6	o.....73
(SI)....7,150,	Soe-	Soemitro
28	152,	bandrio	Djojo-
	154,	...63, 75	hadikus

umo. 66, 68	Subi- adinata	Syam	157,
Soenarjo	Jusuf 92	Kamaru	164
.....64	Sudarto 56	zzaman	Tedjo
Soepardjo	Sugiarso73	Suwarn
.....63	Suroyo	Syiah Ku-	o.....81
Soeprapto60	ala....49	Tengku
..53, 62, 64, 65	Sugih	T. Ahmad	Darwis
Soeraba-	Arto	Aree. 33	Djeunie
jaasch137	T. Bentara	b.....75
Han-	Sukardjo	Pineuen	Teuku
dels-53	g.....33	Hamzah
blad....6	Sukarno	T.36
Soeraba-	34, 158,	Hamzah	Teuku
jasch	16139	Raja
Han-	Sulaiman	T. Moeda	Bujang
dels-53	Dalam29
blad 145	Sumijarsi33	Teuku
Soerono91	T. Pakeh	Tjhik
.....53	Suprajogi	Mah-	Moe-
Soetojo39	moed 33	hamma
..53, 62, 65	Suprapto	T. Tjhik	d Ali
Soewardi50	Peusan-	Basjah
Poespoj	Surjop-	gan...33	...30, 31
o.....139	ranoto 9	T.M.	Teuku
Solihin. 61	Sutikno 64	Amin 38	Umar 21
Staat-	Sutojo	T.R. Idris	Teungku
spoor	Sis-38	Daud
(SS)....7	womi-	Tan	Beureu
Stalin. 73, 95	hardjo	Malaka	eh....34
50146,	Teungku
	Sutomo	147,	Nur-
160	153,	uzzahry
	Syam....52	156,24

Tgk. Ab- doel Hamid ..30, 31, 32, 33	hamma d Da- woed Beureu- eh....32,	Tik Liong ...64, 65 TNI..x, 18 Trier.....2 Ud.	van der Heijden24 Van der Plas. 62,
Tgk. H. Ahmad Hasbal- lah In- drapuri33	33 Tgk. Sjech Abdoel Hamid32	Dewant o.....67 Umar Wira- hadikus umah ..58, 60, 61	65, 66, 69, 71, 73, 74, 75 Vereenigi ng voor Spoor -en Traam- wegper- soneel (VSTP)6
Tgk. Hadji Abdoel- lah Oed- jong Rimba32	Tgk. Sjech Ibrahim33 Tgk. Yan Garot32 Thaib Adamy ..17, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	Umar Wwira- hadikus umah 56 Uni So- viet....2, 10, 13 Uni Sovyetx Untung ..54, 56, 57, 58, 61, 63, 74	Volksraad (Dewan Rakyat)8 Voltaire73 W.F. Wer- theim99 Weltevre- den. 148 Widodo80 William Eben- stein. 12 Yogyakart a.....39
Tgk. Haji Malem30	44, 45, 46, 47, 48	57, 58, 61, 63, 74	
Tgk. Hoesin Poelo Pandjoe32	The New York magazi ne.....85	Utomo Ramela n.63, 74 UUD 1945...x	
Tgk. Moe- hamma d Amin32	The Wash- ington Post..97		
Tgk. Moe-	Thee Kian Seng.64		

Zelfbe- stuurder	30
------------------------------	----

